Buku Teks Bahan Ajar Siswa

KURIKULUM 2013

Paket Keahlian:
Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan

Penyuluhan Pertanian






KELAS
X
SEMESTER 1

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi dasar kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi dasar kelompok keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti rumusan tersebut.

Pembelajaran kelas X dan XI jenjang Pendidikan Menengah Kejuruhan yang disajikan dalam buku ini juga tunduk pada ketentuan tersebut. Buku siswa ini diberisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterapilan dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasai secara kongkrit dan abstrak, dan sikap sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah alam semesta yang dikaruniakan kepadanya melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharuskan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serp siswa dengan ketersediaan kegiatan buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

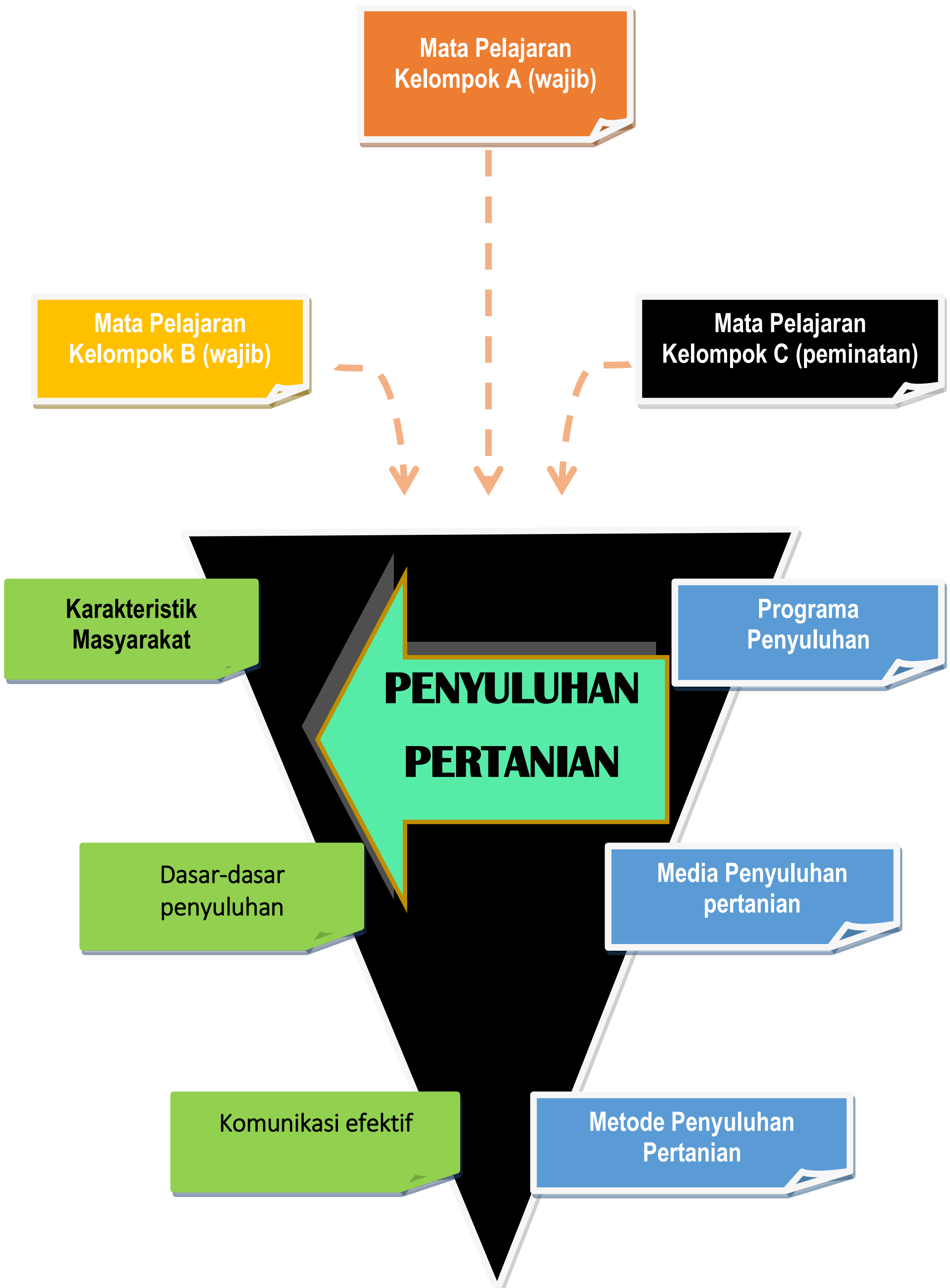
Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045)

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

PETA KEDUDUKAN BAHAN AJAR



GLOSARIUM

1. Buku Teks Bahan Ajar Siswa, adalah buku pelajaran bagi siswa sekolah yang berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, petunjuk penggunaan buku, tujuan pembelajaran, kegiatan siswa, uraian materi, refleksi, tugas, dan penilain.
2. Programa penyuluhan pertanian, suatu teknik penyusunan program penyuluhan pertanian dengan melibatkan unsur terkait termasuk yang akan diberi penyuluhan untuk memberikan masukan apa yang dibutuhkan pada satu tahun kedepan
3. Brainstorming, adalah bentuk diskusi yang seluruh anggotanya diminta untuk mencurahkan pendapatnya tanpa ada sanggahan, kemudian dikelompokan bagi pendapat sejenis dan kemudian minta komentarnya dari seluruh anggota diskusi.
4. Urbanisasi, perpindahan anggota masyarakat dari desa ke kota untuk mencari penghasilan
5. Pini sepuh, anggota masyarakat yang usianya diatas rata-rata dan atau dituakan oleh masyarakatnya serta selalu diminta pendapatnya
6. Kosmopolit, orang yang berpandangan modern
7. Gallery walk, suatu teknik diskusi yang memajangkan hasil kerja kelompok kemudian dikunjungi oleh kelompok lain untuk mendapat penjelasan dan mendiskusikannya, dengan pembagian tiap kelompok ada yang bertugas sebagai penjaga stand untuk menjelaskan serta ada yang berkunjung ke kelompok lain, setelah kembali kekelompoknya dari tugas berkunjung kemudian memberikan informasi kepada petugas jaga sehingga akan mendapat pemahaman yang sama.

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Buku Teks Bahan Ajar Siswa Penyuluhan Pertanian 1 ini merupakan bagian dari Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, pada Kelompok C 2 Dasar Bidang Keahlian Mata Pelajaran Penyuluhan Pertanian, bagi siswa SMK Program Keahlian Budidaya Tanaman. Buku Penyuluhan Pertanian 1 ini merupakan dasar dari kemampuan utuh seorang jika kelak menjadi penyuluh pertanian, di samping mata pelajaran lain yang merupakan mata pelajaran terkait kompetensi program keahlian yang dipelajari.

Mengingat berisikan dasar dari kompetensi penyuluh, maka buku ini akan mempelajari:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat sasaran agar dalam menjalankan tugasnya kelak memahami struktur, ciri, karakter, tingkat adopsi inovasi, siapa dan bagaimana menghadapinya dari masyarakat yang menjadi binaannya;
2. Dasar-dasar penyuluhan pertanian akan berisi sejarah penyuluhan, mengapa perlu revitalisasi penyuluhan pertanian, bagaimana peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian di Indonesia, penjelasan dari Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, apa dan bagaimana seharusnya menjadi seorang penyuluh, bagaimana membentuk dan mengembangkan kelompok;
3. Teknik komunikasi efektif akan membahas bagaimana prinsip dasar komunikasi, apa unsur dari komunikasi, bagaimana jenis komunikasi yang ada di dalam masyarakat, bagaimana teknik menyimak efektif, dan bagaimana terjadinya komunikasi efektif.

B. Prasyarat

SILABUS

MATA PELAJARAN PENYULUHAN PERTANIAN

Satuan Pendidikan : SMK

Kelas/ Semester : X/ 1 & 2

Kompetensi Inti

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menganalisis, menerapkan dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				
2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara				
2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar				

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbud hankam)				
2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara				

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).				
3.1 Memahami karakteristik masyarakat 4.1 Mengidentifikasi karakteristik masyarakat	• Struktur masyarakat perkotaan dan pedesaan • Ciri masyarakat perkotaan dan pedesaan • Karakteristik masyarakat pertanian • Tingkat adopsi, inovasi, difusi masyarakat	**Mengamati** • Mencari informasi tentang struktur masyarakat perkotaan dan pedesaan **Menanya** • Diskusi ciri masyarakat kota dan pedasaan • Diskusi karakteristik masyarakat sasaran • Diskusi tingkat adopsi, inovasi dari masyarakat sasaran **Mengekspesikan/mengumpulkan data** Mencari tahu tentang tokoh/ opinion leader masyarakat sasaran **Mengasosiasikan** Menyimpulkan tokoh, peran masyarakat sasaran **Mengkomunikasikan** Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas	**Tugas** • Membuat paper tentang struktur masyarakat perkotaan dan pedesaan **Observasi** Ceklist lembar pengamatan diskusi **Portofolio** Laporan tertulis kegiatan diskusi kelompok sesuai topiknya **Tes** Menyelesaikan soal uraian dan atau pilihan ganda	4 x 2 jp
3.2 Memahami dasar-dasar penyuluhan	1. Sejarah, revitasilasasi penyuluhan pertanian	**Mengamati** • Mencari informasi tentang sejarah, revitalisasi, dan	**Tugas** • Membuat paper tentang	8 x 2 jp

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
pertanian 4.2 Mengaplikasikan dasar-dasar penyuluhan pertanian	2. Peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian 3. Perbedaan pendidikan, penyuluhan dan penerangan 4. UU No 16 th 2006 5. 16 karakteristik dan fungsi penyuluh 6. Organisasi, strategi dan tahapan membangun kelembagaan 7. Pembentukan dan pengembangan kelompok	peran penyuluhan pertanian **Menanya** • Diskusi tentang perbedaan pendidikan, penyuluhan, dan penerangan • organisasi, strategi dan tahapan membangun kelembagaan **Mengeksplorasi/ Eksperimen** • Mencoba menerapkan diri sebagai penyuluh **Mengasosiasi** Membuat atau membentuk dan mengembangkan kelompok **Mengkomunikasikan** Mengkomunikasikan UU No 16 tahun 2006	sejarah dan peran penyuluhan pertanian • Membuat paper tentang revitalisasi penyuluhan pertanian **Observasi** • Ceklist lembar pengamatan diskusi perbedaan penyuluhan, pendidikan, penerangan **Portofolio** • Laporan tertulis kegiatan desiminasi • Bahan persentasi tentang UU No 16 tahun 2006 **Tes** • Menyelesaikan soal uraian dan atau pilihan ganda	
3.3 Memahami teknik komunikasi efektif 4.3 Melakukan komunikasi	1. Prinsip dasar komunikasi 2. Unsur komunikasi 3. Jenis komunikasi 4. Teknik menyimak	**Membaca/mengamati** Mencari informasi dari berbagai sumber tentang komunikasi efektif **Menanya** Berdiskusi tentang	**Tugas** • Membuat paper prinsip dasar dan faktor yang berpe-ngaruh	8 x 2 jp

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
efektif	efektif 5. Melakukan komunikasi efektif	dasar, komponen, bentuk, teknik, penyajian, karakteristik komunikasi efektif **Mengeksplorasi/ Eksperimen** Mengamati proses komunikasi dari berbagai sumber **Mengasosiasi** Menyimpulkan hasil diskusi bagaimana komunikasi efektif **Mengkomunikasikan** Melakukan komunikasi efektif	terhadap proses komunikasi • Membuat ringkasan penjelasan dasar, komponen, bentuk, teknik, penyajian, karakteristik komunikasi efektif **Observasi** Ceklist lembar pengamatan kegiatan praktek komunikasi efektif **Portofolio** • Laporan diskusi tentang: pemilihan pesan, sasaran, bahan,alat, media, saluran komunikasi efektif • Catatan komuni-kasi efektif dari berbagai sumber • Bahan tayang komunikasi efektif **Tes** • Menyelesaikan soal uraian dan	

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
			atau pilihan ganda • Test praktek	
3.4 Memahami programa penyuluhan pertanian 4.4 Membuat programa penyuluhan pertanian	1. Pengertian, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, unsur, mekanisme, tahapan, format dan instrumen identifikasi potensi wilayah dalam penyusunan programa penyuluhan 2. Pengertian, tujuan, dan tahapan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian (RKTPP) 3. Penyusunan programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh	**Membaca/menyimak** • Membaca pengertian-pengertian, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan.programa penyuluhan • Menyimak unsur, mekanisme dalam penyusunan programa penyuluhan **Menanya** Berdiskusi tentang bahan dan alat pengumpulan data potensi wilayah **Mengeksplorasi/ Eksperimen** Mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyusunan programa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian **Mengasosiasi** Membedakan programa penyuluhan dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian **Mengkomunikasikan** Melaporkan hasil penyusunan programa penyuluhanpertanian.	Tugas ▪ Membuat paper tentang programa penyuluhan pertanian, ▪ Membuat ringkasan unsur, mekanisme, prinsip dalam perumusan tujuam Observasi • Ceklist lembar pengamatan diskusi Portofolio ▪ Instrumen identifikasi potensi wilayah ▪ Rekapitulasi data potensi wilayah ▪ Programa penyuluhan Tes Menyelesaikan soal uraian dan atau pilihan ganda	6 x 2 jp

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
3.5 Memahami pembuatan media penyuluhan pertanian 4.5 Membuat media penyuluhan pertanian	1. Arti, tujuan, ruang lingkup, jenis, dan karakteristik media penyuluhan pertanian 2. Berbagai media penyuluhan pertanian 3. Tahapan,dan model pemilihan media penyuluhan 4. Kaidah pembuatan, media penyuluhan 5. Penggunaan media penyuluhan	**Mengamati/membaca** Mencari informasi tentang arti, tujuan, ruang lingkup, jenis, karakteristik media penyuluhan pertanian **Menanya** Diskusi tentang tahapan, model pemilihan, kaidah pembuatan, media penyuluhan **Mengeksplorasi/ Eksperimen** • Merancang media penyu-luhan sesuai dengan materi yang dibutuhkan • Membuat berbagai media penyuluhan **Mengasosiasi** Menyimpulkan media yang cocok dalam penyuluhan pertanian **Mengkomunikasikan** Menggunakan media penyuluhan sesuai karakteristiknya	**Tugas** Membuat paper tentang arti, tujuan, ruang lingkup, jenis, karakteristik media penyuluhan pertanian **Observasi** Ceklist lembar pengamatan diskusi **Portofolio** • Hasil diskusi pemi-lihan, kaidah pembuatan, dan prosedur penggunaan media penyuluhan • Rerancangan media penyuluhan • Contoh hasil pembuatan berbagai media penyuluhan **Tes** • Menyelesaikan soal uraian dan atau pilihan ganda • Test praktek	6 X 2 jp
3.6 Memahami penggunaan metode penyuluhan	1. Berbagai metode penyuluhan pertanian	**Mengamati** Mengamati berbagai metode penyuluhan	**Tugas** Membuat paper tentang	6 x 2 jp

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu
pertanian 4.6 Melaksanakan simulasi penggunaan metode penyuluhan pertanian	2. Penerapan Metode penyuluhan pertanian	pertanian **Menanya** Mendiskusikan kelemahan dan kelebihan dari berbagai metode penyuluhan **Mengeksplorasi/ Eksperimen** • Menerapkan berbagai metode penyuluhan pertanian **Mengasosiasi** • Menyimpulkan keefektifan penggunaan metode penyuluhan **Mengkomunikasikan** Menyajikan hasil penerapan metode penyuluhan pertanian	metode penyuluhan **Observasi** Catatan dan cek list daftar pertanyaan. **Portofolio** • Metode penyuluhan yang akan diterapkan sesuai kajian **Tes** • Tes tertulis bentuk uraian dan/atau pilihan ganda. • Tes praktik.	

C. Petunjuk Penggunaan

Apabila Anda mempelajari buku Penyuluhan Pertanian 1 (dasar penyuluhan pertanian) ini, diharapkan untuk dipelajari dari kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3. Walaupun urutan kegiatan pembelajaran ini bukan merupakan urutan tahapan materi, namun akan lebih mudah jika sesuai dengan tahapan pemahaman dalam

penyiapan penyuluhan pertanian yang aplikatif, sehingga diharapkan Anda membaca dari halaman awal hingga halaman akhir dari buku ini.

D. Tujuan Akhir

Setelah selesai mempelajari buku teks bahan ajar siswa ini, Anda akan mampu:

1. Memahami karakteristik masyarakat;
2. Memahami dasar-dasar penyuluhan pertanian;
3. Memahami teknik komunikasi efektif;
4. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat;
5. Mengaplikasikan dasar-dasar penyuluhan pertanian;
6. Melakukan teknik komunikasi efektif

E. Kompetensi Isi Dan Kompetensi Dasar

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Meyakini anugerah Tuhan pada pembelajaran penyuluhan pertanian sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia.
2. Menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif	2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam mengumpulkan informasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar kelas/lahan 2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar
3. Memahami, menganalisis serta menerapkan pengetahuan **faktual, konseptual,** prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah	3.1 Memahami karakteristik masyarakat 3.2 Memahami dasar-dasar penyuluhan pertanian. 3.3 Memahami teknik komunikasi efektif 3.4 Memahami programa penyuluhan pertanian 3.5 Memahami pembuatan media penyuluhan pertanian. 3.6 Memahami penggunaan metode penyuluhan pertanian
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.	4.1 Mengidentifikasi karakteristik masyarakat 4.2 Mengaplikasikan dasar-dasar penyuluhan pertanian 4.3 Melakukan teknik komunikasi efektif 4.4 Membuat programa penyuluhan pertanian 4.5 Membuat media penyuluhan pertanian. 4.6 Melaksanakan simulasi penggunaan metode penyuluhan pertanian

F. Cek Kemampuan Awal

Berikan cek lis (√) pada kolom yang tersedia (telah memahami/belum memahami).

Jika Anda telah mamahami, maka cek lislah pada kolom telah memahami, dan begitu pula jika Anda belum memahami, maka cek lislah pada belum memahami.

No	Pernyataan	Telah memahami	Belum memahami
1	Memahami karakteristik masyarakat		
2	Memahami dasar-dasar penyuluhan pertanian		
3	Memahami teknik komunikasi efektif		
4	Mengidentifikasi karakteristik masyarakat		
5	Mengaplikasikan dasar-dasar penyuluhan pertanian		
6	Melakukan teknik komunikasi efektif		

Jika Anda menjawab sudah memahami, Anda dapat langsung mempelajari KD 2, Namun jika Anda menjawab belum memahami, Anda dipersilahkan untuk membaca uraian materi KD ini, kemudian Anda mengerjakan perintah lainnya.

II. PEMBELAJARAN

Kegiatan Pembelajaran 1. Karakteristik Masyarakat

A. Deskripsi

Memahami karakteristik masyarakat sasaran adalah hal yang penting untuk diketahui seorang penyuluh agar dalam menjalankan tugasnya kelak memahami struktur, ciri, karakter, tingkat adopsi inovasi, dan bagaimana menghadapi masyarakat binaannya.

B. Kegiatan Belajar

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mempelajari buku teks bahan ajar siswa Penyuluhan Pertanian 1 ini, Anda diharapkan mampu:

a. Memahami struktur masyarakat perkotaan dan pedesaan
b. Memahami ciri masyarakat perkotaan dan pedesaan
c. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat pertanian
d. Mengidentifikasi tingkat adopsi, inovasi materi penyuluhan terhadap masyarakat binaanya.

Kegiatan Siswa

Kepada para siswa diminta untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau dengan uraian pendekatan dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data/mencoba, mengasosiasikan/menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil kegiatannya.

No	Uraian Pendekatan	Kegiatan	waktu
1	Mengamati	• Siswa diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mencari informasi tentang struktur masyarakat perkotaan dan pedesaan, ciri masyarakat perkotaan dan pedesaan, karakteristik masyarakat pertanian, tingkat adopsi, inovasi, difusi masyarakat. • Siswa mengamati kehidupan masyarakat pedesaan. • Siswa mencari informasi dari sumber lain (buku, internet, dialog dengan orang lain yang pernah tinggal di perkotaan). • Kegiatan yang siswa lakukan diatas selalu dicatat sebagai sumber informasi berharga bagi siswa disamping buku yang telah dibaca.	2 jp dan terstruktur
	Menanya	• Bentuk kelompok dari kelas ini, yaitu masing-masing beranggotakan minimal 5 siswa dan maksimal 8 siswa. • Lakukan diskusi kelompok dari informasi yang telah diperoleh dalam buku ini maupun sumber lain (model diskusi bisa dengan brainstorming). • Topik yang dibahas dalam diskusi adalah: 1) ciri masyarakat kota dan pedasaan, 2) karakteristik masyarakat sasaran, 3) tingkat adopsi, inovasi dari masyarakat sasaran. • Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok.	2 jp
3	Mengekpresikan/ mengumpulkan data	• Lakukan pencarian data dari tokoh masyarakat/opinion leader ditempat tinggal Anda dengan malakukan dialog dengan para tokoh masyarakat/pamong desa kalian.	terstruktur

No	Uraian Pendekatan	Kegiatan	waktu
		• Catat semua masukan dialog Anda di atas.	
4	Mengasosiasi kan	Lakukan analisis dengan membandingkan hasil kerja Anda nomor 3 dengan bacaan yang ada pada buku ini, kemudian Anda simpulkan hasil kerja Anda melalui dengan uraian materi ini.	2 jam
5	Mengkomu nikasikan	Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dengan power point atau ditulis tangan point pentingnya.	2 jam

2. Uraian Materi

a. Struktur Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan

1) Struktur Masyarakat Pedesaan

Indonesia yang kita kenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari lebih kurang 13.667 buah pulau besar dan kecil yang tersebar dalam wilayah yang sedemikian luasnya, dan dipersatukan oleh laut dan selat yang sudah tentu berpengaruh terhadap kehidupan penduduk Indonesia pada umumnya. Wilayah yang luas itu terdapat kira-kira sekitar 50.000 buah desa yang sudah pasti pula mempunyai corak masing-masing,

Desa merupakan kesatuan hidup setempat yang dibentuk oleh kesatuan hidup yang lebih kecil yaitu kampung, merupakan suatu bentuk masyarakat hukum, mempunyai sebutan yang berbeda-beda bagi suku bangsa di Indonesia. Walaupun mempunyai sebutan yang berlainan, akan tetapi desa tersebut mempunyai ciri umum. Ciri umum dari desa yang ada di Indonesia ialah; 1) adanya wilayah dengan batas-batasnya

yang jelas; 2) ditempati oleh sekelompok masyarakat yang merupakan kesatuan; 3) bersifat homogen dengan adat istiadatnya; 4) sistem perekonomiannya, sistem kepercayaannya, dan 5) struktur sosialnya.

Masyarakat desa yang pada umumnya bersifat agraris, mengembangkan nilai-nilai sosial, tradisi, adat istiadat, dan mengembangkan kebiasaan yang khas serta berbeda-beda antara masyarakat desa yang satu dengan masyarakat desa lainnya. Gejala umum yang dapat ditemukan dimasyarakat desa adalah sebagai berikut:

a) Jumlah penduduk yang tidak sebanding lagi dengan luas lahan pertanian yang produktif, sehingga sering timbul persoalan yang menyangkut tataguna tanah, pengerjaan, dan pemilikan atas tanah tersebut.
b) Sifat kebergantungan antara warga masyarakat desa satu sama lain dalam kebiasaan menggunakan tenaga kerja yang relatif banyak dalam proses produksi pertanian, sehingga hasil produksi yang dapat dinikmati pemilik tanah menjadi berkurang.
c) Masyarakat desa pada umumnya menunjukkan tingkat perekonomian yang masih rendah, langkanya kesempatan dan lapangan kerja, menyebabkan kecenderungan urbanisasi.
d) Kurangnya tenaga kerja terampil merupakan gejala umum bagi masyarakat desa, sedangkan anggota masyarakat desa yang telah mengalami pendidikan menengah dan tinggi cenderung lebih menyenangi hidup di kota daripada harus kembali ke desa, karena memang keadaan desa yang belum memiliki daya tarik untuk tenaga terdidik.

Dilihat dari segi adat istiadat masyarakatnya, maupun tingkat perkembangan sosial ekonomi, serta kehidupan sosial budaya masyarakat desa itu akan menunjukkan perbedaan-perbedaan.

Apabila ditinjau dari segi tatacara dan adat istiadatnya, maka tiap desa mempunyai kekhususan masing-masing. Begitu juga jika ditinjau dari segi perkembangan sosial ekonomis serta kulturalnya, maka dapat dibedakan adanya desa yang masih sangat sedikit mempunyai hubungan dengan desa-desa atau daerah lainnya. Desa di pedalaman, desa tepian kota, desa di tepi pantai, dan desa-desa di perkotaan masing-masing memiliki tingkat perkembangan yang sangat berbeda satu sama lain. Sedangkan bila ditinjau dari segi mata pencaharian hidup penduduknya, maka desa-desa itu dapat dibedakan adanya desa nelayan, desa agraris, desa peladang, dan desa-desa yang mata pencaharian penduduknya sudah heterogen.

Ditinjau dari tingkat perkembangan dan tingkat pembangunan desa secara umum, maka dapat dibedakan adanya desa yang belum terjangkau oleh usaha pembangunan, dikarenakan penduduknya masih hidup secara sederhana, belum mengenal tulisan, serta letaknya yang sukar untuk dicapai dari luar. Desa-desa seperti itu masih terdapat di daerah pedalaman Irian, Kalimantan, dan Sulawesi.

2) Klasifikasi Desa

Ditinjau dari segi tingkat perkembangan dan tingkat pembangunannya desa di Indonesia, desa diklasifikasikan kedalam tingkatan pra desa, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada.

a) Pra Desa

Desa yang digolongkan ke dalam bentuk pra desa adalah wilayah setingkat desa yang penduduknya masih hidup sederhana, bermata pencaharian ladang yang berpindah-pindah, mendiami daerah pedalaman yang sangat luas, sehingga kehidupan penduduknya terasing dan sukar mendapat pengaruh dari luar.

Di Indonesia masih terdapat kelompok masyarakat suku bangsa yang belum mempunyai tempat tinggal yang tetap yang disebut desa, mereka hidup berpindah-pindah dan terutama dalam tingkat kehidupan sosial ekonomi masih sangat sederhana. Kelompok suku terasing, misalnya masyarakat Suku Sasak yang hidup di daerah pedalaman di perbatasan antara Jambi dan Palembang, masyarakat Suku Mentawai di daerah Sumatera Barat, suku-suku yang hidup di daerah pedalaman Kalimantan, Irian Jaya, dan di daerah lainnya di pedalaman pulau-pulau lainnya. Masyarakat suku terasing itu hidup berladang sehingga kegiatan untuk pembinaan desanya, sangat sulit untuk dilaksanakan secara berkesinambungan.

Usaha pemerintah dalam rangka membina masyarakat suku terasing itu antara lain melalui program pemukiman kembali (*resettlement*) yang merupakan tugas dan kewajiban khususnya Departemen Sosial atau Depsos.

b) Desa Swadaya

Apabila suatu masyarakat telah bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah yang disebut desa, serta telah mempunyai organisasi kehidupan yang berlandaskan ketentuan norma hukum, baik tertulis, maupun tidak tertulis, telah menunjukkan suatu pola dan tata cara kehidupan tertentu, serta telah masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan, maka desa tersebut diklasifikasikan ke dalam tingkatan desa swadaya.

Masyarakat warga desa swadaya telah memiliki kemauan dan hasrat untuk membangun. Prinsip kepentingan umum dan kehidupan gotong royong masih sangat menonjol. Walaupun masyarakat desa swadaya telah memiliki kemauan untuk membangun, akan tetapi karena prasarana serta sarana untuk membangun yang belum

memadai, maka masyarakat seringkali dihadapkan kepada masalah dan hambatan yang sukar untuk mereka atasi sendiri.

Ciri desa swadaya adalah bahwa masyarakat warganya masih mengikuti pola tradisi secara turun temurun, sehingga desa swadaya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai desa tradisional. Pada kehidupan masyarakat masih tampak dengan jelas adanya stratifikasi sosial, baik berdasarkan prinsip keturunan, maupun berdasarkan kekayaan, terutama berdasarkan pemilikan atas tanah. Dinamika sosial relatif masih rendah, kedudukan seseorang dinilai berdasarkan prinsip seperti tersebut diatas.

Kehidupan masyarakat warga desa swadaya masih banyak bergantung pada alam, sehingga tingkat produktivitas sangat rendah dan terbatas pada hasil produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan sehari-hari. Tingkat pengetahuan masyarakat dan keterampilan masih rendah. Tempat peribadatan dan balai desa masih sangat sederhana. Begitu pula administrasi desa belum teratur dan masih sederhana. Desa swadaya dapat dikatakan belum banyak mendapat pengaruh kehidupan kota, yang disebabkan karena arus komunikasi yang masih terbatas.

c) Desa Swakarya

Secara umum desa yang diklasifikasikan ke dalam desa swakarya sudah lebih baik pertumbuhannya daripada desa swadaya. Hasrat dan kemauan masyarakatnya untuk membangun sudah tinggi disertai dengan tersedianya prasarana dan sarana serta fasilitas yang cukup memadai. Perubahan akibat pembaharuan dalam kehidupan masyarakat sudah banyak terjadi. Perubahan cara berpikir masyarakat sudah mulai tampak sebagai akibat persaingan antara kondisi baru dengan kondisi lama. Mobilitas sosial juga sudah tinggi, baik frekuensinya, maupun jumlah anggota masyarakat yang

melakukannya. Kerja, jasa, dan keterampilan seseorang mendapat penghargaan dari masyarakatnya.

Hubungan dengan pasar sudah dapat dilakukan, kendaraan bermotor sudah merupakan hal yang biasa. Walaupun mata pencaharian utama masih dalam bidang usaha pertanian, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat telah tumbuh aktivitas berorientasi pasar. Teknik baru sudah banyak dan mulai diintroduksikan, sehingga produktivitas mulai meningkat dan mendorong untuk dipasarkan.

Perkreditan dan perdagangan sudah mulai berkembang, Komunikasi melalui pos, surat kabar, dan radio sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Sarana transportasi sudah berkembang, sehingga komunikasi dengan kota sudah lancar. Demikian juga pengaruh kehidupan kota sudah lancar. Pengaruh kehidupan kota dan kehidupan modern sudah banyak masuk desa.

d) Desa Swasembada

Desa swasembada dapat dianggap sebagai desa yang sudah mulai *take off* atau tinggal landas. Masyarakat sudah mulai mampu memanfaatkan pembaharuan-pembaharuan. Kehidupan gotong royong telah benar-benar dimanifestasikan secara efektif di dalam usaha pembangunan.

Hubungan dengan pasar regional dan nasional, serta pusat perdagangan sudah lancar, demikian juga hubungan dengan kota sudah semakin intensif ditunjang kemudahan dan tersedianya sarana transportasi yang semakin berkembang.

Listrik sudah mulai banyak digunakan sebagai pembangkit tenaga dalam meningkatkan produksi, dan demikian juga fasilitas perkreditanpun sudah mulai baik. Kegiatan lainnya seperti

perdagangan, perkreditan, bengkel, prosesing produksi, dan pabrik dapat dikatakan sudah sangat maju dan meningkat.

Perkembangan perekonomian desa telah mengarah kepada kegiatan ekonomi regional dan nasional serta hasil produksipun dimaksudkan untuk dipasarankan.

Desa swasembada minimal telah memiliki faktor strategi sebagai berikut:

- Pemasaran hasil produksi mulai berkembang.
- Teknologi selalu berubah dan berkembang
- Penyediaan bahan baku dengan peralatan berkesinambungan.
- Fasilitas kredit sudah efektif dan kecenderungan untuk pengumpulan permodalan.
- Transportasi dan komunikasi sudah lancar.
- Keterampilan masyarakat telah meningkat.
- Administrasi desa serta lembaga-lembaga lainnya sudah teratur dan efektif.

Desa swasembada ini akan menuju ke tingkat perkembangan yang optimal. Kemungkinan dari desa swasembada akan menjelma menjadi kota kecil yang merupakan pusat perdagangan dan pusat berbagai fasilitas. Juga akan menjelma menjadi kota-kota kecil yang merupakan pusat perdagangan dan pusat berbagai fasilitas, serta akan membawa serta kemajuan-kemajuan bagi desa yang ada di sekitarnya. Apabila telah mencapai tingkatan yang optimal seperti yang diharapkan, maka desa swasembada kemungkinan meningkat kepada bentuk desa yang masyarakat dan warganya memiliki kehidupan sejahtera, adil dan makmur serta dinamis, yaitu Desa Pancasila.

Tingkatan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan menunjukkan perkembangan suatu desa, dan merupakan dasar dalam menentukan tingkatan desa di Indonesia. Masing-masing tingkat desa menunjukkan adanya perbedaan mengenai tingkat perkembangan pembangunan serta kemampuan masyarakat warganya masing-masing untuk menuju ke tingkat kehidupan yang lebih maju dan sejahtera.

Selanjutnya apabila ditinjau dari kehidupan sosial budaya, masyarakat Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu masyarakat yang cenderung masih berorientasi kepada pola kehidupan tradisional dan masyarakat yang berorientasi kepada pola kehidupan yang modern. Apabila dihubungkan dengan pola tempat tinggal seperti tersebut di atas, maka masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa. Adapun masyarakat yang berorientasi pada kehidupan modern merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di kota.

Masyarakat desa dengan ciri kehidupan yang tradisional dan masyarakat kota dengan ciri kehidupan modern tidak menunjukkan perbedaan gradual (tingkatan), melainkan menunjukkan sifat dan ciri umum. Tidak juga dimaksudkan untuk memperlihatkan ciri individual orang desa dan orang kota, sebab kemungkinan didapatkan orang desa yang pola berpikir dan hidupnya sudah memperlihatkan pola berpikir modern, dan sebaliknya masih banyak orang kota yang baik dalam pola berpikir, maupun dalam kehidupannya menunjukkan ciri-ciri kehidupan tradisional.

Ciri umum yang dimaksudkan di atas bagi masyarakat desa maupun masyarakat kota tidaklah mutlak. Apalagi disadari bahwa kehidupan sosial budaya secara keseluruhan tidak bersifat statis, melainkan

senantiasa berubah dan berkembang. Kehidupan kota sekarang ini telah banyak masuk dan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat desa.

b. Ciri-ciri Masyarakat Desa dan Kota

1) Ciri Masyarakat Desa

Secara umum ciri masyarakat desa adalah kehidupannya yang tradisional. Adapun rincian dari ciri umum yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a) Sangat erat hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah

Tanah merupakan sumber kehidupan pokok bagi masyarakat desa, sehingga bagaimanapun sempitnya tanah dan rendahnya tingkat kesuburan tanah tersebut, pemiliknya akan berusaha mempertahankan dan mempertaruhkan segala-galanya untuk tetap memilikinya, serta secara terus menerus untuk mengolah dan mengusahakannya. Kedudukan sosial setiap warga desa sedikit banyaknya masih ditentukan berdasarkan luas tidaknya pemilikan atas tanah.

Selain menyangkut keseluruhan kehidupan pemilik tanah dan keluarganya, juga tanah menyangkut kehidupan keluarga lainnya dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini karena masalah tanah dapat dikatakan merupakan masalah "kemanusiaan" atau masalah sosial bagi masyarakat desa.

Tanah bagi masyarakat desa memiliki nilai-nilai, bukan saja nilai ekonomis, melainkan juga nilai sosial budaya yang tinggi, serta nilai spiritual.

b) Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius

Pada umumnya masyarakat desa belum mengenal atau memiliki teknologi modern, sehingga mereka tidak mudah menyelesaikan masalah yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara teknis eksperimental, melainkan masalah tersebut dihadapinya secara *magis religius*. Masyarakat percaya bahwa alam semesta itu selain memberikan dan menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan, juga berpengaruh terhadap kehidupan, dan terhadap nasib manusia.

Masyarakat bersikap rendah hati terhadap alam semesta, dan memohon kepada alam semesta agar dapat membentuk keberhasilan usaha manusia di dalam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Di samping itu masyarakat seringkali menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memaksa alam memberikan apa yang dikehendakinya, misalnya dengan kekuatan mantra, kekuatan magis, serta tindakan ritual lainnya. Upacara-upacara yang sering dilakukan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kesuburan, menambah, mendapatkan, dan meningkatkan hasil, mengendalikan hama penyakit tanaman, merupakan manifestasi dari kehidupan magis religius dalam kehidupan masyarakat desa.

c) Kehidupan gotong royong

Baik untuk mengatasi tantangan alam seperti tersebut di atas, maupun untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan perseorangan dan masyarakat, biasanya diadakan tukar menukar tenaga dan jasa, atau diadakan pelaksanaan pekerjaan secara bersama-sama. Adanya tatakerja yang demikian ini biasa disebut dengan gotong royong, terjadilah kebergantungan satu sama lain. Saling kebergantungan dalam kehidupan masyarakat desa itu melahirkan disiplin sosial

yang kuat yang biasanya dirumuskan dalam bentuk tradisi, adat kebiasaan, adat istiadat yang sangat dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap kehidupan yang telah terpolakan itu, bukan saja akan berakibat buruk bagi si pelanggar, melainkan juga akan berakibat buruk terhadap seluruh anggota masyarakat.

d) Memegang tradisi dengan kuat

Tradisi sebagai milik masyarakat dan dianggap sebagai warisan nenek moyang harus dipelihara, dipertahankan, dan lebih-lebih harus dilaksanakan. Tradisi ini juga merupakan norma masyarakat yang harus dijunjung tinggi, dan dijadikan pedoman hidup baik oleh individu warga masyarakat, maupun oleh masyarakat secara keseluruhan.

Setiap pelanggaran dianggap akan membawa akibat yang dapat merugikan bagi seluruh kehidupan masyarakat, baik menyangkut bidang materiil, maupun bidang spiritual yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan kehidupan sosial masyarakat.

e) Menghormati para *pini sepuh*

Kedudukan orang tua dan para *pini sepuh* dalam masyarakat desa sangatlah penting. Setiap pendapat dan keputusannya dihormati dan dilaksanakan. Kepentingan anggota masyarakat perseorangan maupun kepentingan yang menyangkut kehidupan seluruh masyarakat. Para orang tua atau para *pini sepuh* senantiasa dimintai saran dan pendapatnya, maka para *pini sepuh* merupakan tempat bertanya sebelum melaksanakan pekerjaan penting yang berkaitan dengan kepentingan anggota masyarakat, maupun kepentingan yang berhubungan dengan seluruh kehidupan masyarakat.

f) Kepercayaan kepada pimpinan lokal dan tradisional

Selain menghormati para *pini sepuh*, masyarakat desa meletakkan kepercayaan yang sangat besar kepada pimpinan, baik dalam bidang pemerintahan, maupun dalam bidang keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Pola kepemimpinan masyarakat desa yang bersifat kekeluargaan, menyebabkan masyarakat mengetahui dengan pasti sifat-sifat pimpinan. Sorotannya diletakkan bukan pada kecakapannya saja, melainkan lebih dititikberatkan kepada pertimbangan apakah pimpinan tersebut dapat memberikan bimbingan dan membawa masyarakat ke arah keseimbangan hidup materiil dan spiritual, juga apakah pimpinan tersebut dapat dipecaya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup bersama. Kepercayaan masyarakat desa kepada pimpinan sedemikian besarnya, sehingga baik buruknya kehidupan masyarakat bergantung pada pimpinan.

g) Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis

Kepercayaan masyarakat desa terhadap pimpinan sangatlah besar, sehingga segala keputusan pimpinan dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Begitu pula kemajuan dari masyarakat desa lebih banyak bergantung pada pribadi pimpinan. Pengawasan sosial terhadap pimpinan hampir tidak pernah dilaksanakan. Segala sesuatu didasarkan atas pertimbangan emosional yang tidak rasional, yaitu kepercayaan. Pandangan masyarakat yang demikian itu mempunyai dampak terhadap organisasi kemasyarakatan dan terhadap cara penyelesaian seluruh segi kehidupan yang menyebabkan tidak mendorong ke arah kemajuan. Masyarakat menerima dengan penuh kepercayaan, emosional dan subyektif, sehingga masyarakat bersifat pasif, tidak ada inisiatif. Hal ini menyebabkan organisasi

kemasyarakatan akan mengalami kemajuan yang sangat lambat, bahkan mungkin tetap statis.

h) Tingginya nilai sosial

Pada masyarakat desa, kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Anggapan yang tinggi terhadap nilai gotong royong, serta kepercayaan yang besar terhadap unsur pimpinan, menyebabkan hubungan yang bersifat intim dan kekeluargaan. Hal ini menyebabkan hidupnya anggapan dan penilaian yang tinggi terhadap tradisi yang sudah berakar dalam kehidupan dan sudah menjadi pedoman hidup masyarakat yang terpolakan, perlu dipelihara, dipertahankan, dan dilaksanakan.

Melaksanakan tradisi dalam kehidupan sehari-hari, berarti masyarakat telah bersikap dan bertindak menghormati nenek moyang yang telah mewariskan nilai-nilai sosial budaya yang mampu mengatur tatanan kehidupan masyarakat, dengan demikian nilai sosial budaya yang telah terpolakan itu mempunyai nilai luhur dalam pandangan masyarakat desa, karena di dalamnya terkandung segala sesuatu yang paling berguna dalam hidup.

2) Ciri Masyarakat Kota

Berbeda dengan masyarakat desa yang bersifat agraris, maka masyarakat kota tidak salah kalau dikatakan bersifat industrial. Secara terperinci ciri masyarakat kota menunjukkan ciri dan bentuk masyarakat modern adalah sebagai berikut:

a) Kota pada umumnya tidak bersifat agraris

Sebagian besar penduduk kota tidak bergantung kepada sektor pertanian, oleh karena itu kota menjadi pusat berbagai kehidupan, seperti pertukangan, perdagangan, industri, dan juga sebagai pemerintahan. Kota merupakan pusat-pusat berbagai sektor

kehidupan, menyebabkan kota merupakan tempat pemusatan penduduk, demikian juga kota sebagai pusat industri. Kehidupan industri akan menyebabkan pola pembagian kerja dan lebih jauh akan menyebabkan timbulnya pelapisan sosial, yaitu penilaian tinggi rendahnya seseorang oleh golongan lain tampak lebih kuat berkembang di kota. Di kota perbedaan golongan tersebut tampak dengan jelas, ada masyarakat elite, menengah, dan bawah. Hal ini akan menentukan pola dan sifat relasi antara orang dan sekelompok orang di kota.

b) Tempo hidup di kota lebih cepat

Tempo hidup di kota disesuaikan dengan jalannya mesin produksi dan kepadatan lalu lintas, sehingga apabila perlu digunakan alat-alat perlengkapan buatan. Bekerja tidak perlu menurut ketentuan alam, cuaca baik atau buruk, siang, malam tidaklah merupakan faktor yang berpengaruh. Waktu bagi orang kota adalah uang, dan tidak lagi dikenal biar lambat asal selamat.

c) Sifat individualistis

Kehidupan masyarakat kota sifat individualistismya sangat menonjol. Sikap dan tindakan masyarakat tidak banyak bergantung pada individu-individu. Sikap, tindakan, dan pandangan "tidak perlu mencampuri urusan orang lain" juga merupakan ciri masyarakat kota yang cukup menonjol. Hal ini menyebabkan masyarakat kota kurang saling mengenal satu sama lainnya dengan intim, sehingga seringkali orang yang hidup berdekatan rumah atau bertetangga tidak saling mengenal. Orang di kota tidak ambil pusing terhadap tingkah laku dan kelakuan orang lain dengan berlandaskan prinsip asal tidak saling mengganggu.

d) Hubungan yang bersifat *business like* (perhitungan bisnis)

Hubungan yang bersifat formal di antara warga masyarakat kota merupakan ciri yang tampak menonjol. Hubungan yang bersifat kekeluargaan telah banyak berubah ke arah hubungan yang berdasarkan perhitungan untung rugi. Orang kota lebih banyak menekankan pada aspek adanya keuntungan pribadi. Perhitungan ekonomis merupakan landasan dalam segala tindakan dalam kehidupan masyarakat kota.

e) Kehidupan yang bersifat sekuler

Sikap sekuler ini menunjukkan kecenderungan semakin berkurangnya memperhatikan nilai dan norma keagamaan. Sikap sekuler ini adalah sikap dan pandangan untuk memisahkan sesuatu yang sakral, yaitu memisahkan yang suci dan yang tidak suci, serta kecenderungan untuk lebih mementingkan yang tidak suci. Kehidupan keagamaan di kota lebih banyak merupakan masalah pribadi, dirasakan sebagai persoalan individual, dimana orang lain tidak perlu turut campur, sepanjang kepercayaan itu dilakukan dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Hubungan yang bersifat intim di kota cenderung berkurang, sehingga hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok berubah ke arah hubungan yang bersifat formal dan *business like*. Pengawasan sosial menjadi longgar tidak sekuat lagi seperti halnya di desa, yang antara lain disebabkan oleh berkurangnya sifat hubungan intim tersebut. Hal ini menyebabkan tingkah laku orang dan kelakuan orang lebih bebas di kota, sehingga kemungkinan hidup di kota lebih memberikan kebebasan yang luas kepada individu.

f) Fungsi sosial keluarga cenderung bergeser

Orang di kota menghendaki pendekatan yang rasional, obyektif, kalkulatif, ekonomis, dimana faktor individu seperti telah disebutkan di atas memegang peranan yang penting. Gaya hidup di kota memerlukan pengeluaran yang tidak seimbang dengan penghasilan dan kebutuhan. Untuk mengurangi beban tanggungan hidup dan biaya pendidikan anak, maka dipandang tidak perlu membentuk keluarga besar.

Kadang orang tua, yakni suami dan istri keduanya sama-sama mencari nafkah. Hal ini akan berakibat bergesernya fungsi sosial keluarga, dimana ibu yang seharusnya mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, berubah menjadi pencari nafkah pula. Keadaan demikian menyebabkan fungsi sosial edukatif dalam keluarga cenderung berubah dan dengan demikian akan mempunyai dampak terhadap proses sosialisasi anak.

Di kota pendidikan sistematis dan spesialistis, menyebabkan fungsi sosial keluarga khususnya fungsi edukatif diserahkan kepada lembaga-lembaga formal atau kepada orang lain di luar keluarga. Orang tua tidak lagi dapat memusatkan perhatian sepenuhnya terhadap anak dan keluarga. Hal ini disebabkan kehidupan di kota memaksa orang kehilangan atau tersita waktunya oleh kesibukan mencari nafkah.

g) Bersifat mudah menerima pembaharuan dan perubahan

Adanya sifat mudah menerima pembaharuan dari masyarakat kota, menyebabkan kemajuan yang dicapai masyarakat kota relatif mudah dan cepat. Perubahan di mana pun terjadi akan menyebabkan pergeseran nilai dan pertentangan antara nilai lama dengan nilai-nilai baru. Perubahan yang terlampau cepat di kota kadang menyebabkan timbulnya krisis dalam kehidupan kota, sehingga

banyak diantara anggota masyarakat yang kehilangan arah dan kepastiannya.

Orang banyak dihadapkan kepada masalah sosial dan masalah hidup yang tidak dapat diatasinya sendiri, karena kondisi kehidupan di kota memungkinkan terjadinya masalah sosial tersebut. Masalah sosial seperti kenakalan remaja, masalah sex dan kejahatan sex, seperti perkosaan, kriminalitas, merupakan kejadian yang sudah biasa terjadi di kota. Perbedaan nilai dan pandangan antara orang tua dengan orang muda menyebabkan krisis dalam kehidupan keluarga di kota.

Orang muda mengikuti jalannya sendiri dan menggunakan ukurannya sendiri yang sering berbeda dengan ukuran-ukuran, pandangan orang tua, sehingga menimbulkan perbedaan paham di dalam segala hal. Orang tua tidak dapat mengerti orang muda, dan demikian juga sebaliknya.

Di kota tampaknya jumlah tindakan kejahatan, jumlah orang yang sakit jiwa, pengedaran dan penggunaan obat bius, narkotika lebih banyak terjadi di kota-kota. Selain itu perbedaan tingkat kehidupan sosial ekonomi sangat menonjol, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin menjadi lebih besar dan kelihatan nyata.

h) Kota merupakan pusat pemusatan penduduk

Kota menjadi tempat pemusatan penduduk, karena kota merupakan daya tarik sehingga banyak orang berdatangan yang berasal dari berbagai daerah, suku-suku bangsa, berbagai golongan penduduk yang kemudian menetap di kota. Penduduk kota terdiri dari bermacam tingkat sosial, serta dari berbagai suku bangsa yang berlatar belakang adat istiadat, kebiasaan, memiliki nilai-nilai

kultural masing-masing, dan tidak jarang menunjukkan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda.

Pada masyarakat kota seseorang akan dihadapkan kepada berbagai jenis orang yang berbeda pola berpikir dan bertindaknya. Misalnya orang Palembang seringkali tidak hanya berhadapan dengan orang Palembang, melainkan dengan orang-orang dari suku lain. Keadaan demikian orang seringkali tidak dapat mempertahankan pola berpikir dan cara bertindak yang merupakan tradisi suku bangsanya, tetapi juga tidak bisa mengikuti pola berpikir dan cara bertindak dari orang yang memiliki tradisi yang berbeda yang sedang dihadapinya. Perbedaan dan pertentangan dalam berbagai kepentingan menyebabkan di kota memiliki frekuensi yang lebih tinggi mengenai terjadinya konflik sosial, yaitu perbedaan pandapat dan perbedaan pandangan, dalam kehidupan masyarakat kota.

i) Perkembangan kehidupan politik dan sumber dari berbagai pikiran baru

Kehidupan politik lebih intensif dilakukan di kota. Begitu juga keputusan-keputusan penting dalam lapangan politik kebanyakan juga dilakukan di kota. Kota pada dasarnya menjadi sumber dari berbagai pikiran baru baik karena sarana dan fasilitas komunikasi, maupun karena interaksi antara warga masyarakat kota dan interaksi dengan dunia luar berlangsung lebih cepat dan intensif.

Baik kota, maupun desa merupakan bentuk masyarakat hukum, yaitu himpunan kelompok manusia yang hidup bersama memiliki harta benda sendiri, organisasi, tata tertib dan susunan tertentu ke dalam, sedangkan ke luar merupakan satu kesatuan, bukan hanya diikat oleh kebersamaan tempat tinggal, tetapi juga diikat oleh kesatuan bahasa, dan kesatuan tujuan dalam menjamin kepentingan individual dan kepentingan bersama.

c. Karakteristik Masyarakat Tani

1) Petani dan Mentalitasnya

Sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah petani, maka tidak mengherankan bahwa pola berpikir yang paling asli itu adalah seperti pola berpikir petani. Sistem ekonomi dalam masyarakat petani itu berdasarkan pertanian (bercocok tanam, peternakan, atau perikanan) yang menghasilkan pangan dengan teknologi yang sederhana dan dengan kesatuan produksi yang tidak berspesialisasi. Adapun watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan itu, menurut para ahli dari abad ke 19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau *wesenwille* dalam pergaulan (Tonnies, 1887 *di dalam* Sayogyo, 2002), sedangkan menurut ahli seperti Boeke, orang petani tidak suka bekerja, bersifat statis, tidak mempunyai inisiatif, dan hanya suka membebek saja kepada orang-orang berpangkat tinggi dari kota.

Pada masa sekarang, para ahli sosiologi telah memulai meninggalkan konsepsi bahwa masyarakat petani di daerah pedesaan itu merupakan suatu tipe masyarakat dengan sejumlah ciri-ciri pokok yang tertentu. Mereka sudah sadar bahwa struktur masyarakat dan sistem ekonomi desa itu tidak seragam menurut suatu tipe ideal yang tertentu. Bayangan orang kota mengenal masyarakat desa yang tenang tenteram, rela, rukun dan berjiwa gotong royong, sering tidak cocok dengan kenyataan. Mungkin satu abad yang lalu, kontras antara masyarakat pedesaan dan masyarakat kota itu masih amat menonjol. Tetapi dalam jangka waktu itu masyarakat pedesaan tidak tinggal statis, sehingga banyak unsur masyarakat kota masuk ke daerah pedesaan. Banyak orang desa yang berurbanisasi membawa ciri-ciri dan terutama mentalitas pedesaan ke kota. Maka dari itu, pada masa sekarang menjadi amat sukar untuk membedakan antara masyarakat pedesaan

dan masyarakat kota, kecuali hanya dalam hal-hal seperti jumlah penduduk, heterogenitas penduduk, dan tingkat teknologi modern.

Timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya ciri-ciri nilai budaya dalam mentalitas petani di Indonesia? Cara berpikir dan mentalitas masyarakat petani di Indonesia itu telah sejak lama menjadi perhatian para ahli. Semuanya tertarik akan masalah itu, karena ingin memahami cara berpikir yang merupakan latar belakang dari hukum adat Indonesia, yang tampaknya amat berbeda dengan hukum orang Eropa. Analisa mereka, semua ahli tersebut bicara tentang adanya suatu sifat *religiomagis* yang menghinggapi pola berpikir rakyat petani di daerah pedesaan di Indonesia itu.

Harus diperhatikan bahwa para petani di desa itu tidak selalu berbuat seaneh seperti apa yang dilukiskan selalu berhubungan dengan *eligiomagis*, tetapi dapat juga berbuat berdasarkan pola berpikir yang rasional, dengan logika yang berdasarkan akal sehat. Hanya hal yang harus diperhatikan adalah sistem nilai budaya, mempengaruhi baik sikap maupun pola-pola tindakan mereka. Untuk mengerti pola-pola tindakan orang tani, kita harus menyelami sistem nilai budaya.

Sudah tentu sistem nilai budaya dari semua rakyat petani di beberapa daerah di Indonesia tidak sama, tentu ada variasi antara sistem nilai budaya dari orang petani di Aceh, di tanah Batak, di tanah Minangkabau, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Kalimantan, di Makassar, di Timor atau bahkan di Irian Jaya. Walaupun demikian, berdasarkan apa yang kita ketahui semua berdasarkan pengalaman kita mengenai kehidupan masyarakat pedesaan, kita bisa mencoba menyusun suatu perkiraan berdasarkan kesan mengenai sistem nilai budaya petani di Indonesia.

Petani di Indonesia bekerja untuk hidup, kadang-kadang kalau mungkin untuk mencapai kedudukan. Ia hanya mempunyai perhatian untuk hari

sekarang ini, bagaimana keadaan hari kemudian, ia tidak perduli. Ia terlampau miskin untuk dapat memikirkan hal itu, hanya kadang-kadang ia rindu akan masa yang lampau, yang menurut dongeng-dongeng orang tua merupakan suatu masa kejayaan. Pada umumnya alam tidak mengerikan baginya. Kalau kadang-kadang ada bencana alam berupa gunung meletus atau air bah besar, ia hanya menerimanya sebagai suatu nasib yang kebetulan buruk saja.

Adapun hama yang merusak tanamannya, tidak ditakutinya; ia tahu cara mengatasi bencana serupa itu, dan kalau sekali ia tak dapat mengalahkan hama, ia toh tidak mati kelaparan, karena sistem bantu membantu dalam masyarakat memberikan kepadanya suatu perasaan aman yang cukup besar. Asal ia dapat menyelaraskan diri saja dengan alam sekitarnya, maka amanlah hidupnya. Itulah sebabnya ia harus menghadapi sesamanya dengan jiwa gotong royong, terutama ia harus sadar bahwa dalam hidupnya itu ia pada hakikatnya bergantung kepada sesamanya; maka dari itulah ia harus selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya.

2) Petani dan Kelembagaannya

Berdasarkan data Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) meningkat 2,2 % per tahun dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta pada tahun 2003. Sementara itu, petani gurem meningkat 2,6 % per tahun dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Prosentase RTP gurem dibanding RTP pengguna lahan naik dari 52,7 % pada tahun 1993 menjadi 56,5 % pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kemiskinan petani meningkat selama dekade 1993-2003.

Kondisi petani seperti ini, maka semua program pembangunan pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah, dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, serta modal yang disalurkan oleh

lembaga keuangan hampir dipastikan tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Upaya pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian harus selalu ditingkatkan.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih baik secara berkelanjutan.

Pemberdayaan petani dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti di atas tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan individu, karena jumlah dan sebaran petani sangat besar dan luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan. Penyuluhan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini mendorong petani untuk membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergi antar petani, baik dalam proses belajar, kerjasama maupun sebagai unit usaha yang merupakan bagian dari usaha taninya. Sampai saat ini jumlah kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1.365 asosiasi tani, 10.527 koperasi tani, dan 272 P4S/Pusat Pelatihan Pengembangan Petani Swadaya.

Kelembagaan petani ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus diarahkan untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana produksi.

3) Perubahan Sosial Masyarakat Tani dan Pedesaan

a) Konflik dan Persaingan

Ciri-ciri yang sering dihubungkan dengan masyarakat pedesaan itu memang ada dalam desa di Indonesia. Orang kota suka membayangkan masyarakat desa itu sebagai tempat orang bergaul dengan rukun, tenang dan selaras. Kecuali pertengkaran yang terjadi di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang membesar dan melebar. Sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan di Indonesia adalah berkisar hal tanah, masalah kedudukan dan gengsi, hal perkawinan, hal perbedaan antar kaum tua dan kaum muda dan hal perbedaan antara pria dan wanita.

Para Ahli Antropologi yang biasa meneliti masyarakat kecil memang telah banyak mengumpulkan bahan tentang pertengkaran dalam masyarakat yang mereka teliti. Tidak hanya mengenai pertengkaran (atau konflik), tetapi juga mengenai pertentangan (kontroversi) dan persaingan (kompetisi). Misalnya pandangan yang berdasarkan konsep perubahan kebudayaan dan psikologi atau dalam hubungan tentang guna-guna dan ilmu dukun.

b) Kegiatan Bekerja

Masyarakat desa di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu bentuk masyarakat yang ekonomis, terbelakang dan yang harus dikembangkan dengan berbagai cara. Hal itu mengadakan sistem perangsang yang akan menarik aktivitas warga desa adalah amat perlu. Orang desa tidak perlu ditarik atau didorong untuk bekerja keras. Hanya cara dan irama bekerja itu harus diubah dan disesuaikan dengan cara dan irama yang harus dipelihara dengan disiplin. Ini agar tenaga yang dikeluarkan dapat seirama dengan jalannya mesin yang memberi hasil seefektif mungkin. Walaupun

orang desa itu dapat dan biasa bekerja keras, tetapi kalau ia harus bekerja dalam sistem produksi modern, ia harus banyak mengubah adat dan kebiasaan bekerjanya.

c) Sistem Tolong Menolong

Aktivitas tolong menolong itu hidup dalam berbagai macam bentuk masyarakat desa di Indonesia. Kecuali dalam pekerjaan pertanian, aktivitas tolong menolong itu tampak dalam banyak lapangan kehidupan masyarakat yang lain, misalnya dalam aktivitas kehidupan sekitar rumah tangga, dalam menyiapkan dan melaksanakan pesta dan upacara, di dalam hal kecelakaan dan kematian.

Pada praktik akan kita lihat bahwa menurut ketentuan adat, satu tahap pekerjaan dilakukan dengan satu tipe tolong menolong. Lain tahap dengan lain tipe lagi, atau satu tahap pekerjaan dengan sistem tolong menolong. Lain tahap bahkan tanpa sistem tolong menolong, tetapi dengan tambahan tenaga buruh bayaran. Terlepas dari hal-hal tersebut di atas masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan mengenai hal tolong menolong ini. Terutama untuk keperluan analisis sosial, ialah bahwa orang sesama warga desa yang bertolong menolong itu biasanya berbeda-beda, baik mengenai berbagai lapangan aktivitas sosial maupun mengenai tipe tolong menolong.

d) Gotong Royong

Di samping adat istiadat tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kekerabatan atau hubungan lain yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis. Ada pula aktivitas bekerja sama yang lain yang secara populer biasanya juga disebut gotong royong. Hal itu adalah aktivitas bekerjasama antara sejumlah

besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum.

Di dalam mengajukan proyek yang membutuhkan tenaga bersama dari sebagian besar warga desa, pihak atasan atau siapa saja yang mengajukan proyek itu, harus dapat meyakinkan warga desa akan kegunaan dari proyek tersebut bagi masyarakatnya. Juga sekaligus merasakan bahwa proyek itu seolah sebagai proyeknya sendiri, sedemikian rupa sehingga perasaan paksaan itu akan hilang, Demikian pula orang desa akan bekerja dengan rela dan bersemangat.

Sistem tolong menolong itu merupakan suatu teknik pengerahan tenaga mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau spesialisasi khusus. Atau mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan diferensiasi tenaga dimana semua orang dapat mengerjakan semua tahap dalam penyelesaiannya. Perusahaan yang modern, dengan suatu diferensiasi dan spesialisasi yang kompleks, dengan suatu organisasi yang luas, sistem tolong menolong tidak akan memberi hasil yang efektif. Aktivitas tolong menolong sebagai suatu cara bekerjasama dalam kelompok primer, dengan jiwa gotong royong yang ada dalam suatu masyarakat sebagai keseluruhan, adalah dua hal yang tidak sama dan tidak harus dipisahkan satu dari yang lain. Pada organisasi modern yang kompleks, sistem tolong menolong mungkin tidak akan efektif lagi, tetapi jiwa gotong royong tetap harus dipelihara.

Jiwa atau semangat gotong royong itu dapat kita artikan sebagai peranan rela terhadap sesama warga masyarakat. Pada masyarakat serupa itu misalnya, kebutuhan umum akan dinilai lebih tinggi dari kebutuhan individu, bekerja bakti untuk umum adalah suatu hal yang terpuji. Sistem hukum hak individu tidak diutamakan secara

tajam dan sebagainya. Sistem pengerahan tenaga secara tolong menolong, terikat kepada struktur kelompok primer dalam masyarakat. Tetapi jiwa gotong royong dan jiwa berbakti merupakan ciri watak atau kepribadian dari banyak bangsa di dunia dan tidak terikat kepada kelompok primer itu.

e) Musyawarah dan Jiwa Musyawarah

Musyawarah adalah satu gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya di Indonesia. Artinya, bahwa keputusan yang diambil dalam rapat tidak berdasarkan mayoritas. Hal ini berarti bahwa baik pihak mayoritas maupun pihak minoritas mengurangi pendirian mereka masing-masing, sehingga dapat mendekati. Unsur ini rupanya sudah ada sejak berabad-abad lamanya dalam masyarakat pedesaan di Indonesia, akan tetapi pengupasan secara ilmiah baru dibuat untuk pertama kalinya oleh para ahli hukum adat.

Hal ini agaknya musyawarah itu dibicarakan terutama sebagai suatu cara melakukan rapat, tetapi dalam hal pranata sosial tersebut sebaiknya membedakan antara dua hal, ialah musyawarah sebagai suatu cara melakukan rapat dan musyawarah sebagai suatu semangat untuk menjiwai seluruh kebudayaan dari masyarakat.

Sebuah masyarakat yang berjiwa gotong-royong, ide musyawarah itu biasanya dilaksanakan dalam hal memecahkan masalah-masalah kecil atau pun besar. Tampak dalam prinsip dari hukum adat yang lebih bersifat mendamaikan semua pihak daripada mengalahkan atau menenangkan satu pihak.

d. Tingkat Adopsi Inovasi Diffusi Penyuluhan Pertanian

1) Pengertian Adopsi Inovasi

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) **adopsi** adalah proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Menurut Feder dkk (1981), adopsi didefenisikan sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Di lain pihak Samsudin (1994) menyatakan bahwa adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari suatu pihak, disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat sebagai pihak kedua.

Selanjutnya menurut Mardikanto (1993) adopsi dalam penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima "inovasi" yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya. Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekedar "tahu" tetapi dengan benar-benar dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan benar serta menghayatinya.

Inovasi adalah segala sesuatu ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seorang sebagai sesuatu yang baru.

Menurut Havelock (*dalam* Nasution, 1990) menyatakan bahwa inovasi merupakan segala perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya. Seseorang menganggap baru, tetapi belum tentu ide yang sama itu baru bagi orang lain. Mardikanto (1993) mengemukakan bahwa inovasi adalah suatu ide, perilaku, produk, informasi, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan/diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang mendorong terjadi perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi

terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu/warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut Samsudin (1994) inovasi adalah sesuatu yang baru yang disampaikan kepada masyarakat lebih baik dan lebih menguntungkan dari hal sebelumnya.

Difusi inovasi diartikan sebagai suatu proses dimana dikomunikasikannya inovasi kepada petani dalam suatu sistem sosial melalui saluran-saluran komunikasi tertentu, pada suatu kurun waktu tertentu pula. Difusi inovasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi antar pihak pengirim dan penerima informasi, sehingga dicapai pengertian yang sama mengenai informasi yang dikomunikasikan. Berlangsungnya proses difusi inovasi sebenarnya tidak berbeda dengan proses adopsi inovasi. Dari beberapa pengertian di atas, maka difusi inovasi pertanian diartikan sebagai proses penyebaran inovasi pertanian dari petani yang sudah mengadopsi kepada petani yang belum mengadopsi melalui saluran komunikasi tertentu pada suatu sistem sosial yang sama dalam dimensi waktu yang tertentu.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi

Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Suparlan (1986) menyatakan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh: pola kebudayaan yang telah ada, struktur sosial masyarakat dan pranata sosial, persepsi masyarakat terhadap inovasi.

Kecepatan proses adopsi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi, ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi. (Deptan, 2001).

Di lain pihak Liongberger dan Gwin (1982) mengelompokkan faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi antara lain, variable internal

(personal), variabel eksternal (situasional) dan variabel kelembagaan (pendukung).

a) Faktor Internal

- Pengetahuan Petani

  Pengetahuan menurut Mardikanto (1993) berasal dari kata "tahu" yang diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang sesuatu yang nilainya lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya. Pengertian tahu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap ragam stimulus yang berbeda, memahami beragam konsep, pikiran bahkan cara pemecahan terhadap masalah tertentu. Pengertian tahu tidak hanya sekedar mengemukakan/mengucapkan apa yang diketahui, tetapi sebaliknya dapat menggunakan pengetahuan dalam praktik dan tindakannya.

  Pengetahuan seseorang dapat diperoleh setelah melakukan pengindraan melalui panca indranya, oleh karena itu tindakan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan akan langsung dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan tindakan tanpa didasari pengetahuan. Hal ini sesuai pendapat Ray (1998) yang menyatakan bahwa pengetahuan terjadi pada saat atau unit pengambil keputusan lainnya, kontak dengan inovasi dan mendapatkan suatu fungsi inovasi tersebut. Jadi fungsi pengetahuan pada intinya bersifat kognitif atau sekedar mengetahui.

- Motivasi Kerja

  Motivasi adalah faktor pendorong yang terdapat pada diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan sikap atau perilaku manusia. Motivasi yang

bekerja pada diri individu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Setiap tindakan manusia digerakkan dan dilatarbelakangi oleh motif tertentu, tanpa motivasi tertentu orang tidak berbuat apa-apa (Handoko, 1992).

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk mengetahui kekuatan relatif yang menguasai seseorang pada umumnya dapat dilihat melalui (a) kuatnya kemauan untuk berbuat, (b) jumlah waktu yang tersedia, (c) kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain, (d) ketekunan dalam melaksanakan tugas, dan lain-lain. Menubuhkan motivasi pada petani pada umumnya sangat sulit, karena keterbatasan yang ada pada petani. Motivasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, maupun harapan-harapan yang akan diperolehnya, demikian motivasi petani akan berpengaruh terhadap adopsi inovasi.

- Sikap Petani terhadap Inovasi

  Menurut Thurstone, Likert dan Osgood (di dalam Azwar, 2002) bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung (favorable) maupun perasaan yang tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ban dan Hawkins (1999) bahwa sikap positif (mendukung) terhadap pertanian modern (inovasi teknologi) akan mendorong adopsi teknologi. Sikap petani terhadap inovasi teknologi sebagaimana dikemukakan oleh Nuraini (1977) bahwa sifat teknologi terdiri atas tiga, yakni: 1) secara teknis dapat dilaksanakan; 2) secara ekonomis menguntungkan; dan 3) secara sosial dapat diterima atau tidak bertentangan dengan adat dan budaya setempat. Petani mengetahui bahwa teknologi itu mudah dilaksanakan, menguntungkan, dan sesuai dengan

kondisi sosial budayanya maka akan berusaha menggunakan inovasi teknologi tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu proses adopsi inovasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekartawi (1988), adalah:

- Keuntungan relatif

  Secara hipotetik, lebih menguntungkan akan diadopsi lebih cepat. Suatu inovasi memungkinkan petani meraih tujuannya dengan lebih baik, atau biaya yang rendah. Kriteria yang digunakan untuk memilih suatu inovasi tidak terbatas pada kekuatan yang bersifat ekonomis, tetapi juga berupa keuntungan sosial, (misalnya meningkatkan status sosial, tingkat kemudahan pemakainnya maupun tingkat kepuasaan yang diperoleh).

- Kompatibilitas/keselarasan

  Kompatibilitas berkaitan dengan nilai sosial budaya dan keepercayaan dengan inovasi yang diperkenalkan sebelumnya atau keperluan yang dirasakan oleh petani. Petani akan lebih cepat menerima inovasi apabila kompatibel dengan apa yang dia ketahui dan kompatibel dengan personal objective (tujuan individu).

- Kompleksitas (kerumitan inovasi)

  Makin rumit suatu inovasi maka akan sulit petani menerimanya, tetapi apabila makin mudah teknologi tersebut dapat dipraktikkan maka makin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan.

- Triabilitas (dapat dicoba)

  Kemudahan inovasi untuk dapat dicoba oleh pengguna berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Inovasi yang dapat dicoba sedikit demi sedikit akan lebih cepat dipakai oleh pengguna daripada inovasi yang tidak dapat dicoba.

- Observabilitas (dapat diamati)

  Observabilitas adalah tingkat dimana hasil-hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain.

b) Faktor Eksternal

- Pendidikan

  Chaudhri (di dalam Soekartawi, 1988) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya diperkirakan akan menanamkan pengertian sikap yang menguntungkan menuju penggunaan praktik pertanian yang lebih modern. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat adopsi pertanian adalah berjalan secara tidak langsung, kecuali bagi mereka yang belajar secara spesifik tentang inovasi baru tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Reksohadiprojo (1982) mengemukakan bahwa dengan pendidikan akan menambah pengetahuan, mengembangkan sikap dan menumbuhkan kepentingan petani terutama dalam menghadapi perubahan.

  Di lain pihak Soetarjo dkk (di dalam Azwardi, 2001) menyatakan bahwa pendidikan seseorang pada umumnya mempengaruhi cara berpikirnya. Makin tinggi tingkat pendidikannya makin dinamis sikapnya terhadap hal-hal baru. Selanjutnya Efferson (di dalam Sudjadmiko, 1990) menyatakan bahwa tingkat pendidikan

baik formal maupun non formal besar sekali pengaruhnya terhadap penyerapan ide-ide baru, sebab pengaruh pendidikan terhadap seseorang akan memberikan suatu wawasan yang luas, sehingga petani tidak mempunyai sifat yang tidak terlalu tradisional.

Jadi, tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menentukan keputusan menerima inovasi baru. Ini karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan dapat berpikir lebih baik dan mudah menyerap inovasi pertanian yang berkaitan dengan pengembangan usaha taninya. Mereka yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, agak sulit dan memakan waktu yang relatif lama untuk mengadakan perubahan.

- Pengalaman Berusaha Tani

  Pengalaman petani merupakan suatu pengetahuan petani yang diperoleh melalui rutinitas kegiatannya sehari-hari atau peristiwa yang pernah dialaminya. Pengalaman yang dimiliki merupakan salah satu faktor yang dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya. Hal ini sesuai dengan pendapat Liliweri (1997), bahwa pengalaman merupakan faktor personal yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

  Pengalaman seseorang seringkali disebut sebagai guru yang baik, dimana dalam mempersepsi terhadap sesuatu obyek biasanya didasarkan atas pengalamannya.

Pengalaman berusaha tani tidak terlepas dari pengalaman yang pernah dialami. Jika petani mempunyai pengalaman yang relatif berhasil dalam mengusahakan usaha taninya, biasanya mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih baik, dibandingkan dengan petani yang kurang berpengalaman. Namun jika petani selalu mengalami kegagalan dalam mengusahakan usaha tani tertentu, maka dapat menimbulkan rasa enggan untuk mengusahakan usaha tani tersebut. Apabila ia harus melaksanakan usaha tani tersebut karena ada sesuatu tekanan, maka dalam mengusahakannya cenderung seadanya. Pengalaman petani dalam berusaha tani tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi pertanian.

- Tenaga Kerja

  Bagi petani ketersedian tenaga kerja khususnya tenaga kerja keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk menerima atau menolak suatu adopsi inovasi pertanian. Sejalan dengan ini Scott (1981) menyatakan bahwa karena berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh petani, pada umumnya tenaga kerja keluarga merupakan salah satu modal yang mereka miliki, dengan demikian diduga semakin banyak tenaga kerja dalam keluarga yang tersedia dalam usaha tani, maka semakin tinggi adopsi inovasinya.

- Modal

  Mengadopsi inovasi pertanian pada umumnya memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Kadang-kadang introduksi adopsi inovasi pertanian bagi petani subsistem dipandang tidak praktis, karena disamping memerlukan tambahan modal yang sebenarnya untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga menghilangkan kesempatan bekerja di luar usaha tani. Bachrein dan Hasanuddin (1997) menyatakan bahwa petani pada umumnya mengadopsi inovasi teknologi tidak secara utuh, namun secara parsial disesuaikan dengan kemampuan modal dan tenaga kerja yang dimilikinya. Besar biaya yang tersedia untuk suatu usaha tani digambarkan dengan besarnya modal yang dialokasikan dalam usaha tani yang bersangkutan dalam satu proses produksi. Jadi, keterbatasan modal usaha tani merupakan kendala untuk mengadopsi inovasi pertanian.

- Ketersediaan Sarana Produksi

  Menurut Mosher (1991), tersedianya sarana produksi secara lokal merupakan salah satu syarat pokok untuk berlangsungnya pembangunan pertanian. Inovasi teknologi memerlukan sarana produksi seperti benih berkualitas, pupuk, pestisida, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan petani. Tersedianya sarana produksi secara lokal yang terjangkau oleh petani baik secara fisik (kemudahan) maupun harganya akan merangsang petani untuk mengadopsi inovasi teknologi. Ketersediaan sarana produksi secara lokal dan terjangkau oleh petani akan berpengaruh positif terhadap adopsi inovasi pertanian.

- Pasar

  Ketersediaan pasar secara lokal sebagai tempat pemasaran hasil produksi usaha tani yang mudah dijangkau oleh petani merupakan salah satu syarat utama dalam modernisasi dan komersialisasi pertanian. Adanya permintaan, lancarnya penjualan dan penyaluran hasil usaha tani, akan menambah gairah untuk meningkatkan produksi hasil usaha taninya.

Ketersediaan pasar yang dapat dijangkau oleh petani dapat meningkatkan adopsi inovasi teknologi.

3) Tahap-tahap Adopsi

Seseorang yang mengadopsi suatu inovasi tidak serta merta mereka mengadopsi inovasi tersebut. Proses dimana seseorang mulai mengenal adanya suatu inovasi sampai mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-sehari dapat melalui beberapa tahap. Menurut penelitian di Amerika yang dilakukan oleh *North Central Rural Sociology Sub Commite of Diffusion of Farm Practise*, disimpulkan bahwa proses adopsi melalui tahap-tahap berikut:

a) *Awareness* (kesadaran)

Pada tahap ini seseorang menerima rangsangan lalu menangkap objek dari luar, sehingga ia menyadari adanya suatu inovasi.

b) *Interest* (minat/tertarik)

Pada tahap ini seseorang ingin mengetahui lebih banyak tentang inovasi, dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber tentang inovasi tersebut.

c) *Evaluation* (penilaian)

Pada tahap ini seseorang mulai menilai baik buruknya atau manfaat yang dapat dirasakan dari inovasi, penilaian dapat mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politis.

d) *Trial* (mencoba)

Pada tahap ini seseorang mulai mencoba inovasi, meskipun dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya sebelum ia menerapkan dalam skala yang lebih besar.

e) *Adoption* (adopsi/menerapkan)

Pada tahap ini seseorang sudah mau menerima dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukannya.

4) Kategori Sifat-sifat Adopter

Berdasarkan waktu untuk proses adopsi, kategori adopter adalah sebagai berikut:

a) *Inovator* (perintis)

Adalah kelompok yang pertama mau mengadopsi suatu inovasi. Jumlah kelompok ini hanya kurang lebih 2,5% dari total kelompok masyarakat. Kelompok inilah biasanya mendapatkan keuntungan ekonomis cukup banyak dengan adanya inovasi tersebut.

b) Early Adopter (pelopor)

Kelompok ini jumlahnya tidak terlalu banyak, sekitar 13,5% dalam masyarakat. Kelompok ini punya keberanian menanggung risiko cukup besar.

c) *Early Majority* (penganut dini)

Kelompok ini termasuk kelompok masyarakat kebanyakan dan jumlahnya cukup besar, keberanian dalam menanggung risiko tidak besar. Mereka agak terlambat dalam mengadopsi inovasi dan belum terlambat dalam merasakan keuntungan ekonomi. Jumlah kelompok ini dalam masyarakat mencapai 34%.

d) *Late Majority* (penganut lambat)

Kelompok ini merupakan masyarakat kebanyakan, jumlahnya juga cukup besar, mencapai 34%. Mereka tidak memiliki kebaranian menanggung risiko. Mereka sudah agak terlambat dalam mengadopsi inovasi, sehingga mereka sudah tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi adanya inovasi tersebut.

e) *Laggard* (kolot/penolak)

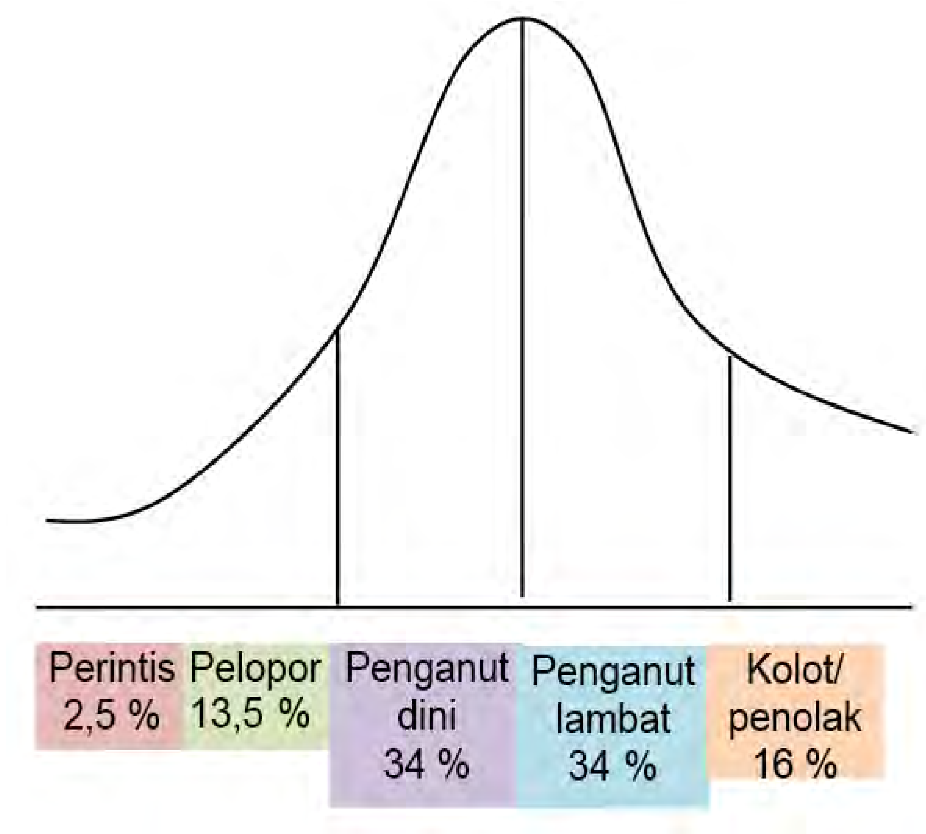
Kelompok ini termasuk kelompok yang sulit untuk berubah, bahkan sampai akhir hayatnya tidak mau menerima suatu inovasi. Biasanya latar belakang sosial ekonomi yang tidak mendukung menjadi penyebabnya. Jumlahnya dalam masyarakat mencapai 16%. Mengenali kelompok adopter dalam masyarakat, kita dapat mengidentifikasi dari ciri-ciri individunya. Adapun ciri-ciri dari kelompok adopter tersebut adalah sebagai berikut:

Bila suatu inovasi diperkenalkan pada masyarakat, tidak semua orang menerimanya pada waktu yang bersamaan. Gambar 1. memperlihatkan kurva berbentuk lonceng yang menggambarkan pola adopsi.

Tabel 1. Ciri dan Kelompok Adopter

Variabel	Perintis	Pelopor	Penganut dini	Penganut lambat	Kolot
Umur	½ umur	Muda	½ umur-tua	Muda-tua	Tua
Pendidikan	Tinggi	Tinggi	Rata-rata	Rendah	Rendah sekali
Ekonomi	Baik	Baik	Sedang	Kurang	Jelek
Status sosial	Tinggi	Sedang	Sedang-baik	Rendah	Paling rendah
Pola hubungan	Kosmopolit	Kosmopolit	Agak lokatif	Lokatif	Sangat lokatif

Sumber: (Slamet, 1978).



Gambar 1. Kurva Adopsi

Ini memperlihatkan bahwa ketika suatu inovasi mulai diadopsi oleh sebagian masyarakat terjadi efek pelipatgandaan pengadopsi karena adanya komunikasi dan saling mempengaruhi antar individu dalam masyarakat. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan oleh petani dan sumber informasi yang sering digunakan pada masing-masing tahap adopsi, sehingga penyuluh dapat menggunakannya sebagai pedoman untuk mengetahui jenis dan informasi serta sumber informasi yang dapat disediakan bagi masing-masing tahap adopsi tergambar pada tabel 2.

Tabel 2. Informasi yang dibutuhkan Petani dan Sumber Informasi pada Berbagai Tahap Adopsi

Tahap adopsi	Fungsi	Jenis informasi yang dibutuhkan	Sumber informasi
Kesadaran	Menjadi tahu	• Informasi baru	• Saluran media massa • Petani lain (kawan) • Instansi
Minat	Menjadi tahu	• Informasi lebih detail	• Saluran media massa • Petani lain (kawan) • Instansi
Evaluasi	Persuasi diri	• Apakah informasi tsb. efektif bagi saya? • Konsekuensi ekonomi dan sosial • Percobaan lokal • Evaluasi dari kawan • Hasil dari tempat lain	• Petani yang dipercaya • Orang lain yang dipercaya
Mencoba	Keputusan untuk menggunakan	• Bagaimana aplikasinya? • Seberapa banyak? • Kapan?	• Publikasi teknis • Penyalur lokal • Diri sendiri • Tetangga
Adopsi	Konfirmasi	• Hasil dari percobaan sendiri • Pengalaman orang lain	• Pengalaman sendiri • Pengalaman petani lain

5) Perbedaan Peranan dalam Proses Adopsi

Perbedaan media massa yang digunakan oleh petani sebagai sumber informasi, akan menyebabkan berbeda pula proses adopsinya. Beberapa diantara mereka pada awalnya berperan sebagai komunikator, legitimator, dan pionir (pendahulu). Pionir sering disebut sebagai inovator. Identifikasi tipe personal yang memainkan berbagai peran dalam pola adopsi pada komunitasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Inovator

Orang yang pertama menerima/mencoba inovasi (ide atau hal praktis yang baru). Mereka mencari atau bahkan menciptakan gagasan gagasan baru. Mereka mau menanggung resiko dan melakukan percobaan yang bersifat lokal untuk memperlihatkan/membuktikan kepada orang lain.

b) Pembicara

Orang yang menyebarkan informasi atau berperan sebagai agen penyebaran informasi. Mereka mengetahui dan menyebarkan pada banyak orang.

c) Pimpinan opini (*opinion leaders)*

Orang yang dianggap sebagai ketua, yang biasanya didengar dan diminta nasihatnya. Mereka dapat juga berperan sebagai pembicara.

6) Pentingnya Kelompok Sosial dalam Difusi dan Adopsi

Kelompok sosial merupakan gabungan/kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus yang sama. Beberapa kelompok sosial tampak seperti keluarga (famili), memperluas ikatan kekeluargaan, atau merupakan persahabatan yang kental dan tertutup yang sifatnya informal. Awalnya asosiasi antar mereka terjadi secara kebetulan dan mempunyai sifat mutualisme yang kuat untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan mereka satu sama lain.

Kelompok sosial (keluarga, lokalitas, ketertarikan khusus, kedudukan sosial dsb) memiliki kesamaan sifat yaitu: anggota suatu kelompok sosial lebih banyak bergaul dengan anggota lainnya dibandingkan dengan yang bukan anggota kelompoknya, dan mempunyai rasa saling memiliki.

Anggota suatu kelompok sosial lebih mengenal dan lebih mempercayai anggota lainnya dengan baik daripada terhadap bukan anggota kelompoknya. Anggota suatu kelompok sosial cenderung berbagi norma, pikiran, serta keyakinan dengan harapan anggota lainnya dapat menyesuaikan diri dengan norma, pikiran, dan keyakinan tersebut. Mereka memiliki cara-cara untuk menemukan orang yang tidak sesuai dengan mereka. Anggota suatu kelompok sosial saling membantu.

Kelompok sosial ini memiliki mekanisme yang dapat digunakan sebagai agen perubahan untuk menggali pertimbangan terhadap kemungkinan adopsi. Karena kelompok sosial dapat mempengaruhi komunikasi dan penerimaan inovasi, maka mereka menyediakan saluran (*channel*) interpersonal untuk mengkomunikasikan ide-ide baru yang didapat dari luar, menyediakan kesempatan bagi para anggota untuk menyampaikan ide-ide yang telah mereka ketahui dengan baik. Anggota dengan kredibilitas yang tinggi merupakan faktor persuasi penting dalam mengadopsi hal praktis yang baru.

7) Kritik terhadap Proses Adopsi

Rogers (1983), sebagai ahli komunikasi dan sosiologi, mengajukan kritik atau keberatan terhadap proses adopsi dengan berbagai alasan:

a) Proses adopsi tidak selalu berakhir pada tahap adopsi. Adakalanya, seseorang yang mengenal suatu inovasi dalam prosesnya sudah tertarik atau bahkan sudah mencoba inovasi tersebut, ternyata dalam percobaan yang mereka lakukan merasa bahwa inovasi tersebut tidak cocok atau tidak memberikan manfaat sebagaimana yang ia harapkan, maka gagallah ia untuk mengadopsi inovasi tersebut. Sebagai contoh, adanya iklan pestisida yang ampuh membasmi serangan hama tertentu, namun begitu ia cobakan pada

tanamannya yang terserang hama ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diiklankan di media. Akhirnya ia tidak jadi mengadopsi, dan kembali ke pestisida yang biasa ia gunakan sebelumnya.

b) Orang yang mengadopsi tidak harus melewati lima tahap tersebut. Ada juga seseorang yang mendengar atau mengetahui adanya suatu inovasi baru melalui media massa, karena begitu yakinnya akan manfaat dan kelebihan inovasi tersebut, seseorang tersebut langsung menerapkan inovasi tersebut dalam kehidupannya. Sebagai contoh, ada seorang petani yang sedang mencari cara mengurangi biaya angkut hasil produksinya yang selama ini memanfaatkan jasa rental mobil (truk); dengan adanya iklan mobil (truk) dengan kapasitas angkut yang cukup besar, dengan uang muka ringan dapat membawa pulang truk tersebut; tanpa berpikir panjang petani tersebut langsung datang ke dealer mobil terdekat untuk membeli kendaraan tersebut dan digunakan untuk mengangkut hasil produksi pertaniannya.

c) Tidak selamanya seseorang akan mengadopsi inovasi tersebut, dapat berhenti di tengah jalan atau beralih ke inovasi lain. Sebagai contoh, seorang petani jagung yang dikenalkan pada benih unggul hibrida baru, yaitu varietas X. Sampai pada akhirnya dia mengadopsi inovasi tersebut dengan menanam jagung dengan benih unggul varietas X tersebut. Namun, dalam beberapa tahun kemudian ada inovasi baru dengan diperkenalkannya benih jagung hibrida varietas Y, dengan beberapa kelebihan seperti tongkol dalam satu batang sebanyak 2 tongkol. Akhirnya petani tersebut beralih dari hibrida varietas X ke Y. Prosesnya beberapa petani tidak mencoba dulu dalam skala kecil (misalnya 0,25 ha), tetapi langsung semua lahan miliknya ditanami jangung varietas Y tersebut.

Rogers (1983) mengusulkan serangkaian tahap:

- Pengenalan/pengetahuan

  Yaitu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Melalui berbagai kegiatan promosi atau sosialisasi, maka seseorang dapat mendapatkan pengetahuan tentang adanya inovasi.

- Persuasi/penghimbauan

  Setelah ia mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan pengubahan sikap agar seseorang tersebut mau menerima inovasi tersebut. Pendekatan persuasif, agen pembaharu dapat meyakinkan seseorang terhadap kelebihan inovasi tersebut, atau dilakukan penghimbauan secara berulang (persuasi) agar mereka mau berubah sikapnya, dari semula menolak menjadi menerima inovasi baru tersebut.

- Implementasi/keputusan

  Setelah mendapatkan pengenalan dan tambahan informasi yang memadai mengenai inovasi tersebut, seseorang harus memutuskan apakah ia akan menerima atau menolak inovasi tersebut.

- Konfirmasi

  Pada tahapan berikutnya, seseorang masih mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan tersebut, ia masih perlu mencari.

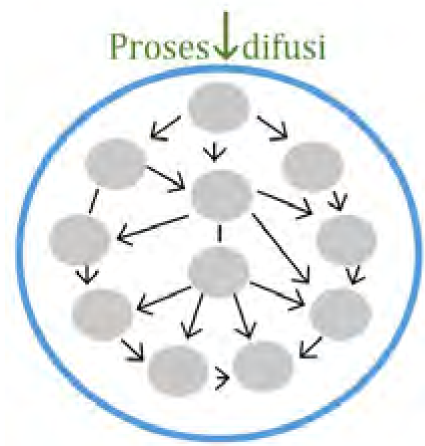
8) Komunikasi dan Proses Difusi

   Proses difusi adalah proses penyebaran informasi yang terjadi dalam masyarakat, mulai seseorang menyadari adanya inovasi, berminat pada inovasi, menilai suatu inovasi, mencoba suatu inovasi, dan menerapkan inovasi kemudian seseorang tersebut menyebarkan inovasi tersebut

kepada anggota masyarakat dalam sistem sosialnya, dengan demikian apabila proses adopsi terjadi dalam diri seseorang, maka proses difusi terjadi dalam sistem sosial.



Gambar 2. Gambar Proses Adopsi



Gambar 3. Proses Diffusi

Tabel 3. Unsur Difusi dan Kesamaannya dengan Model Komunikasi

Unsur-unsur dalam model komunikasi	Sumber (S)	Pesan (M)	Saluran (C)	Penerima (R)	Efek (E)
Unsur-unsur dalam difusi inovasi	Penemu ilmuwan Agen pembaharu Pemuka masyarakat	Inovasi	Saluran komunikasi: • Media Interpersonal • Media massa	Anggota sistem sosial	Konsekuensi: • Pengetahuan • Perubahan sikap • Perubahan tingkah laku

Dilihat dari prosesnya, maka unsur-unsur difusi (inovasi tersebar kepada anggota dalam sistem sosial) terdiri dari:

a) Inovasi yang disebarluaskan.
b) Penyebarluasan atau proses komunikasinya melalui saluran,
c) Proses tersebut terjadi dalam jangka waktu, dan
d) Penyebaran tersebut terjadi pada anggota sistem sosial.

Apabila dikaji lebih jauh, terdapat kesamaan antara proses komunikasi dengan proses difusi dalam sistem sosial. Berikut disajikan unsur-unsur difusi dan kesamaannya dengan model komunikasi (Rogers and Shoemaker, 1987):

Diantara anggota sistem sosial yang memegang peranan penting dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut pemuka pendapat dan agen pembaharu. Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Mereka sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu oleh anggota sistem lainnya. Para pemuka pendapat ini berpengaruh terhadap penyebaran inovasi, mereka dapat mempercepat atau menghambat.

Agen pembaharu adalah orang yang aktif berusaha menyebarkan inovasi ke dalam suatu sistem sosial. Dia adalah petugas yang berusaha mempengaruhi keputusan anggota sistem sosial dalam rangka melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat ia bekerja. Dia berusaha agar ide-ide baru itu dapat diadopsi, tetapi mereka juga dapat mengurangi kecepatan difusi dan mencegah pengadopsian ide yang ia yakini tak diinginkan. Agen pembaharu dapat berasal dari luar sistem sosial tersebut, ia tinggal bersama anggota sistem lainnya, atau sesekali waktu ia datang ke sistem sosial tersebut.

Agen pembaharu seringkali bekerja sama dengan pemuka pendapat dalam suatu sistem sosial. Pemuka pendapat sering menjadi pembantu yang berjasa bagi agen pembaharu, namun banyak kejadian di masyarakat para pemuka pendapat ”diasingkan” setelah usaha agen pembaharu berhasil.

Albrecht, *et.al*. (1989) menemukan bahwa ternyata seorang inovator selain menjadi contoh anggota dalam sistem sosial dalam mengadopsi suatu inovasi dan selanjutnya menyebarluaskan kepada anggota sistem sosial yang lain, ternyata inovator juga dapat menjadi element pengganggu dalam proses difusi. Inovator dapat menghindari risiko suatu inovasi yang tidak atau belum tentu cocok diterapkan di wilayahnya. Akhirnya semua anggota sistem sosial rugi secara ekonomis, lebih baik seorang inovator menolaknya agar anggota sistem tidak ikut menanggung risiko inovasi.

Kaitan antara komunikasi dan organisasi sosial minimal dalam tiga hal, yaitu: 1) Sistem sosial dihasilkan melalui komunikasi, perkembangan kelompok sosial akan meningkatkan peluang terjadinya komunikasi. 2) Sistem sosial yang telah berkembang mencirikan terjadinya komunikasi antar anggota. 3) Komunikasi mempengaruhi sistem sosial dan sebaliknya sistem sosial mempengaruhi komunikasi yang terjadi.

Lionberger (1982) mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi proses difusi:

a) Faktor-faktor sosial, seperti kelompok-kelompok lokal, sifat-sifat kekeluargaan, klik sosial, kelompok-kelompok panutan, kelompok-kelompok formal, dan faktor status.
b) Faktor-faktor budaya, yang mencakup sistem nilai dan tingkah laku.
c) Faktor-faktor personal, yang mencakup umur, pendidikan, dan ciri psikologis.

d) Faktor-faktor situasional, seperti tingkat pendapatan, luas usaha tani, status dan kedudukan, gengsi sosial, sumber-sumber informasi yang digunakan, tingkat kehidupan, dan praktik-praktik yang bersifat alami.

Rogers dan Shoemaker (1987) menyatakan bahwa difusi adalah suatu tipe khusus komunikasi. Difusi merupakan proses dimana inovasi tersebar kepada anggota suatu sistem sosial. Pengkajian difusi adalah telaah tentang pesan-pesan yang berupa gagasan baru, sedangkan pengkajian komunikasi meliputi telaah terhadap semua bentuk pesan. Pada kasus difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan itu bersifat ”baru”, maka ada risiko bagi penerima. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan tingkah laku dalam kasus penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan penerimaan pesan biasa. Malalui kajian komunikasi lebih luas dari pada kajian difusi, atau dengan kata lain kajian difusi merupakan bagian dari kajian komunikasi.

9) Implikasi dalam Bidang Penyuluhan

Penyuluhan pertanian sebagian dari kegiatan penyuluhan pembangunan melibatkan penyuluh pertanian lapangan sebagai ujung tombak pelaksanaannya di tingkat masyarakat tani. Penyuluh diharapkan berperan dalam penyebarluasan informasi pertanian serta ilmu pengetahuan dan teknologi baru di bidang pertanian. Penyuluh yang semestinya berperan sebagai agen pembaharu atau ”agent of change” tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai agen pembaharu penyuluh dapat berperan sebagai sumber (*source*) atau sebagai saluran (*channel*) dalam penyebarluasan inovasi. Agar penyebarluasan inovasi dapat berjalan sesuai harapan, sebelumnya sifat-sifat inovasi harus dikaji kesesuaiannya dengan kondisi setempat. Inovasi dapat disampaikan kepada para tokoh

panutan (misal: kontak tani), sehingga anggota sistem sosial dapat melihat bukti dari penerapan inovasi tersebut. Konsekuensi tersebarnya inovasi dalam sistem sosial (difusi inovasi) inilah yang kita harapkan dapat berjalan sesuai harapan.

Penyuluh harus mampu menjadi komunikator yang baik, sehingga penyuluh harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi yang baik serta mampu mengikuti kemajuan teknologi informasi dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi dan media alat bantu penyuluhan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Penyuluh diharapkan mampu menyerap semua perkembangan ilmu dan teknologi baru (inovasi) pertanian untuk disebarluaskan kepada petani, namun demikian berbagai keterbatasan yang ada pada penyuluh seperti rendahnya akses terhadap informasi menyebabkan penyuluh akhir-akhir ini telah ditinggalkan oleh petani. Hal ini disebabkan petani (terutama petani kaya dan kontak tani) yang lebih kosmopolit memiliki informasi dan iptek pertanian yang lebih dahulu.

Penyuluh sebagai agen pembaharu dalam sistem sosial dimana didalamnya terjadi proses difusi, seharusnya dapat memainkan peranan sebagai berikut:

a) Penyuluh mampu membawa informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru dan dibutuhkan oleh anggota sistem sosial.
b) Penyuluh harus mampu menjadi komunikator yang baik kepada para pemuka pendapat atau tokoh dalam menyampaikan inovasi baru dalam sistem sosial.
c) Penyuluh harus mampu menterjemahkan pesan (inovasi baru) kedalam bahasa yang dapat dipahami oleh anggota sistem sosial.
d) Penyuluh harus mampu menumbuhkan kebutuhan akan perubahan pada anggota sistem sosial.

e) Penyuluh harus mampu mendiagnosa masalah yang dirasakan oleh anggota sistem sosial.
f) Penyuluh harus mampu membangun hubungan untuk terjadinya perubahan dalam sistem sosial.
g) Penyuluh harus mampu menumbuhkan keinginan anggota sistem sosial menjadi tindakan nyata.
h) Penyuluh harus dapat mengusahakan keinginan tersebut menjadi tindakan nyata.
i) Penyuluh mampu mengkokohkan perubahan yang telah terjadi dan mencegah ketidakberlanjutan proses yang berjalan.
j) Mencapai akhir hubungan, agar sasaran dapat mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar (agen pembaharu).

Belajar dari pengalaman di lapangan bahwa keberhasilan program penyuluhan banyak dipengaruhi oleh kinerja penyuluh itu sendiri. Penyuluh harus mampu menempatkan dirinya sedemikian rupa, sehingga ia benar-benar diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Ia haruslah menjadi bagian integral dari masyarakat yang dibinanya. Penyuluh harus memberikan pendampingan dan pengawalan secara intens dan terus menerus. Kehadiran penyuluh di tengah-tengah kelompok tani yang dibinanya harus kontinyu, lebih sering lebih bagus, misalnya satu sampai dua kali dalam seminggu.

Penyuluh berperan ganda, ia sebagai guru, motivator, dinamisator, inovator, kreator, dan fasilitator. Sebagai guru ia harus seperti mata air. Agar terus dapat mengalirkan air (baca: ilmu atau inovasi), maka penyuluh harus terus belajar. Penyuluh harus terus banyak membaca, karena dengan membaca wawasan dan pengetahuan akan berkembang. Penyuluh seharusnya juga praktisi, atau pelaku agribisnis. Ini akan mengasah dan meningkatkan kompetensinya dibidang teknologi dan bisnis. Selain akan mendapat manfaat finansial, penyuluh yang praktisi

akan lebih percaya diri. Di samping itu masyarakat yang dibinanya juga akan lebih percaya kepadanya.

Penyuluh yang berhasil umumnya menjadikan profesi penyuluh itu sebagai panggilan jiwa. Ia bekerja penuh semangat, dedikatif, dan ikhlas. Ia menjadikan profesi penyuluh itu sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa "Penyuluh merupakan profesi yang mulia sama seperti guru".

3. Refleksi

Setelah membaca informasi diatas, apa yang anda catat sebagai pengingat Anda dari bacaan diatas:

No	Pokok Bahasan	Catatan Penting
1	Struktur masyarakat perkotaan dan pedesaan	
2	Ciri masyarakat perkotaan dan pedesaan	

No	Pokok Bahasan	Catatan Penting
3	Karakteristik masyarakat pertanian	
4	Tingkat adopsi, inovasi, difusi masyarakat	

4. Tugas

Lakukan tugas yang diberikan guru seperti tertuang berikut ini:

a. Mengamati

Lakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat lingkungan di wilayah Anda, yang meliputi:

1) Kondisi Sosial Ekonomi kehidupan masyarakatnya;
2) Mata pencahariannya;
3) Tingkat penyerapan ilmu dari penyuluh dalam menyampaikan materi yang disuluhkan.

b. Menanya

Setelah anda menemukan sasaran untuk diamati, apa yang anda ingin tahu berkaitan dengan permasalahan:

1) Kondisi Sosial Ekonomi kehidupan masyarakatnya;
2) Mata pencahariannya;
3) Tingkat penyerapan ilmu dari penyuluh dalam menyampaikan materi yang disuluhkan.

Tanyakan permasalahan tersebut kepada siapa saja, misalkan kepada teman terdekat, orang tua, masyarakat wilayah kehutanan, Petugas desa, penyuluh pertanian, dan sebagainya.

c. Mengumpulkan informasi

1) Catat atau rekam semua hasil informasi tersebut dalam buku catatan, foto, video, atau audio.
2) Tanyakan dan catat siapa tokoh masyarakat/ opinion leader di wilayah yang Anda kunjungi, apa ciri dari mereka

d. Mengasosiasi

Bahas dan analisis hasil informasi tersebut, hubungkan hasil pengamatan dan informasi yang berupa fakta dengan teori yang anda peroleh dari buku-buku.

e. Mengkomunikasikan.

1) Sampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.
2) Preseentasikan didepan kelas Anda, mintakan tanggapan dari teman di kelas Anda ataupun guru pembimbing mata pelajaran ini.

5. Test Formatif

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda X pada jawaban yang tersedia (A/B/C/D) untuk tiap nomor pertanyaan.

No	Soal
1.	Ciri umum dari desa yang ada di Indonesia ialah; 1) adanya wilayah dengan batas-batasnya yang jelas. 2) ditempati oleh sekelompok masyarakat yang merupakan kesatuan; 3) bersifat homogen dengan adat istiadatnya; 4) ada sistem perekonomian, sistem kepercayaan, dan struktur sosial; 5) adanya sistem kepemilikan tanahnya; Jawaban yang benar adalah: A. Jawaban 1,2,3,4. B. Jawaban 1,2,3,5. C. Jawaban 1,3,4,5. D. Jawaban 1,2,4,5.
2.	Desa nelayan, desa agraris, desa peladang, dan desa campuran adalah merupakan pengelompokan desa menurut…. A. Kelompok wilayah domisili B. Kelompok kegiatan masyarakat C. Kelompok mata pencaharian D. Kelompok geografis.

No	Soal
3.	Tingkat perekonomian yang masih rendah, langkanya kesempatan dan lapangan kerja, menyebabkan kecenderungan masyarakat desa melakukan; A. Rehabilitasi B. Reboisasi C. Redikalisasi D. Urbanisasi.
4.	Apabila masyarakatnya telah menetap dalam suatu wilayah, mempunyai organisasi kehidupan yang berlandaskan ketentuan norma hukum, menunjukkan pola dan tata cara kehidupan tertentu, masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan, maka diklasifikasikan ke dalam tingkatan desa: A. Swadaya. B. Swakarya C. Swadesa D. Swasembada.
5.	Apabila pemasaran hasil produksi mulai berkembang, penyediaan bahan baku dengan peralatan berkesinambungan, fasilitas kredit sudah efektif dan kecenderungan untuk pengumpulan permodalan. keterampilan masyarakat telah meningkat, adalah merupakan ciri dari desa: A. Swadaya. B. Swakarya C. Swadesa D. Swasembada.
6.	Kebergantungan dalam kehidupan masyarakat desa itu melahirkan disiplin sosial yang kuat kemudian dirumuskan dalam bentuk tradisi, adat kebiasaan, adat istiadat ini dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, adalah ciri masyarakat desa ini diistilahkan dengan kehidupan: A. Gotong royong B. Saling bantu membantu C. Kebersamaan D. Kebergantungan.
7.	Watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan, menurut para ahli dari abad ke 19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau *wesenwille* dalam pergaulan adalah menurut ahli yang bernama: A. Mardikanto B. Sayogyo C. Soekartawi D. Samsudin

No	Soal
8.	Masalah tanah, masalah kedudukan dan gengsi, masalah perkawinan, masalah perbedaan antar kaum tua dan kaum muda dan perbedaan antara pria dan wanita adalah merupakan sumber perselisihan pada masyarakat…. A. Kolot B. Pedesaan C. Religius D. Tradisional
9.	Proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru disebut…. A. Adopsi B. Difusi C. Difusi inovasi D. Inovasi
10.	Klasifikasi kelompok, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi adalah merupakan factor yang mempengaruhi kecepatan proses….. A. Adopsi B. Adopsi Inovasi C. Difusi inovasi D. Difusi
11.	Makin rumit suatu inovasi maka akan sulit petani menerimanya, tetapi apabila makin mudah teknologi tersebut dapat dipraktikkan maka makin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan, menurut Soekartawai, 1988 adalah merupakan faktor yang mempengaruhi: A. Kompatibilitas/ keselarasan B. Kompleksitas/ kerumitan inovasi C. Observabilitas/ dapat diamati D. Triabilitas/ dapat dicoba
12.	Pada seseorang mulai mencoba inovasi, meskipun dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya sebelum ia menerapkan dalam skala yang lebih besar, tahap ini disebut…. A. *Awareness* B. *Evaluation* C. *Interest* D. *Trial*

No	Soal
13.	Kelompok masyarakat yang jumlahnya mencapai 34%, tidak memiliki kebaranian menanggung risiko, sudah agak terlambat dalam mengadopsi inovasi, tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi adalah merupakan kelompok…. A. Kolot/penolak B. Pelopor C. Penganut lambat D. Penganut dini
14.	Orang yang dianggap sebagai ketua, yang biasanya didengar dan diminta nasihatnya diistilahkan…. A. Pembicara B. Inovator C. Kreator D. Pimpinan opini
15.	Seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu, sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu oleh anggota sistem lainnya, berpengaruh terhadap penyebaran inovasi, serta dapat mempercepat atau menghambat, mereka ini disebut…. A. Kepala pemerintahan B. Kelompok pendidik C. Pemuka agama D. Pemuka pendapat

C. Penilaian

No	Ranah	Bukti	Keterangan
1	Sikap	Mengamati sopan santunnya saat dialog dengan orang lain	Dapat ditugaskan kepada siswa lain atau oleh guru sendiri
		Dominasi pembicaraan, mempertahankan pendapatnya, bahasa dalam diskusi, saling menghargai dalam diskusi,	Diamati oleh guru
2	Pengetahuan	Kemampuan menyimpulkan isi teks	Dinilai oleh guru
		Kemampuan mengkolaborasikan isi teks dan temuan hasil wawancara maupun sumber lain menjadi kalimat utuh	
3	Ketrampilan	Ketrampilan berkomunikasi (pertanyaan yang tepat konten, dan bahasa) dalam menggali informasi dari orang lain	Dinilai oleh guru
		Ketrampilan presentasi	

Petunjuk:

Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai apakah sudah melaksanakan sikap/pengetahuan/keterampilan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap/pengetahuan/ keterampilan yang sudah diterapkan sendiri, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

1 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak

melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

No	Aspek Pengamatan Ketrampilan	1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
Jumlah Skor					

Petunjuk Penskoran:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{Skor}{Skor\ Tertinggi}\ x\ 4 = skor\ akhir$$

Contoh:

Skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir:

$$\frac{14}{20}\ x\ 4 = 2{,}8$$

Kriteria Perolehan nilai:

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 3,20 – 4,00 (80 – 100)

Baik : apabila memperoleh skor 2,80 – 3,19 (70 – 79)

Cukup : apabila memperoleh skor 2.40 – 2,79 (60 – 69)

Kurang : apabila memperoleh skor kurang 2.40 (kurang dari 60%)

Kegiatan Pembelajaran 2. Dasar Penyuluhan Pertanian

A. Deskripsi

Dasar-dasar penyuluhan pertanian akan berisi sejarah penyuluhan, mengapa perlu revitalisasi penyuluhan pertanian, bagaimana peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian di Indonesia, penjelasan dari Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, apa dan bagaimana seharusnya menjadi seorang penyuluh, bagaimana membentuk dan mengembangkan kelompok.

B. Kegiatan Belajar

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kompetensi dasar ini, diharapkan mampu:

a. Memahami sejarah, revitasilasasi penyuluhan pertanian
b. Memahami peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian
c. Memahami perbedaan pendidikan, penyuluhan dan penerangan
d. Menerapkan UU No 16 th 2006
e. Menerapkan 16 karakteristik dan fungsi penyuluh
f. Membentuk organisasi di tingkat petani, strategi dan tahapan membangun kelembagaan
g. Membentuk dan mengembangkan kelompok

Kegiatan Siswa

Kepada para siswa diminta untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau dengan uraian pendekatan sebagai berikut:

No	Uraian Pendekatan	Kegiatan	waktu
1	Mengamati	• Siswa ditugasi untuk membaca uraian materi dan membuat catatan kecil tentang: sejarah penyuluhan pertanian; revitalisasi; peran penyuluhan pertanian; perbedaan pendidikan, penyuluhan, dan penerangan; organisasi, strategi dan tahapan membangun kelembagaan; UU No 16 tahun 2006; menerapkan diri sebagai penyuluh; membuat atau membentuk dan mengembangkan kelompok.	4 jp dan terstruk tur
2	Menanya	• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana tiap kelompok beranggotakan 5 sampai 8 siswa, dengan model gallery walk, dan yang didiskusikan adalah: 1. Apa perbedaan pendidikan, penyuluhan, dan penerangan? 2. Bagaimana organisasi di tingkat petani/pelaku utama dan pelaku usaha? 3. Bagaimana strategi dan tahapan membangun kelembagaan di tingkat petani/pelaku utama dan pelaku usaha?	2 jp
3	Mengekspesi kan/ mengumpulk an data	• Siswa mencoba mempraktekan 16 peran penyuluh di depan kelas secara bergantian	4 jam

No	Uraian Pendekatan	Kegiatan	waktu
4	Mengasosiasi kan	Siswa mencoba membuat atau membentuk dan mengembangkan kelompok dengan siswa lain dianggap sebagai masyarakat sasaranya	4 jam dan terstruk tur
5	Mengkomuni kasikan	Mensosialisasikan UU No 16 tahun 2006 kepada siswa lain ataupun masyarakat sekitar tempat tinggal siswa.	2 jam dan terstruk tur

2. Uraian Materi

a. Sejarah Penyuluhan di Indonesia

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk itu kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian melalui pendekatan partisipatif.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di masa lalu masih menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) sehingga belum dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif yang sebenarnya dari petani dan pelaku usaha pertanian lainnya. Sedangkan paradigma baru manajemen pembangunan adalah mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

Pengembangan pembangunan pertanian di masa mendatang perlu memberikan perhatian khusus terhadap penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan

penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian.

Menurut Mardikanto (1992), kehadiran penyuluhan pertanian di Indonesia sebagai bidang kegiatan, sebenarnya sudah berlangsung hampir dua abad yang lalu, yakni sejak didirikannya Kebun Raya Bogor oleh Reinwardt pada tahun 1817. Menurut catatan sejarah, di Scotlandia, pengembangan ilmu penyuluhan pertanian sudah dirintis sejak tahun 1723. Akan tetapi kehadirannya sebagai cabang keilmuan sebenarnya belum lama. Sejak saat itu, konsep tentang penyuluhan dan penyuluhan pertanian terus mengalami perkembangan.

Sejak pemerintahan orde baru, kegiatan penyuluhan yang semula hanya dikenal di kalangan orang-orang pertanian, semakin dikembangkan untuk beragam sektor kegiatan, sehingga kemudian munculah penyuluhan agama, penyuluhan koperasi, penyuluhan transmigrasi, penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan industri kecil, penyuluhan hukum, penyuluhan perpajakan, dll. Menurut Slamet (1994), keragaman sektor penyuluhan tersebut mendasari munculnya penyuluhan pembangunan yang merupakan pengembangan dari penyuluhan pertanian. Perkembangan kemajuan penyuluhan dari tahun ketahun dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1) Tahun 1871

   Didirikannya Kebun Raya Bogor sebagai tempat mendemonstrasikan cara mengusahakan beberapa tanaman.

2) Tahun 1905

Mulai dilakukan kegiatan penyuluhan oleh Departemen Pertanian, secara tidak langsung kepada petani tetapi melalui Pangreh Praja (pegawai pemerintah) berupa perintah kepada petani, namun belum dilakukan penyuluhan dalam arti sebenarnya.

3) Tahun 1910

Beberapa tingkatan daerah mulai didirikan dinas penyuluhan. Metode Olie Vlek (tetesan minyak) dalam pengertian penyuluhan dilakukan mulai dari tingkat pusat kepada bawahannya, dan seterusnya sampai kepada petani.

4) Tahun 1921-1942.

Penyelenggaraan penyuluhan mulai diperluas. Pelaksanaannya ditemukan berbagai masalah kekurangan anggaran, personalia dan peralatan). Diantara tahun-tahun ini mulai didirikan sekolah pertanian.

5) Tahun 1942-1945

Masa ini adalah masa penjajahan Jepang. Sebenarnya tidak ada kegiatan penyuluhan, karena kegiatan pertanian dilakukan secara paksaan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Masa ini mulai di kenalkan metode peningkatan produksi secara paket.

6) Tahun 1947

Kegiatan penyuluhan dimulai lagi dengan didirikannya BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa).

7) Tahun 1959-1961

Usaha intensifikasi dengan mendirikan Padi Sentra, setiap sentra seluas 1000 ha. Petani di lingkungan itu mendapat penyuluhan dan kredit. Kredit dikembalikan dalam bentuk padi. Metode olie vlek mulai ditinggalkan, beralih menggunakan penyuluhan secara paket.

8) Tahun 1962

IPB menerapkan program yang dikenal dengan Demonstrasi Massal/Bimas (Bimbingan Massal). Prinsipnya sama dengan padi sentra, hanya luasannya 50 ha dan pengorganisasiannya tidak hanya satu badan, tetapi dilakukan oleh berbagai badan. Kegiatan penyuluhan oleh dinas pertanian, kredit oleh BRI, penyedia saprodi PN Pertani.

9) Tahun 1965/1966

Program Bimas/Inmas (Bimbingan Massal/Intensifikasi Massal) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan. Pelaksanaannya oleh berbagai badan, sampai tingkat desa yang dikenal dengan Koperta (Koperasi Produksi Pertanian). Tahun 1968/1969 pemerintah kesulitan dana, sehingga mengadakan kerjasama dengan pihak asing dikenal Bimas Gotong Royong.

10) Tahun 1970/1971

Diciptakan Bimas yang disempurnakan. Pada program ini dalam pelaksanaannya sudah melibatkan satuan Wilayah Unit Desa (Wilud).

11) Tahun 1974

Didirikan BLPP (Balai Latihan, Pendidikan dan Penyuluhan Pertanian) yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi penyuluhan dan pertanian.

12) Tahun 1976/1977

Bantuan *World Bank* melalui *National Food Crops Extension Programm* yang dilanjutkan dengan *National Agricultural Extension Programm* diperkenalkan sistem Laku (Latihan dan Kunjungan).

13) Tahun 1986

Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Mentan dan Mendagri yang intinya BPP sebagai *home base* PPL yang mempunyai wilayah (Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian/ WKBPP).

1 WKBPP terdapat ± 16 WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian).

WKPP terdiri atas 1-3 desa.

14) Tahun 1991

Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Mentan dan Mendagri yang intinya BPP tidak lagi sebagai *home base* PPL. BPP hanya sebagai kantor saja, tiap kecamatan dipilih koordinator PPL.

15) Tahun 1996

Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Mentan dan Mendagri yang lebih menegaskan pelaksanaan penyuluhan sub sektor dan kepala daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan.

16) Tahun 1999

Adanya Otonomi Daerah kegiatan penyuluhan beserta lembaganya bergantung pada kepala daerah masing-masing.

17) Tahun 2006

DPR dan Presiden Republik Indonesia menyepakati terbitnya Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta kepastian hukum bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; (Bab II Pasal 3 Ayat d UU No 16 Tahun 2006).

b. Peran Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian

Setiana (2005) mengemukakan bahwa penyuluhan ditinjau dari segi fungsinya adalah menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut, sehingga penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah *(two way traffic)* yaitu:

1) Pengetahuan yang dibutuhkan petani dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh petani.
2) Pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dan kondisi yang nyata dialami petani.

Ditinjau dari segi makna agribisnis penyuluhan pertanian merupakan suatu sumber informasi bagi petani untuk meningkatkan usaha taninya baik subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir (pengolahan) dan subsistem penunjang.

Pambudy (2003) menyatakan bahwa, penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya sebagai jembatan bagi golongan ekonomi lemah. Penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya produksi, modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum lain yang dibutuhkan golongan penduduk miskin agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.

Sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka peran penyuluhan pertanian dalam makna agribisnis merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai tambah produksi hasil pertanian.

Ditegaskan oleh Slamet (2003), sistem penyuluhan pertanian Indonesia yang ada sekarang telah terbukti dapat mengantarkan petani untuk mampu

menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang cukup bagi seluruh kebutuhan nasional. Pada masa yang akan datang penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengantarkan petani Indonesia mempertahankan kondisi swasembada pangan dan sekaligus mengantarkan petani berproduksi secara mandiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Adapun tujuan penyuluhan pertanian tidak hanya membuat petani mampu berproduksi sampai pada tingkat tercukupinya kebutuhan nasional. Akan tetapi tingkat produksi itu harus dicapai secara mandiri dan sekaligus membuat tingkat kesejahteraan petani meningkat dengan nyata dalam konteks pembangunan nasional.

Peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan nilai tambah dan produksi usaha tani dapat dilakukan dengan memberikan suatu inovasi teknologi agribisnis kepada petani. Dimulai dengan penyediaan sarana produksi pertanian, bimbingan dalam pengelolaan usaha tani, bimbingan dalam pengolahan usaha tani serta menjembatani keperluan petani dengan berbagai unsur penunjang seperti kredit, pemasaran, dan lain-lain, sehingga akan tercipta petani yang mandiri dan berjiwa enterprener sesuai makna tujuan penyuluhan pertanian yang bermakna agribisnis.

Pentingnya penyuluhan dalam proses pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang umumnya ekonomi lemah, baik lemah permodalan, pengetahuan, keterampilan, peralatan dan teknologi yang diterapkan. Di samping itu, mereka juga sering kali lemah dalam hal semangat untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. (Sapoetro *di dalam* Mardikanto, 1992).

Kenyataan juga menunjukkan bahwa praktik penyuluhan yang bertujuan untuk menawarkan atau "memasarkan" inovasi sampai dengan inovasi

tersebut diadopsi oleh masyarakat, bukanlah pekerjaan yang gampang. Di dalam praktik, kegiatan penyuluhan selalu menuntut kerja keras, kesabaran, memakan banyak waktu, dan sangat melelahkan, dengan demikian pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan kian menjadi kebutuhan banyak pihak.

Pentingnya penyuluhan pembangunan juga diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut Mardikanto (1992) kegiatan penyuluhan pembangunan terus menerus dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Pada masa lalu, penyuluhan dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke petani. Kini peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi masing-masing pilihan itu. Adapun tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk mengubah perilaku petani (Van den Ban, 1999).

Menurut Slamet (*di dalam* Mardikanto, 1993), tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku sasarannya. Hal ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia.

Slamet (1994) mendefinisikan penyuluhan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang

lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas kehidupan yang lebih baik.

Hal yang sama juga didefinisikan oleh Wiriaatmadja (1973) yang menyatakan bahwa penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar sekolah, dimana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, dan mampu/dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, menguntungkan dan memuaskan.

Jadi penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sararan, karena sifatnya yang demikian sehingga penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal.

Melalui penyuluhan juga harus diupayakan tidak terciptanya "kebergantungan" masyarakat kepada penyuluhnya. Penyuluh hanya sekadar sebagai fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan. Melalui penyuluhan ini maka ingin dicapai suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan luas, memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu (informasi) yang baru. Disamping itu melalui penyuluhan diharapkan mayarakat menjadi terampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarga/ masyarakatnya.

Pernyataan tentang tujuan penyuluhan tersebut sesuai dengan falsafah penyuluhan yang dianut yaitu harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu (Kelsey dan Herane dalam Mardikanto, 1993). Masyarakat harus dilihat sebagai manusia biasa yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya dan memiliki keinginan dan harapan untuk terlepas dari keadaan yang tidak mereka kehendaki. Pelaksanaan penyuluhan harus mampu tidak saja mengembangkan potensi

masyarakat tetapi juga harus mampu memberikan peluang kepada kekuatannya sendiri untuk mengembangkan potensinya supaya terlepas dari kemiskinan dan kebodohan.

Kelsey dan Herane (*di dalam* Mardikanto, 1993), mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Pendapat tersebut, terkandung pengertian bahwa:

1) Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
2) Penyuluhan tidak menciptakan kebergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya.
3) Penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

c. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden pada bulan Juli 2005, pada tanggal 3 Desember 2005 di Sumatera Selatan, Menteri Pertanian telah mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Pada hakikatnya Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah suatu upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan

pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korps dan kesatuan arah kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan revitalisasi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pelaku usaha pertanian.

Program revitalisasi difokuskan pada beberapa sub program, yaitu penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis. Program ini berupaya memperbaiki sistem dan kinerja penyuluhan pertanian yang sejak akhir 1990 an sangat menurun kondisinya.

Salah satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi ini adalah telah keluarnya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006. Pada Undang-undang ini disebutkan perlunya penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, serta menyediakan sumber dana yang merupakan kontribusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini merupakan satu titik awal dalam pemberdayaan para petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan para penyuluh pertanian PNS, swasta, dan penyuluh pertanian swadaya.

Permasalahan pokok yang dihadapi selama ini adalah rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh. Untuk memperkuat tenaga penyuluhan, pemerintah merencanakan satu desa satu penyuluh untuk seluruh desa di Indonesia. Selain itu, Departemen Pertanian juga berupaya memperbaiki dan memfungsikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), menyediakan kendaraan dinas untuk transportasi penyuluh, serta membenahi metode dan sistem penyuluhan yang selama ini lebih banyak berorientasi pada

peningkatan produksi kepada penyuluhan yang berorientasi kepada agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya.

1) Kondisi Pertanian dan Penyuluh Pertanian Sebelum Adanya UUSP3K

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke 21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas, namun demikian sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi, maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat. Kegiatan agribisnis yang dengan kata lain akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja. Di samping itu mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi juga berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usaha tani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era global adalah bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh 26 juta Kepala Keluarga (KK) tani yang merupakan 51 % dari penduduk Indonesia. Bercirikan berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar

global. Oleh karena itu, diperlukan usaha pemberdayaan melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian nasional yang mampu membantu petani dan pelaku usaha pertanian untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya serta meningkatkan kesejahteraannya.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada zaman Hindia Belanda menggunakan pendekatan atas perintah atau pendekatan dari atas (*top down*). Pemerintahan pendudukan Jepang masih menggunakan pendekatan dari atas, bahkan setelah kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih juga menggunakan pendekatan dari atas, walaupun dalam perkembangannya kemudian mengalami berbagai modifikasi.

Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh, melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan pertanian dapat menghantarkan Bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Ini dilakukan melalui koordinasi yang ketat antar instansi terkait tetapi masih dengan menggunakan pendekatan dari atas yang dimodifikasi. Cara ini merupakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masa Bimas sudah mulai terintegrasi dengan baik.

Keberhasilan penyuluhan pertanian yang demikian menimbulkan anggapan bahwa penyuluhan pertanian yang dilaksanakan selama ini dilakukan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa dan biasa. Petani dipaksa untuk menerima teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya, dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya. Pada akhirnya petani meningkat kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi yang diusahakan dan

mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah keberadaan lembaga penyuluhan dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota dari yang semula berada di bawah Departemen Pertanian. Sejak itu keberadaan lembaga penyuluhan di beberapa kabupaten/kota kurang difungsikan dengan baik oleh pemerintah kabupaten/ kota, bahkan ada yang sudah dihapus maupun muncul dalam bentuk lain. Kondisi tersebut, menurut Anton Apriyantono (Mantan Menteri Pertanian), menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak efisien, efektif dan produktif, serta tidak mampu meningkatkan pemberdayaan petani yang akhirnya tidak mampu meningkatkan produktivitas, pandapatan dan kesejahteraan petani.

Saat ini kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota memiliki beragam bentuk, struktur, tugas dan fungsinya. Keberagaman tersebut antara lain yang berbentuk badan ada tujuh unit, kantor 72 unit, balai 24 unit, sub dinas 82 unit, seksi 23 unit, UPTD 21 unit dan kelompok jabatan 135 unit. Jumlah tersebut enam persen bentuk kelembagaannya belum jelas atau pun dibubarkan.

Sementara itu dari penyuluh pertanian di seluruh Indonesia yang berjumlah 25.380 orang dan tersebar di BPP kabupaten/kota maupun dinas atau bidang lingkup pertanian provinsi, sebagian tugas mereka tidak jelas. Bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak diakui adanya jabatan fungsional, tunjangan fungsional tidak dibayarkan, pola karier tidak jelas, kesempatan mengikuti pelatihan sangat kurang, sehingga kompetensi tidak berkembang. Banyak penyuluh pertanian yang alih tugas ke jabatan lain dan sebagian besar sudah memasuki masa pensiun yang mengakibatkan tidak sebanding jumlah penyuluh dengan jumlah petani/kelompok tani serta pelaku usaha lain yang harus ditanganinya.

Keadaan inilah yang menyebabkan mereka frustasi sehingga sangat mempengaruhi efektifitas penyuluhan pertanian di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selain permasalahan di atas, ketersediaan sarana penyuluhan pertanian sangat terbatas bahkan tidak disediakan sama sekali. Sementara sarana yang sudah tersedia pada waktu lalu oleh pemda dialihkan kepada petugas lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan pertanian. Pembiayaan penyuluhan pertanian yang disediakan pemerintah pun kurang memadai bahkan tidak digunakan sesuai untuk penyuluhan pertanian.

Melihat kecenderungan tersebut, disisi lain kegiatan penyuluhan pertanian menghadapi tantangan yang semakin berat, maka untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian Departemen Pertanian akhirnya akan menarik tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang selama ini di bawah pemerintah kabupaten/kota kembali ke pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk menghadapi persaingan di era pasar global, dimana diperlukan penyuluhan pertanian yang mampu membantu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraanya.

Era reformasi dan otonomi sekarang ini, pendekatan dari atas tentunya sudah tidak relevan lagi, karena yang kita inginkan adalah bahwa petani dan keluarganya mengelola usaha taninya dengan penuh kesadaran, bukan terpaksa, mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada, yang ditawarkan penyuluh pertanian dan pihak-pihak lain. Pilihan tersebut membuat petani yakin bahwa dia akan dapat mengelola usaha taninya secara produktif, efisien dan menguntungkan serta berdaya saing tinggi. Melakukan pilihan inilah petani mendapatkan bantuan dari penyuluh pertanian dan pihak lain yang

berkepentingan dalam bentuk hubungan kemitra sejajaran, sehingga tidak terjadi pemaksaan.

Pengalaman-pengalaman di atas, penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi, harapan, kebutuhan, dan potensi serta peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya. Oleh karena itu penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus menggunakan pendekatan partisipatif yang didasari pada prinsip-prinsip pemberdayaan dan dikembangkan mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11 ayat (3) jis Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pertanian termasuk penyuluhan pertanian merupakan urusan pilihan. Walaupun demikian mengingat pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan umumnya juga merupakan tulang punggung ekonomi sebagian besar daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maka seyogyanya provinsi dan kabupaten/kota menetapkan urusan pertanian menjadi urusan pertama yang akan dikembangkan di wilayahnya. Ini sesuai yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menetapkan pertanian sebagai sektor yang strategis dalam mengembangkan ekonomi Indonesia melalui revitalisasi pertanian.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa dalam satu sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kenyataannya sekarang bahwa, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Penyuluhan

pertanian dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, namun harus jelas keserasian hubungan antar susunan pemerintahan tersebut dalam penyelenggaraannya.

Para penyelengara penyuluhan pertanian melakukannya dengan persepsi, pendekatan dan sistem yang berbeda-beda, tidak terintegrasi karena tidak berdasarkan pada filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan yang sama. Hal ini menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak efisien dan efektif, sehingga tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akhirnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak dapat memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pembangunan pertanian baik secara nasional maupun secara lokalita.

Disamping itu, penyebab tidak terintegrasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara lain adalah karena produk-produk hukum lingkup pertanian dalam arti luas belum memberikan kejelasan tentang penyuluhan pertanian. Siapa yang melakukan penyuluhan pertanian, apa yang dimaksud penyuluhan pertanian, dimana melakukan penyuluhan pertanian, bilamana dilakukan penyuluhan pertanian, dan bagaimana melakukan penyuluhan pertanian, ini belum diatur secara jelas sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu kebutuhan akan adanya satu sistem penyuluhan pertanian yang dapat mengintegrasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari pusat sampai ke daerah merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 1983, 1992 dan 2002, kondisi petani kita masih lemah (skala ekonomi usaha, produktivitas, pendapatan dan posisi tawar). Jumlahnya yang sangat besar, sehingga penyuluhan pertanian akan terus mempunyai peran strategis dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sekarang ini petani dan keluarganya harus menyediakan waktunya lebih sering dan

lebih lama untuk merespons berbagai kegiatan penyuluhan dengan pendekatan yang berbeda-beda yang diselenggarakan oleh berbagai macam kelembagaan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu petani dan keluarganya beserta pelaku usaha pertanian lain banyak kehilangan waktunya dan tidak terkonsentrasi pada masalah pokok dalam mengembangkan usahanya untuk dapat meningkatkan produk tivitas, efisiensi, pendapatan dan kesejahteraannya.

2) Permasalahan Umum dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

a) Adanya perbedaan persepsi tentang pengertian penyuluhan pertanian, baik dari para pembinanya di tingkat pusat maupun para pelaksananya di daerah.

b) Adanya perbedaan persepsi tentang visi, misi, tujuan penyuluhan pertanian baik dari para pembinanya di tingkat pusat maupun para pelaksanaanya di daerah.

c) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan dengan menggunakan pendekatan, sistem kerja dan metode yang tidak sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang partisipatif.

d) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dilakukan oleh berbagai kelembagaan yang dibentuk oleh masing-masing daerah dengan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda tidak terstandar, sehingga tidak sesuai dengan misi penyuluhan pertanian.

e) Pembinaan jabatan fungsional penyuluh pertanian di kabupaten/kota tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian yang berakibat rendahnya kinerja mereka.

f) Peraturan perundang-undangan yang ada yang menyangkut pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dalam arti luas belum menguraikan secara jelas tentang penyuluhan pertanian, sehingga belum dapat dipakai sebagai pedoman bagi para

pembina dan pelaksana penyuluhan pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah.

g) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum memberikan jaminan perlindungan terhadap petani terhadap berbagai dampak negatif dan penerapan teknologi yang dianjurkan, sehingga petani menjadi tidak termotivasi untuk menerapkannya.

h) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum didukung oleh biaya operasional yang memadai.

i) Beberapa perubahan lingkungan strategis (globalisasi, berlakunya otonomi daerah, perubahan kebijakan pembangunan pertanian, perubahan kondisi petani dan pergeseran paradigma) mempunyai implikasi yang luas terhadap penyuluhan pertanian, sehingga menghendaki perubahan sistem penyuluhan pertanian secara menyeluruh.

Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak dilakukan upaya pemecahannya, maka akan dapat merugikan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Sebab penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang demikian tidak berfungsi dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan keberdayaannya. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan revitalisasi penyuluhan pertanian melalui suatu kebijakan yang komprehensif dalam bentuk Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian.

3) Permasalahan Spesifik

a) Kondisi Peranan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian di Indonesia berkembang melalui beberapa tahap. Pada periode sebelum tahun 1960, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan pendekatan “tetesan minyak” melalui petani-petani maju dan kontak tani. Metode yang digunakan

terutama melalui kursus tani mingguan bagi petani dewasa, wanita dan pemuda. Selain itu dilaksanakan juga kunjungan keluarga dan propaganda program peningkatan produksi.

Periode 1975-1990, sistem latihan dan kunjungan (Laku) mendominasi sistem kerja penyuluh pertanian di Indonesia terutama di daerah-daerah produksi padi. Sistem ini diperkenalkan dan dilaksanakan dengan dukungan Bank Dunia melalui Proyek Penyuluhan Tanaman Pangan (NFCEP) tahun 1975 dan diikuti oleh Proyek Penyuluhan Pertanian Nasional (NAEP I dan NAEP II). Tujuan kedua proyek tersebut pada intinya adalah untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian tertentu, dimulai dengan hasil pertanian utama yaitu padi yang masih menerapkan teknologi yang kurang produktivitasnya, dengan jalan mendiseminasikan teknologi usaha tani, yang dikenal dengan Panca Usaha dan Sapta Usaha.

Penyuluh pertanian yang pada waktu itu dikenal dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dilatih untuk mengajar petani dan menyampaikan rekomendasi yang telah disusun dalam paket-paket teknologi. Sistem ini merupakan sistem kerja yang didasarkan pada manajemen waktu yang ketat dan mengalihkan teknologi dimana petani hanya dianggap sebagai pengguna teknologi yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian.

Khusus mengenai program Bimas, keberhasilannya ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Didukung oleh kemauan atau *political will* yang kuat langsung dari presiden yang diturunkan sampai ke kepala desa. Setiap minggu provinsi lokasi Bimas padi harus mengirimkan laporan

mengenai perkembangan pelaksanaan Bimas padi ke Departemen Pertanian dan ke Bina Graha.

- Sifatnya sentralistis, pelaksana dan petani peserta Bimas di daerah harus mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah yang umumnya sudah dalam bentuk paket, termasuk paket teknologi usaha tani (Panca Usaha dan Sapta Usaha).
- Petani mendapatkan subsidi.
- *Delivery system* diorganisasikan dalam bentuk Catur Sarana dan *receiving mechanism*nya adalah kelompok tani.
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi optimal sebagai basis (*home base*) penyuluhan pertanian yang dibagi dalam Wilayah Kerja BPP (WKBPP), Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dan Wilayah Kelompok (Wilkel).
- Anggaran besar, tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.
- Didukung oleh penyuluh pertanian yang relatif masih muda sehingga mobilitasnya tinggi dan mempunyai otoritas yang tinggi.
- Menggunakan sistem kerja Laku sebagai sistem kerja para penyuluh pertanian.

Sistem Bimas dilaksanakan hanya pada beberapa komoditas tertentu yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pengendali Bimas di pusat dan di daerah oleh Satuan Pembina Bimas Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. Sekretariat Badan Pengendali Bimas. Pada kondisi di atas, para penyuluh pertanian semuanya dikerahkan untuk mensukseskan program Bimas dalam rangka swasembada beras, sehingga program peningkatan produksi komoditas di luar beras tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Walaupun Departemen Pertanian merekrut tenaga

penyuluh pertanian khusus untuk menangani komoditas non beras, yang berstatus dipekerjakan di daerah, ternyata juga tidak memberikan hasil yang optimal karena tidak didukung oleh perangkat-perangkat seperti pada program Bimas, termasuk penyediaan dananya.

Perkembangan selanjutnya, Sistem Kerja Laku pun mengalami kemunduran, petani yang hadir dalam pertemuan dua mingguan di hamparan makin berkurang. Laporan studi Bank Dunia tahun 1995 menggambarkan makin banyak petani yang kurang puas dengan sistem ini. Penyuluh pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber informasi untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam usaha taninya.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah mengembangkan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif di antaranya model Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Pada pelaksanaannya, ternyata dari masa ke masa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan tidak berdasarkan sistem dan mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kuat.

b) Kondisi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan penyuluhan pertanian adalah kegiatan terencana dan berkelanjutan yang harus diorganisasikan dengan baik. Pengorganisasian penyuluhan pertanian dilakukan dengan tujuan mengefisienkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi, manajemen dan pengelolaan sumberdaya. Organisasi atau kelembagaan penyuluhan pertanian terdiri dari kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, petani dan swasta.

Sampai dengan sekarang, kelembagaan yang khusus menangani penyuluhan pertanian di provinsi tidak ada, tetapi fungsi penyuluhan pertanian di beberapa provinsi dilaksanakan oleh dinas atau badan lingkup pertanian. Penanganannya dilakukan secara parsial dan tidak terkoordinasi, karena mandat untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian tidak diatur dengan tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2005, 375 dari 435 kabupaten/kota (86 %) mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk badan/kantor/ balai/subdinas/seksi/UPTD/ kelompok penyuluh pertanian,

sedangkan 61 kabupaten/kota (14 %) bentuk kelembagaannya tidak jelas. Sementara itu di kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada saat ini dari 5.187 kecamatan baru terbentuk 3.557 unit (69 %).

Secara umum masalah yang dihadapi kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

- Fungsi penyuluhan pertanian di provinsi belum berjalan optimal karena mandat untuk melaksanakan penyuluhan pertanian tidak tegas.
- Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota (7 bentuk) menggambarkan beragamnya persepsi kabupaten/kota tentang posisi dan peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan:
    - Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk kantor/balai/sub dinas/seksi/kelompok jabatan fungsional/ UPTD, sulit mengkoordinasikan instansi terkait karena

eselonnya lebih rendah dari instansi yang akan dikoor dinasikan.

- Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk sub dinas/seksi/ kelompok jabatan fungsional/UPTD, fungsi penyuluhan masih bercampur dengan fungsi pengaturan dan pengendalian. Hal ini menyebabkan berkurangnya indepen densi penyuluh pertanian.
- Intervensi Pemerintah untuk mengatur bentuk dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota tidak memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Belum semua kecamatan memiliki BPP. Adapun BPP yang ada sekarang ini kurang difungsikan dengan baik oleh kabupaten/kota, bahkan dibeberapa kabupaten/kota dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
- Kurang difungsikannya BPP mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian kurang terencana dan tidak diprogramkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi ini juga menyebabkan kurang atau tidak tersedianya biaya operasional penyuluhan pertanian di kecamatan/desa.
- Diserahkannya personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari pemerintah pusat ke provinsi/kabupaten/kota, maka kepemilikan aset kelembagaan penyuluhan pertanian beralih ke provinsi/kabupaten/kota. Kenyataannya penggunaan aset ini tidak sesuai dengan keperluan untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Akibatnya penyuluh pertanian tidak mendapatkan dukungan sarana penyuluhan pertanian yang memadai sehingga kinerjanya menurun.

- Pimpinan pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota banyak yang tidak mempunyai latar belakang penyuluhan pertanian. Hal ini menyebabkan pengelolaan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, karena pimpinan/pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian kurang memahami arti dan peran strategis penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian di wilayah kerjanya.
- Sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama belum ada. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sehingga struktur dan mekanisme pembinaan dan tata hubungan kerja juga menjadi tidak jelas.
- Kabupaten/kota belum sepenuhnya menjalankan kewenangan wajib dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kabupaten/kota belum menyusun program penyuluhan pertanian, belum melakukan pembinaan terhadap penyuluh pertanian dan minimnya biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.
- Kelembagaan penyuluhan pertanian yang dimiliki dan dioperasionalkan baik oleh petani maupun oleh swasta, belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah sebagai mitra kerja sejajar untuk melayani petani.

c) Kondisi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Keragaman tenaga penyuluh pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 1999 jumlah penyuluh pertanian tercatat sebanyak 37.636 orang. Setelah otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah penyuluh pertanian berkurang menjadi 33.659 orang. Kurun waktu empat

tahun kemudian, jumlah penyuluh pertanian berkurang drastis menjadi 25.708 orang (data Mei 2005) ditambah 1.634 orang penyuluh pertanian honorer. Seluruh penyuluh pertanian ini tersebar secara tidak merata di 3.557 BPP.

Kondisi tenaga penyuluh pertanian pada saat ini adalah sebagai berikut:

- Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian masih bias kepada sub sektor pangan, khususnya padi. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada petani yang mengusahakan komoditas non pangan.
- Banyak alih tugas penyuluh pertanian ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan kompetensi penyuluh pertanian. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di kabupaten/kota tersebut yang mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah petani/kelompok tani yang harus dilayani. Kondisi ini juga menyebabkan banyak penyuluh pertanian yang frustasi karena ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Pada beberapa kabupaten/kota, pengukuhan kembali penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional belum dilakukan sehingga penyuluh pertanian tidak diakui eksistensinya dan tunjangan fungsionalnya banyak yang tidak dibayarkan atau dibayarkan tidak sebesar seperti seharusnya. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya motivasi penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik.
- Kenaikan pangkat sering terlambat dan pola karir tidak jelas sehingga kondisi ini juga mengurangi motivasi dan kinerja para

penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik dan seringkali menyebabkan frustasi.

- Rekruitmen dan pembinaan karier penyuluh pertanian belum sepenuhnya berpedoman pada SK Menkowasbang PAN No.19/1999 dan ketentuan usia pensiun bagi penyuluh pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, terutama melalui pendidikan dan latihan (Diklat), sudah jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kinerja penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya dan menurunnya kredibilitas mereka di mata petani.
- Penyetaraan penyuluh pertanian dari pendidikan SLTA ke DIII belum terselesaikan. Kondisi ini menyebabkan mereka dapat diberhentikan sebagai pejabat fungsional.
- Usia penyuluh pertanian sebagian besar di atas 50 tahun. Kondisi ini menyebabkan 10 tahun yang akan datang jumlah penyuluh pertanian menjadi sangat berkurang karena memasuki usia pensiun.
- Penyuluh pertanian swakarsa dan swasta belum berkembang dengan baik, karena pembinaannya belum terprogram dan belum didukung oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya peranserta petani dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- Biaya operasional untuk penyuluh pertanian yang disediakan oleh kabupaten/kota tidak memadai. Hal ini menyebabkan frekuensi dan intensitas kunjungan penyuluh pertanian ke petani sangat kurang.

d) Kondisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan selama ini belum dapat memberdayakan petani dan pelaku usaha pertanian lain karena belum adanya kesatuan persepsi, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan prinsip: 1) terdesentralisasi, 2) partisipatif, 3) keterbukaan, 4) keswadayaan, 5) kemitrasejajaran, 6) akuntabililitas, dan 7) keterpaduan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penyuluhan partisipatif dan belum dilaksanakan secara terpadu sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan petani. Hal ini menyebabkan kurangnya peranserta petani dan terputusnya jaringan kerjasama antara penyuluhan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan petani lainnya (penelitian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran).
- Penyusunan programa penyuluhan pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan serta belum didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunannya. Kondisi ini menyebabkan programa yang disusun tidak realistis dan belum mencerminkan kebutuhan petani.
- Belum mendorong kemitraan dengan petani, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keadaan ini menyebabkan keterlibatan dan penumbuhan penyuluh pertanian swakarsa dan swasta, sebagai bagian dari jaringan penyuluhan pertanian, kurang berjalan dengan baik.

- Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih berorientasi keproyekan dan kegiatannya masih bersifat parsial serta belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kebergantungan penyuluhan pertanian pada keberadaan proyek.
- Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah, karena kurangnya dukungan informasi dan keterbatasan sumberdaya. Kondisi ini menyebabkan dinas-dinas lingkup pertanian merasa tidak mendapatkan dukungan kegiatan penyuluhan pertanian.

e) Kondisi Sumberdaya Penyuluhan Pertanian

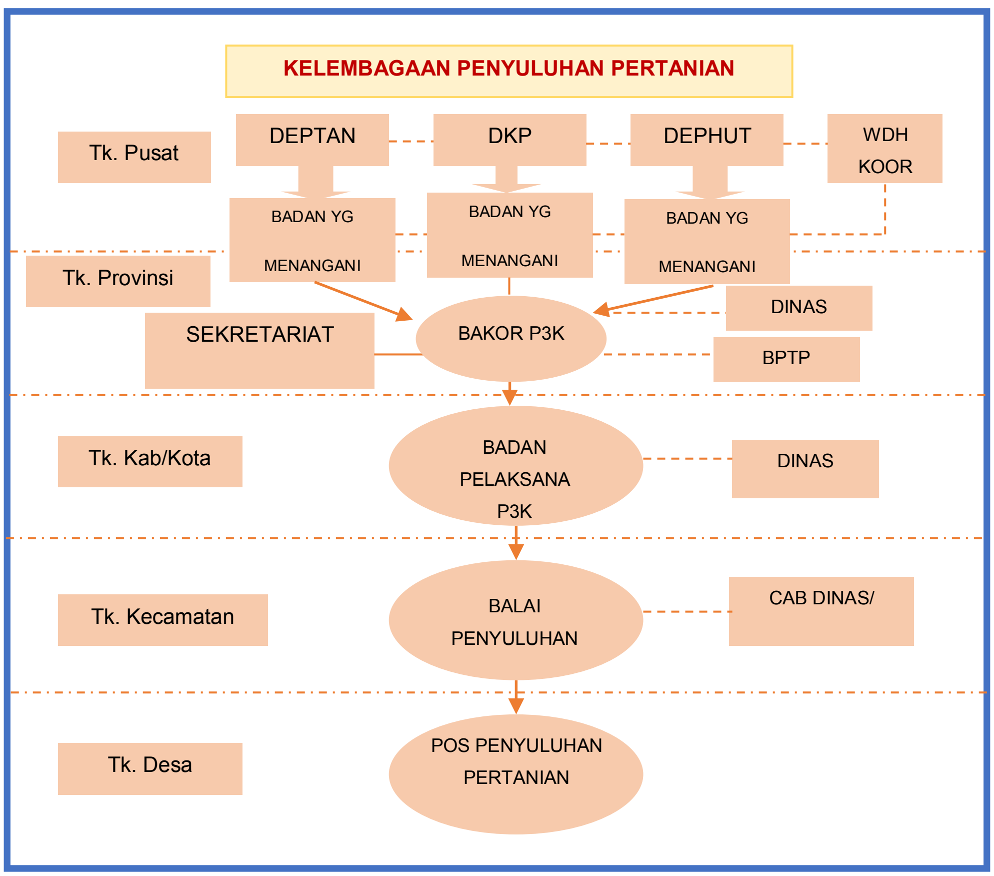
Sumberdaya penyuluhan pertanian sangat diperlukan oleh penyuluh pertanian agar dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan produktif, efektif dan efisien. Sumberdaya penyuluhan pertanian meliputi informasi dan teknologi, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- Sulitnya mendapatkan informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita karena terbatasnya kemampuan penyuluh pertanian untuk mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan penyuluh pertanian untuk menyediakan materi penyuluhan yang dibutuhkan petani.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini

menyebabkan rendahnya mobilitas penyuluh pertanian dan kurang optimalnya pelayanan terhadap petani.

- Pembiayaan penyuluhan pertanian yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota baik melalui dana dekonsentrasi, dana alokasi umum (DAU), dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun kontribusi dari petani dan swasta masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak optimal, yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan program pembangunan pertanian.

4) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian



Gambar 4. Skema Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

5) Model Penyuluhan yang Pernah Dilaksanakan di Indonesia

a) Sistem Kerja Laku

Sistem kerja latihan dan kunjungan (Laku) mulai dilaksanakan pada tahun 1979 yang diintrodusir oleh proyek NFCEP (*National Food Crops Extension Project*) atau proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan Nasional, kemudian dilanjutkan oleh Proyek NAEP (*National Agricultural Extension Project*) atau proyek Penyuluhan Pertanian Nasional Tahap I dan II sampai dengan 1992.

Sistem kerja Laku mempunyai organisasi hierarkhis penyuluhan pertanian yang jelas, dimana seorang PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) akan mengunjungi 16 Wilkel (wilayah kelompok) secara teratur dan berkesinambungan dengan jadwal kunjungan dua minggu sekali. Melalui kunjungan ini seorang PPL diharapkan dapat melayani 20 orang kontak tani dan petani maju. Selanjutnya setiap kontak tani dan petani maju dari setiap Wilkel tersebut akan menyampaikan informasi yang diterimanya dari PPL kepada masing-masing 5 orang petani melalui kelompok domisili, sehingga secara keseluruhan seorang PPL akan dapat melayani 1.600 keluarga tani.

Selanjutnya PPL di WKBPP (Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian) sebanyak 10 – 20 orang akan disupervisi oleh seorang PPM (Penyuluh Pertanian Madya). Di samping itu di setiap BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) akan ada seorang PPM Programer yang tugasnya menyusun programa penyuluhan pertanian WKBPP dan melaksanakan pelatihan PPL di BPP dua minggu sekali.

Di setiap propinsi ada PPS (Penyuluh Pertanian Spesialis) yang akan menjadi manajer penyuluhan pertanian untuk wilayah propinsi. Pada setiap karesidenan ada seorang PPS yang menjadi manajer penyuluhan pertanian untuk wilayah karesidenan. Ia bertanggung

jawab kepada PPS provinsi. Di setiap kabupaten ada beberapa orang PPS sesuai dengan spesialisasi yang dominan di kabupaten tersebut, dan bertugas membantu memecahkan masalah petani yang tidak dapat dipecahkan oleh PPL. PPS kabupaten juga bertugas untuk melatih PPL dalam latihan dua minggu sekali di BPP sesuai dengan bidang keahliannya.

Sistem kerja ini diberlakukan dengan SK Menteri Pertanian No. 240/Kpts/Um/4/1999 tanggal 2 April 1979. Adanya sistem kerja Laku dirasakan bahwa pengelolaan penyuluhan pertanian dan pengembangan organisasi penyuluhan pertanian menjadi lebih baik. Para petani merasa puas karena secara fisik petani merasakan dapat bertemu PPL secara teratur dua minggu sekali, pada hari yang telah disepakati. Mereka merasa mudah juga untuk bertemu penyuluh di luar jadwal pertemuan tersebut karena pada umumnya PPL tinggal di desa wilayah kerjanya. Sehingga dengan penerapan sistem ini terasa adanya peningkatan efektivitas penyuluhan pertanian terutama di areal irigasi. Secara nyata terlihat bahwa sistem kerja Laku mampu menyumbang peningkatan produksi pangan pada saat itu.

Kelemahan pokok dari sistem ini adalah penyuluhan yang sentralistik (dari atas ke bawah) yang diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sering tidak sesuai dengan kondisi setempat, misalnya kondisi pedesaan di pulau Jawa akan berbeda dengan di Nusa Tenggara Timur atau Maluku. Di samping itu dengan sistem ini penyuluh pertanian dianggap hanya sebagai "tukang pos" yang bertugas mengalihkan pesan dari lembaga penelitian ke petani, sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas mereka.

b) SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu)

Sekolah lapangan mulai dilaksanakan pada tahun 1993 melalui proyek PHT (Pengendalian Hama Terpadu) atau IPM (*Integrated Pest Management*) sampai tahun 1999.

Sejak terjadi serangan hama wereng coklat di Indonesia pada tahun 1985 maka dikeluarkanlah Inpres Nomor 3 Tahun 1986 yang melarang penggunaan 57 jenis pestisida untuk padi sawah. Sebagai gantinya digunakan PHT sebagai strategi perlindungan tanaman untuk padi sawah, palawija dan sayuran. Oleh karena itu PHT perlu di masyarakatkan agar petani menjadi ahli PHT di lahan usahanya masing-masing, melalui sekolah lapangan PHT (SLPHT).

Sekolah lapangan PHT dilaksanakan dengan tujuan untuk memasyarakatkan PHT dengan pendekatan ekologis. Ada 4 prinsip yang harus dilakukan petani dalam melaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan, yaitu: 1). budidaya tanaman sehat, 2). pemanfaatan musuh alami, 3). pengamatan mingguan, dan 4). petani ahli PHT.

Untuk memasyarakatkan PHT tersebut dilakukan pertemuan mingguan selama satu musim pertanaman (biasanya 12 kali pertemuan) selama empat jam. Pertemuan mingguan ini dilakukan di lahan usaha dengan urutan kegiatan: 1) pengamatan lahan; 2) diskusi kelompok hasil pengamatan; 3) menyusun laporan hasil pengamatan dalam bentuk gambar-gambar dan simbul; 4) presentasi pleno hasil kelompok; dan 5) penarikan kesimpulan tindakan yang akan diambil bersama oleh kelompok untuk waktu seminggu kedepan dalam rangka pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Pertemuan mingguan dipandu oleh tim yang terdiri dari PHP (Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman) dan PPL. Teknik kepemanduan yang digunakan adalah penerapan dari teknik-teknik adragogi (pendidikan orang dewasa).

Ciri SLPHT adalah: 1). lahan usaha adalah sarana utama kegiatan belajar; 2). cara belajar lewat pengalaman; 3). pengkajian agroekosistem, 4). metode dan bahan bersifat praktis dan tepat guna; 5). kurikulum berdasarkan kebutuhan petani; dan 6). belajar selama satu musim.

Dengan SLPHT selama satu musim ini diharapkan petani menjadi ahli PHT yaitu menerapkan prinsip-prinsip PHT dalam usaha taninya masing-masing dan mengajarkan kepada petani lain. Dengan demikian mereka melaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan.

SLPHT dimulai dengan diadakannya TOT (*Training of the Trainer*) bagi PHP dan PPL sebagai tim pemandu. Lalu dilakukan SLPHT oleh petugas (PHP dan PPL), kemudian SLPHT oleh petani pemandu. Petani pemandu berasal dari alumni SLPHT oleh petugas yang dipilih dan dipersiapkan khusus melalui TOT petani pemandu.

Pemasyarakatan PHT selanjutnya dilakukan melalui pengembangan komunitas yaitu dengan membentuk desa PHT yang kemudian diharapkan berkembang menjadi kecamatan PHT.

Proses penguatan juga dilakukan antara lain melalui pembentukan forum petani PHT, pembentukan asosiasi/paguyuban/organisasi petani PHT dan pembuatan media petani. Contoh berbagai forum petani PHT adalah musyawarah petani, seminar petani, pertemuan teknis petani, dan forum studi petani. Contoh berbagai media yang

dibuat petani PHT adalah surat kabar, buletin, majalah dinding, *leaflet* dan poster.

Kelebihan dari model ini adalah pada proses kepemanduannya, yaitu petani dipandu untuk dapat belajar sendiri di alam yang nyata dalam menentukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Mereka diharapkan mampu mengambil keputusan bersama tindakan apa yang harus mereka lakukan di hari-hari berikutnya dalam mengelola usahanya.

Kelemahannya adalah terjadinya proses kejenuhan dalam belajar, karena rutinitas pertemuan mingguan. Kelemahan kedua adalah belum mulusnya proses pembelajaran oleh *team teaching* sehingga sering hasilnya kurang efektif.

c) FMA (Farmers Managed Activities)

FMA mulai dilaksanakan pada tahun 2000 melalui proyek DAFEP (*Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project*) atau Proyek Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Desentralisasi di 9 propinsi (16 kabupaten) lokasi proyek. Sampai saat ini proyek DAFEP tersebut masih berjalan.

FMA dapat digalang petani untuk membuat sendiri RK (Rencana Keluarga), RUK (Rencana Usaha Keluarga), Rencana usaha kelompok dan rencana usaha desa melalui teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Setelah itu baru disusun RKPD (Rencana Kerja Penyuluhan Desa).

Rencana Keluarga (RK) adalah upaya untuk memutuskan apa yang mereka dapat lakukan dengan cara mengenal diri, keluarga, latar belakang, jumlah keluarga, potensi yang dimiliki, mereka dapat apa, dan mereka biasa apa.

Rencana Usaha Keluarga (RUK) adalah rencana usaha yang disusun dengan cara melihat potensi yang dimiliki, kemudian mereka mau mengembangkan usaha apa, misalnya beternak itik. Setelah diputuskan usaha yang akan dijalankan dilakukan analisis usahanya sesuai potensi yang mereka miliki. Ini dilakukan untuk memperkirakan besarnya pendapatan yang akan diperoleh.

Rencana Usaha Kelompok (RU kelompok) adalah penggabungan dari rencana usaha keluarga. dan rencana usaha desa (RU desa) adalah kumpulan dari rencana usaha kelompok di desa tertentu. Rencana usaha desa akan dapat dipilah masalah-masalah apa yang dapat mereka pecahkan sendiri, dan masalah apa yang pemecahannya memerlukan fasilitasi dari penyuluh pertanian. Berdasarkan masalah yang perlu dipecahkan dengan fasilitasi penyuluh pertanian tersebut kemudian disusun rencana kegiatan penyuluhan desa (RKPD). Waktu pertemuan penyuluh dan kelompok usaha tidak ditentukan seminggu sekali atau dua minggu sekali, tetapi sesuai dengan komitmen mereka.

Kelebihan dari model ini adalah partisipasi petani sangat besar. Mereka difasilitasi untuk dapat mengenali keluarga mereka sendiri, potensinya, lalu memutuskan usaha yang akan mereka lakukan. Mereka juga bebas memilih kelompok usaha dan menyusun rencana usaha kelompok yang selanjutnya akan menyusun Rencana Usaha Desa. Satu desa berpeluang besar untuk menonjolkan usaha yang paling diunggulkan (*one villa get one product*). Mereka juga bebas menentukan perlu tidaknya penyuluhan. Apabila diperlukan maka kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan penyuluh pertanian.

Adapun kelemahannya adalah tingkat kematangan (*maturity level*) petani kita tidak semuanya sudah memenuhi syarat untuk

melakukan model penyuluhan ini. Apabila petani belum matang maka hasilnya lebih banyak dibuat-buat (*artificial*) yang dipaksakan bukannya alamiah, sehingga penyuluhan yang kita laksanakan tidak memecahkan masalah yang sebenarnya.

d) Perbedaan Pendidikan Penyuluhan dan Penerangan

Sebelum memahami lebih jauh tentang perbedaan pendidikan, penyuluhan, dan penerangan, maka perlu mengetahui jenis-jenis pendidikan sebagai berikut:

- Pendidikan formal, yaitu struktur dari suatu sistem pengajaran yang kronologis dan berjenjang mulai dari pra sekolah sampai perguruan tinggi.
- Pendidikan informal, yaitu proses pendidikan yang cara memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lainnya diperoleh dari kehidupan di masyarakat.
- Pendidikan non formal, yaitu pengajaran yang sistematis yang diorganisasi di luar sistem pendidikan formal bagi sekelompok orang untuk memenuhi keperluan khusus.

Para petani yang umumnya tinggal di pedesaan perlu mendapatkan pendidikan tambahan berupa pendidikan non formal, dengan cara mudah, gamblang sehingga dapat menerapkan segala materi yang telah diterimanya dalam praktik kerja atau usaha taninya. Oleh karenanya penyuluhan pertanian lebih tegas terarah pada suatu bimbingan yang mengutamakan dasar-dasar:

- Kebebasan lokasi, yang artinya pemberian materi tidak harus pada ruang tertentu. Akan tetapi, di mana saja, baik di rumah petani, di ladang dapat dilaksanakan asal atas kehendak dan kepentingan para petani.

- Kebebasan kurikulum, yang artinya penyebaran materi dan target waktunya disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan daya tangkap serta tingkat intelektualitas para petani.
- Kebutuhan dan kepentingan petani, yaitu dapat berupa masalah umum yang sedang dihadapi bersama atau masalah khusus yang dihadapi seorang petani.
- Tanpa ada paksaan. Ini berarti sifat pendidikan ini sukarela, bebas menentukan aktivitas usahanya masing-masing, bebas untuk menerapkan petunjuk yang diperolehnya sesuai dengan kepentingan masing-masing.
- Tanpa ada sangsi. Ini karena sifat yang sukarela antara penyuluh dan para petani, bersifat kekeluargaan dan berupa bimbingan, sehingga tidak ada sangsi. Bagi petani yang ingin meningkatkan usahanya maka dipersilahkan untuk menerapkan petunjuk yang diberikan oleh penyuluhnya.
- Pembaharuan dari hal-hal yang baru. Ini berarti bahwa pendidikan non formal akan berlangsung terus dengan aktif selama diketemukan atau terjadinya sesuatu yang baru.

Penjelasan di atas, terdapat kejelasan secara prinsip antara pendidikan dan penyuluhan walaupun tujuan keduanya adalah sama, yaitu mengubah perilaku manusia.

Tabel 4. Perbedaan pendidikan dan penyuluhan

Pendidikan	Penyuluhan
Formal education	Non formal education
Kurikulumnya formal, dan bersifat tetap	Kurikulum tidak formal, disesuaikan persoalan/masalah yang ada pada petani saat itu
Memiliki kewajiban belajar yang formal, dan harus taat dengan aturan yang telah ada	Kewajiban belajar tidak formal, tidak ada aturan formal, bersifat sukarela dan dalam bentuk bimbingan
Tahapan atau alur pelajaran runtut, terarah, jangkauan penguasaan tertentu, dengan jadwal waktu tertentu/tetap	Tahapan sesuai kebutuhan petani, dengan cara petani mengemukakan pengalaman dan problemanya, sedang penyuluh memberikan petunjuk dan bimbingan serta ide baru.
Hubungan pendidik dan pesertra didik formal, dengan jumlah tetap	Hubungan kekeluargaan, dan sama sama aktif berusaha memajukan pertaniannya
Waktu, tempat, dan lamanya formal	Waktu, tempat dan lamanya kapan saja, dimana saja, dan tanpa ada syarat tertentu

Penerangan adalah suatu kegiatan yang hanya sekedar memberi tahu (*to inform*) tanpa mengharapkan bahwa orang yang diberi penerangan akan menerapkan apa yang telah diberitahukannya, sedang propaganda biasanya dilakukan oleh seorang petugas atau agen dari suatu lembaga usaha (misalnya dari pabrik obat pengendali hama/penyakit tanaman), ia menjelaskan tentang merk obat yang dikeluarkan oleh perusahaannya, bagaimana cara memakainya, berapa harga, bagaimana keampuhannya, potongan harga dan lain sebagainya.

Tabel 5. Perbedaan penyuluhan, penerangan dan propaganda

Penyuluhan	Penerangan	Propaganda
Dilakukan secara kontinyu	Dilakukan saat diperlukan/ tidak kontinyu	Dilakukan saat diperlukan/tidak kontinyu
Merupakan kegiatan nyata untuk membantu peningkatan kegiatan yang telah ada	Kegiatan insidental sekedar memberitahukan	Kegiatan insidental di tempat itu sekedar ada kesempatan
Mendorong dan merangsang melakukan perbaikan sendiri dan secara bersama	Bersifat penjelasan	Bertujuan komersial untuk memperoleh pasaran
Mengandung unsur pendidikan	Tidak mengenal bimbingan lanjutan	Tanpa bimbingan lanjutan
Menimbulkan perubahan cara berfikir, cara bekerja, dan cara hidup	Tidak mengenal pelayanan yang praktis	Kadang-kadang menjatuhkan lawan perusahaan/pesain g

c. Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

UNDANG UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. Bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;

b. Bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan;

c. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta

dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;

e. Bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

2. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan

berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

9. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.

12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

13. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

14. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.

15. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.

16. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

17. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

18. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

19. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

23. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

26. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.

27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

30. Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

a. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;

b. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;

c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan

e. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 4

Fungsi sistem penyuluhan meliputi:

a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;

b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;

e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;

f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan

g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

BAB III

SASARAN PENYULUHAN

Pasal 5

(1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.

(2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.

(3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

(1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan.

(2) Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan

b. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 7

(1) Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.

(2) Dalam menyusun strategi penyuluhan, Pemerintah dan pemerintah daerah memperhati kan kebijakan penyuluhan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 8

(1) Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:

a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah;

b. Kelembagaan penyuluhan swasta; dan

c. Kelembagaan penyuluhan swadaya.

(2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. Pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;
b. Pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;
c. Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan
d. Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

(3) Kelembagaan penyuluhan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat.

(4) Kelembagaan penyuluhan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

(5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural.

Pasal 9

(1) Badan penyuluhan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

a. Menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
b. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
c. Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
d. Melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
e. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

(2) Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri.
(3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Pasal 10

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, menteri dibantu oleh Komisi Penyuluhan Nasional.
(2) Komisi Penyuluhan Nasional mempunyai tugas memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 11

(1) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas;

a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
b. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
d. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

(2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.
(3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 12

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi.
(2) Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 13

- Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:

a. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;

b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

- Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 14

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.
(2) Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 15

(1) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;

b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;

c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan

f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

(3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 16

(1) Pos penyuluhan desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

(2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:

a. Menyusun programa penyuluhan;

b. Melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan;

c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;

d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembaga an pelaku utama dan pelaku usaha;
f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
g. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
h. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pasal 17

Kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan;
b. Melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
c. Membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
d. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
e. Menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
f. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
g. Menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
h. Mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pedesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

i. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
j. Melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
k. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 19

(1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal.
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.
(4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang

menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

BAB VI

TENAGA PENYULUH

Pasal 20

(1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya.
(2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 21

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
(3) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 22

(1) Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Alih tugas penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Programa Penyuluhan

Pasal 23

(1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
(2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.
(3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.
(4) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.
(5) Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

Pasal 24

(1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
(2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja dan Metode

Pasal 26

(1) Penyuluh menysun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan.
(2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
(3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Bagian Ketiga

Materi Penyuluhan

Pasal 27

(1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.

(2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 28

(1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

(2) Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.

(3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 29

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 30

(1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.
(2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.
(3) Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.
(2) Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan.
(4) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(5) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
(3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyuluh, pemerintah memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
(4) Setiap penyuluh yang menjadi anggota organisasi profesi tunduk terhadap kode etik penyuluh.
(5) Organisasi profesi penyuluh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan pertimbangan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

(1) Setiap penyuluh PNS yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

(2) Setiap pejabat pemberi rekomendasi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

(3) Setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

(4) Setiap penyuluh swadaya yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum Undang-Undang ini dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 38

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pada tingkat pusat, yang telah ada saat Undang-Undang ini diundangkan harus sudah disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

d. Enam Belas (16) Karakter dan Fungsi Penyuluh

1) Karakteristik Penyuluh

Penyuluh harus memiliki sikap yang apresiasi, penuh pengertian dan respek dengan orang yang akan diajak bekerjasama. Penyuluh harus berbicara dengan bahasa petani. Di Amerika Serikat penyuluh yang sukses karena memiliki latar belakang petani. Disamping itu terdapat juga penyuluh berasal dari orang kota dan mengetahui sedikit tentang pertanian yang masuk universitas, yang orang tuanya tidak mampu.

Kesamaan latar belakang dan karakteristik sosial mempermudah komunikasi antara penghubung dengan sasaran/petani. Kredibilitas penghubung meningkat karena latar belakang pendidikan dan karakter sosial. Gap komunikasi biasanya terjadi karena penghubung berpendidikan tinggi dan tidak mampu berkomunikasi.

Penghubung dari kelas yang sesuai dengan sasaran/petani kadang-kadang dapat menjembatani perbedaan tersebut. Ketika penyuluh pertanian berlaku sebagai petani dan hidup bersama petani maka informasi yang disampaikan mudah dimengerti dan petani yakin serta mempercayai informasi tersebut. Di Taiwan, penyuluh yang lulus SLTA lebih dipercayai petani dan banyak mempengaruhi keputusan petani serta untuk menerima teknologi baru pertanian.

Di beberapa negara, petani lebih mempercayai pada pendeta yang ada di desa. Perbedaan status pendidikan penyuluh harus dicatat sebagai penghambat efektivitas peran terutama berhadapan dengan petani tidak terdidik.

Penyuluh yang status pendidikannya rendah akan menimbulkan komunikasi yang tidak efektif dan tidak dapat bersifat *bottom up* atau terjadi yang atas mendengar yang di bawah. Informasi dari penyuluh

yang berpendidikan tinggi bersifat relatif abstrak dan sulit dimengerti oleh petani.

2) Penyuluh sebagai Penghubung

a) Harus memiliki pengetahuan. Akan lebih baik apabila domisili di lokasi petani. Mampu merasakan perasaan dan mampu menghargai petani, mampu dan memperhatikan persoalan-persoalan petani, baik secara individu maupun secara kelompok.

b) Mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan petani. Misalnya menyangkut soal pertumbuhan tanaman, jenis pupuk, jenis tanah atau tanaman yang cocok ditanam sesuai spesifik lokasi. Jika penyuluh tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan petani tersebut ada kecenderungan penyuluh gagal dalam melaksanakan tugas sebagai pembawa informasi dan penghubung.

c) Penyuluh harus tahu program apa yang cocok dilakukan petani sesuai spesifik lokasi. Petani perlu memahami praktik-praktik sistem pertanian yang membutuhkan modal. Bentuk informasi harus didasarkan pada hasil penelitian spesifik lokasi dan cara inovasinya harus sesuai dengan situasi petani.

d) Mampu mengelola informasi, baik sebagai sumber maupun penerima informasi untuk keberhasilan agribisnis dan agroindustri, seperti informasi penyaluran, pelayanan dan informasi lainnya yang harus tersedia.

e) Bagaimana mempraktikkan informasi, seperti penggunaan ide dan praktik baru yang memerlukan keahlian baru. Kurangnya keahlian/keterampilan mengakibatkan kegagalan mengadopsi ide-ide dan teknologi baru, sehingga penyuluh dapat mengajarkannya untuk memudahkan adopsi ide-ide dan praktik baru.

f) Kepedulian penyuluh adalah bagaimana membantu petani memperjelas tujuan dan apa yang mereka inginkan. Penyuluh harus

tahu persoalan secara luas di masyarakat dan bagaimana individu dapat membantu memberikan solusi sejalan dengan pencapaian tujuan petani itu sendiri.

g) Dimana dan bagaimana petani mendapat masukan yang diperlukan, yaitu harus tersedia fasilitas yang dapat dipakai petani dalam penyaluran dan layanan informasi yang dapat diperoleh dengan murah dan mudah. Penyuluh juga harus mengetahui undang-undang yang mengatur petani.

h) Informasi tentang pendidikan keahlian/keterampilan. Seorang penyuluh harus mampu menjawab semua pertanyaan petani atau tahu dimana petani dapat memperoleh jawabannya.

   Pada saat ini banyak negara dunia ketiga memiliki petugas penyuluh yang tidak memiliki pendidikan formal, tetapi mampu menterjemahkan informasi teknis untuk petani, namun kemudian dilanjutkan dengan peningkatan pengetahuan praktis dan petunjuk terbaru yang menjawab persoalan petani.

3) Petunjuk Untuk Penyuluh

   a) Harus mengerti dan simpati pada petani dan persoalan-persoalan pertanian.
   b) Berusaha menghargai dan memahami sudut pandang petani ketika membantu mereka mempraktikkan teknologi baru dan menemukan solusi bagi masalah-masalah petani.
   c) Kredibilitas penyuluh harus dijaga dengan aktivitas dan hubungan yang membuat petani merasa nyaman.
   d) Penyuluh pertanian mengerjakan banyak hal dalam rangka membantu petani menyelesaikan persoalan dengan cara:
      - Mendengar sungguh-sungguh pendapat petani dan merespon secara baik.

- Menjawab dengan tepat atau mengajukan orang lain untuk menjawab permasalahan yang ditanya oleh petani tersebut.
- Terlibat dalam komunikasi dengan peneliti dan membantu petani mendapat informasi dari sumber penelitian.
- Membantu petani mengolah informasi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan.
- Mampu menentukan tugas dari, oleh, dan untuk siapa hal itu dikerjakan.
- Membuat rencana yang membantu petani, lembaga dan kelompok lainnya dalam usaha proses belajar mengajar.

4) Peran dan Tugas Penyuluh

Peran dan tugas penyuluh sebagai penghubung serta sebagai informasi teknologi dapat didefinisikan dalam 16 peran walaupun dalam praktiknya penyuluh melakukan peran lebih dari jumlah tersebut.



Gambar 5. Peran dan tugas penyuluh sebagai penghubung

a) Pembawa Informasi

Penasihat pertanian mungkin juga berperan membawakan informasi dari sumber penelitian ke petani/pengguna. Bentuk informasi dapat berupa data penelitian, publikasi penyuluhan atau pesan yang disiapkan secara khusus.

Penyaluran informasi ini dapat sebagai respon bagi persoalan petani atau sebagai antisipasi problem yang mungkin akan muncul. Jadi, tugas dasar pembawa informasi ini adalah mengirimkan informasi. Untuk ketetapan tugas tersebut, perlu berkomunikasi dengan petani kemudian menentukan apa sebenarnya yang diperlukan petani.

b) Pendengar yang Baik

Kadang-kadang seseorang merasa putus asa, tidak ada yang mau peduli, tidak ada yang mau mengerti, dan tidak seorang pun yang mau mendengar keluhannya. Pada situasi seperti ini penghubung seharusnya dapat berperan sebagai pendengar keluhan, dan tempat melepaskan ketegangan dan pencurahan masalah mereka.

Penyuluh yang bekerja dekat dengan petani miskin dan tidak berdaya kadang-kadang harus bertindak sebagai pendengar yang simpatik atas masalah-masalah mereka. Selanjutnya membantunya dalam banyak hal selain memberi informasi ilmiah tentang pertanian, sehingga penyelesaian masalah pribadi dapat menjadi pintu masuk dalam pembicaraan di bidang pertanian. Maka dengan demikian penyuluh akhirnya dapat membantu banyak aspek dari persoalan petani.

c) Motivator

Penyuluh kadang-kadang bertanggung jawab untuk memotivasi masyarakat agar berubah. Seorang motivator harus mampu memberi nasihat dan informasi serta membantu petani membuat

alternatif pemecahan masalah agar petani mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Motivator harus membuat asumsi implisit bahwa ia lebih mengetahu dari petani. Motivator bekerja di belakang layar bukan di depan. Biasanya dalam penyampaian informasi motivator berfikir sendiri tetang situasi yang dihadapi, memutuskan dan bertindak. Ia harus berfikir sebagai fasilitator, bukan sebagai peserta. Bahkan harus dapat menciptakan keepercayaan diri dan kemampuan petani untuk menyelesaikan persoalannya tanpa bantuan dari luar.

d) Fasilitator Proses

Tugas fasilitator mirip dengan tugas motivator, tetapi lebih aktif. Tugasnya terfokus pada usaha memfasilitasi pengaruh sumber daya dan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan petani/kelompok sasaran. Tahap adopsi bagi adopter adalah:

- Menyadari adanya ide dan praktik baru.
- Mencari informasi tentang hal tersebut di atas.
- Mengevaluasi dan memutuskan kebaikan dan kelebihannya secara umum dan aspek keuntungannya bagi mereka.
- Mencari informasi tentang cara penggunaannya, mencoba sedikit demi sedikit dan jika berjalan baik maka kegiatan diteruskan.
- Mencoba ide-ide baru.

Apabila proses adopsi dimulai oleh adanya persoalan, maka tahapannya adalah:

- Pengadopsi mencari dan mempertimbangkan solusi alternatif.
- Memutuskan alternatif yang dianggap tepat.
- Menempatkan dan mengumpulkan sumberdaya yang diperlukan.

- Melaksanakan keputusan.
- Mengevaluasi kegunaan dan apa yang sudah dikerjakan, sebagai dasar untuk mencoba yang lain.

Fasilitator mencoba mempercepat proses tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberi ide-ide strategis. Pekerjaan ini perlu banyak waktu untuk berinteraksi. Pertukaran ide akan menjadi ruang yang mempengaruhi aliran informasi dan keputusan. Keharusan fasilitator adalah dapat bekerja dengan orang setempat yang berpengaruh. Perlu membuat kombinasi kerja dengan orang awam, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan kelompok inovator.

e) Penghubung Lembaga

Peran pokok penghubung lembaga adalah menyediakan fasilitas aliran informasi dari sumber penelitian kepada para petani, dan mengkomunikasikan kebutuhan petani pada peneliti. Mereka juga memiliki tugas membuka jaringan untuk lembaga lain, misalnya untuk mendapatkan kredit, penawaran dan melayani lembaga yang menawarkan masukan bagi petani, untuk mengadopsi ide atau praktik yang direkomendasikan.

Apabila terjadi masalah dalam hubungan antar lembaga/berbagai pihak penghubung, lembaga dapat berperan menyelesaikan persoalan ini. Petani yang sulit kontak dengan pemerintah dapat difasilitasi untuk mempertemukan mereka. Hubungan yang integratif dapat menjadi pola saling menguntungkan antara berbagai pihak. Seperti di Taiwan, perguruan tinggi penelitian pertanian, di bawah langsung oleh menteri pendidikan.

Lembaga penelitian pertanian di bawah langsung oleh departemen pertanian dan kehutanan yang akhirnya membentuk hubungan

saling menguntungkan tanpa kesulitan pengurusan kepegawaian. Menghubungkan banyak lembaga inilah yang menjadi tugas penghubung lembaga.

f) Pembentuk Kemampuan

Salah satu tugas penting penyuluhan adalah membentuk kemampuan petani dalam mengambil keputusan sendiri dan kemampuan managemen usaha tani. Di samping itu juga mengajarkan pada petani untuk menggunakan sumber informasi dan sumberdaya yang ada sebagai fasilitas pendukung program/keputusan yang dibuat. Kemampuan manajemen ini dipelajari bukan ditirukan.

Umumnya usaha dilakukan dengan memasukkan pendidikan atau pelatihan sebagai bagian dari program. Apabila usaha ini tidak berhasil, berarti harus ada usaha lain untuk mencapainya seperti peraturan perundang-undangan yang mendukung.

g) Guru Keterampilan

Tidak hanya teori saja yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian juga harus cukup bekal pengetahuan keterampilan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat petani. Akan tidak dipercaya apabila seorang penyuluh hanya mampu berbicara saja tanpa mampu menunjukkan keterampilan yang ia kuasainya.

h) Pekerja Pembantu

Seorang penyuluh apabila berada di masyarakat binaannya juga harus mampu membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat binaannya. Tidak hanya bidang tugasnya saja, namun berbagai bidang dikuasai oleh penyuluh untuk membantu masyarakat binaannya.

i) Administratur Program

Gagasan muncul dari para petani binaannya untuk menjadi suatu program. Gagasan dianalisis bersama antara petani binaan dengan penyuluh. Apabila memungkinkan untuk dilakukan, maka dituangkan dalam suatu tulisan. Tulisan dari suatu rencana inilah yang disebut program.

Seorang penyuluh tidak hanya mampu membuat program untuk kegiatannya. Namun juga harus mampu menuangkan gagasan-gagasan terpilih dari para petani binaannya untuk dijadikan suatu program kerja bersama antara penyuluh dan para petani binaannya.

j) Pekerja Kelompok

Penyuluh yang berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam proses adopsi tidak dapat menghindar dari kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat; seperti keluarga, kelompok antar teman, dan kelompok-kelompok lokal. Penyuluh yang menawarkan informasi, barang dan jasa pada petani harus mempunyai kaitan dengan pihak-pihak lain yang juga berusaha mempromosikan sesuatu. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dan implementasi bagi petani.

Penyuluh dapat membantu apabila dia mempunyai kaitan dengan agen-agen bisnis pertanian atau lembaga penyedia informasi, kredit, input dan jasa-jasa lainnya. Apalagi jika lembaga penyuluhan kurang mempunyai koordinasi yang baik. Penyuluh dapat bertindak untuk kepentingan kelompok petani yang membutuhkan sesuatu dengan kelompok di luar petani. Penyuluh, sebagai penghubung kepentingan petani, harus dapat membantu petani kecil dengan pihak agribisnis untuk mengorganisasikan kepentingan, tujuan dan posisi tawar petani.

Seperti terjadi di Pakistan dengan Camilla Project, di Mexico dengan Pueblo Project serta di India dengan program Pembangunan Pertanian Intensif. Untuk yang terakhir ini telah mengubah sistem struktural dalam kredit, sistem pemasokan dan pengiriman informasi, serta usaha peningkatan produksi pangan. Semua itu diorganisasikan oleh petani sendiri untuk melindungi kepentingan mereka.

k) Penjaga Hubungan

Beberapa agen yang bekerja untuk kepentingan petani kadang-kadang melanggar teritorial agen yang lain. Bila hal ini terjadi maka pemerintah harus menegur mereka yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran dalam aktifitas juga dapat terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penyuluh adalah menegur agen tersebut untuk tidak beraktifitas sebab melanggar tugas agen lainnya.

Alasannya adalah untuk menjaga hubungan yang baik antara petani yang telah dibina oleh agen yang terdahulu. Tugas penyuluh sebagai penjaga hubungan di sini termasuk mempertahankan kewenangan penyuluh serta merencanakan negosiasi dengan agen-agen atau kelompok-kelompok lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah yang dihadapi petani.

l) Promotor

Pada keadaan tertentu, penyuluh memerlukan bantuan dari orang yang dapat mempengaruhi publik dan mengawasi sumberdaya pertanian yang diperlukan. Penyuluh perlu menjaga informasi yang diterima pemuka masyarakat tentang hasil-hasil pekerjaannya. Juga hal-hal yang telah diraih petani sebagai hasil dari pertanian, penyuluhan, dan dukungan mereka. Termasuk dukungan penawaran transportasi, dan fasilitas pemasaran yang dibutuhkan petani.

m) Pemimpin Lokal

Kadang-kadang penyuluh boleh memerhatikan peran dari pemimpin lokal, seperti tokoh politik atau pemimpin organisasi tertentu. Dalam keadaan tertentu mereka dapat digunakan sebagai orang dalam yang dapat membantu mencapai tujuan penyuluhan. Masyarakat membentuk pemimpinnya sendiri dan mempunyai kesadaran kolektif untuk mengatasi masalahnya. Penyuluh tidak dapat menggantikan pemimpin lokal. Akan tetapi penyuluh hendaknya mengidentifikasi pemimpin lokal yang potensial untuk membentuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya.

n) Penasihat

Sebagai konsultan atau penasihat, penyuluh mempunyai peranan sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli/spesialis. Mereka membantu petani dalam mendefinisikan masalah, memikirkan alternatif penemuan sumberdaya, merancang program, dan mengimplementasikan beberapa pemecahan masalah.

o) Pelindung

Penyuluh berperan sebagai pelindung petani miskin dalam penentuan sikap atas anjuran berbagai pihak untuk menggunakan alat-alat tertentu yang secara ekonomis sangat mahal. Pelindung tersebut berperan melindungi petani untuk bertindak berbeda dengan pihak lain jika memang memungkinkan.

p) Pembangun Lembaga

Penyuluh dapat mempengaruhi penyusunan organisasi petani, terutama dalam pelayanan dan urusan kredit. Hal ini dapat dilakukan secara perlahan-lahan (evolusi) dibadingkan dengan secara cepat (revolusi). Petani di AS telah meningkatkan organisasinya dalam penyediaan kredit, informasi, pelayanan dan penyaluran sarana produksi dengan bantuan penyuluh.

5) Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyuluh

Penyuluh yang sukses adalah mengetahui apa yang harus ia kerjakan. Termasuk mengidentifikasikan tanggung jawab secara tepat seperti 16 peran dan tugas tanggung jawab penyuluh yang sudah dijelaskan di atas.

Mengkombinasikan aspek tanggungjawab dan peningkatan pendidikan dan kemampuan penyuluh, akan dapat berhasil membantu petani dalam mengadopsi teknologi pertanian yang baru.

a) Kombinasi Peran yang Dapat Dilakukan dan yang Perlu Dihindari

Ada beberapa peran yang dapat dikombinasikan untuk mengaitkan peneliti dengan petani, dan ada beberapa peran lainnya yang tidak dapat. Penyuluh harus mampu membedakan pertanian berskala besar dan pertanian berskala kecil. Penyuluh menghubungkan informasi dari lembaga penelitian ke petani, demikian sebaliknya informasi dari petani ke lembaga penelitian. Penyuluh harus menjaga hubungan baik antar peneliti dengan petani. Hal ini secara otomatis dapat meningkatkan kredibilitas penyuluh sebagai sumber informasi petani.

Kredibilitas penyuluh dapat ditingkatkan lagi jika penyuluh mencoba merekomendasikan pada petani. Di lain pihak kombinasi peran ini dapat menimbulkan pekerjaan yang berlebihan, antara lain, kerjasama dealer/distributor/penyalur dengan petani dapat juga berjalan dengan baik.

Keduanya dapat meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan kredibilitas satu sama lain. Selain itu dapat pula menimbulkan kerjasama antara developer dengan disseminator dan dengan petani yang dapat meningkatkan kredibilitas penyuluh. Kombinasi peran

yang menimbulkan masalah perlu dihindari antara lain adalah subsidi/intensif dana untuk program-program tertentu. Sebab dengan adanya subsidi/insentif dana tersebut menyebabkan sering mengganggu mutu/kualitas keputusan adopsi ide praktik baru.

b) Pengawasan dalam Mengatur Keterlibatan Petani

Sejak adanya perkembangan menyeluruh dalam pembangunan informasi pertanian khususnya dengan adanya lembaga penelitian pertanian, maka terjadilah penyaluran informasi berbasis ilmu pengetahuan kepada petani. Hampir semua buku memuat informasi hasil penelitian dari para ahli peneliti yang diterima petani. Tetapi arus informasi kemudian berubah menjadi *elitis* kemapanan orientasi dan bersifat *top down*.

Walaupun penyuluh telah mencoba menghubungkan petani dan peneliti (atau sebaliknya), namun tetap terjadi penekanan yang tidak proporsional yang cenderung menekankan informasi dari peneliti ke petani. Mereka seharusnya mendengar dan mengkomunikasikan respon petani dan menjadikan masukan bagi lembaga penelitian.

Para peneliti seharusnya mengirimkan informasi yang diperlukan petani. Petani menginginkan informasi program penelitian baru, baik yang sedang dilaksanakan maupun telah dilaksanakan, juga ingin mengetahui hasil penelitiannya. Satu hal yang penting dilakukan adalah melibatkan petani dalam perencanaan dan supervisi penelitian serta penyebaran hasil penelitian.

Hubungan pendekatan harus diciptakan dengan ciri kesetaraan agar dapat lebih diterima dari pada pendekatan elitis. Penyusunan cara kesetaraan ini lebih membantu adopsi teknologi secara lokal dan dapat memenuhi kebutuhan setiap unit untuk menghasilkan dan

mempraktikkan penemuan ilmiah. Sehingga akan tampak tingkat pemisahan, spesialisasi inovasi, desiminasi dan fungsi integrasi. Ahli peneliti, penyuluh, dan petani bekerjasama dalam usaha pembangunan, desiminasi dan praktik baru.

c) Menyesuaikan Diri dengan Petani adalah Cara yang Terbaik

Penyuluh yang menyesuaikan diri dengan petani biasanya akan lebih cepat membantu petani dalam membuat keputusan mengenai penyusunan program dan pelaksanaan program kegiatan pertanian; dibandingkan kalau penyuluh yang bersangkutan memperlihatkan lebih mengutamakan kepentingan instansinya. Tetapi penyuluh harus dapat memenuhi keinginan keduanya, yaitu keinginan peneliti dan keinginan petani.

Di sini sering terjadi konflik di antara kedua subsistim tersebut, misalnya instansi mengharapkan penyuluh supaya mendorong adopsi teknologi terhadap praktik dalam satu kegiatan tertentu. Akan tetapi petani dan penasihat pertanian tidak menganggap hal itu sebagai kebutuhan mereka. Penyuluh yang tetap bersikap berbeda dengan instansinya akan terancam dipecat atau tidak dinaikkan gajinya, namun jika penyuluh tidak mengambil kebijaksanaan maka penyuluh tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

d) Profesionalisme

Di antara posisi yang sulit bagi penyuluh adalah soal perasaan. Penyuluh sadar bahwa peneliti memiliki gengsi yang tinggi, dan peneliti berfikir petani memiliki posisi yang lebih jelas dibandingkan dengan penyuluh. Paling tidak petani dan peneliti memiliki identifikasi kelompok yang jelas. Mereka mencoba meningkatkan identitas dengan profesionalisme pekerjaan mereka. Tetapi profesionalisme ini sering disalahartikan oleh masyarakat.

Walaupun demikian penyuluh tetap menetapkan status mereka sebagai penyuluh pertanian (penasihat pertanian) dan masuk dalam asosiasi penyuluh.

Dalam kenyataan penyederhanaan tugas penyuluh mengacu pada tugas proses pendidikan dalam rangka meningkatkan teknologi dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyederhanaan ini menekankan pada metode pendidikan, padahal yang diinginkan petani adalah pengetahuan. Ada keengganan untuk melakukan sesuatu atas nama petani, karena profesionalisme penyuluh ini tidak dihargai seperti yang diharapkan.

Hal ini bisa menjadi hambatan tugas penyuluh. Sebenarnya superioritas metode pendidikan tidak berarti ditolak. Namun ketidaksesuaian dari apa yang diinginkan penyuluh dan petani atas kebutuhan adopsi (petani ingin yang teknis/praktis, sedangkan penyuluh ingin metode pendidikan yang tidak praktis). Tidak bisa jadi alasan untuk tidak membantu petani. Penyuluh harus tetap membantu petani, apapun masalah yang mereka hadapi, baik individual atau kolektif, dan menyerahkan pada pihak lain apabila tidak mampu mengatasinya.

a. Organisasi, Strategi dan Tahapan Membagun Kelembagaan

1) Pengertian Organisasi

Kita semua tentu pernah terlibat dalam berbagai organisasi seperti: sekolah, perkumpulan, kelompok masyarakat, perusahaan niaga, badan pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Walaupun demikian tidaklah mudah untuk menyatakan apa yang dimaksud dengan organisasi. Berikut ini beberapa gambaran apa yang terkandung dalam organisasi.

Koordinasi. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa gagasan organisasi berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya seorang diri. Individu, terutama dalam masyarakat modern, merasa ia bahwa kurang mampu, kurang tenaga, kurang waktu, dan tidak berdaya apabila harus memenuhi sendiri kebutuhan dasar seperti makanan, perlindungan, dan keselamatannya. Baru setelah beberapa orang mengkoordinasikan usaha bersama, mereka merasa lebih banyak berhasil daripada kalau mereka melakukannya sendiri-sendiri. Salah satu gagasan dasar konsep organisasi ialah koordinasi usaha untuk saling membantu.

Tujuan bersama. Agar koordinasi itu bermanfaat harus ada tujuan yang hendak dicapai, dan kata sepakat mengenai tujuan itu, sehingga gagasan penting kedua yang melandasi konsep organisasi ialah mencapai tujuan atau maksud bersama melalui koordinasi kegiatan.

Pembagian kerja. Pada setiap masyarakat atau bangsa terdapat macam-macam organisasi dan lembaga ekonomi, politik, agama, dan pemerintahan. Masing-masing unit yang besar itu kita melihat banyak unit yang lebih kecil seperti perusahaan swasta, partai politik, dan pemerintahan daerah. Masing-masing unit itu kita melihat kelompok-kelompok manusia yang lebih kecil yang berupa organisasi, seperti bagian produksi dan penjualan dari suatu perusahaan, golongan-golongan dalam partai politik, kepolisian kota, dan sebagainya.

Dasar pemikiran tentang pembagian kerja, yang merupakan sifat ketiga yang umum dalam organisasi manusia. Gagasan yang terdapat dalam konsep koordinasi dan pencapaian tujuan yang disepakati bersama ialah bahwa tujuan dapat dicapai dengan baik jika orang-orang melakukan pekerjaan yang berbeda-beda dengan cara yang terkoordinasi. Masyarakat manusia menyadari bahwa cara terbaik

untuk mencapai tujuan mereka ialah membagi tugas yang harus diselesaikan di antara para anggotanya.

Integrasi. Konsep keempat atau yang terakhir yang diperlukan untuk memahami organisasi erat hubungannya dengan gagasan diferensiasi dan pembagian kerja, Apabila bagian yang berbeda-beda melaksanakan hal yang berbeda-beda, maka akan diperlukan faktor pemandu (pengintegrasi) untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja ke arah tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Bentuk integrasi yang paling khas ialah hirarki atau jenjang kewenangan suatu sistem bagi para atasan untuk menjamin bahwa ada koordinasi antara bagian-bagian melalui pembimbingan, pembatasan, pengendalian, informasi dan cara-cara lain untuk mengecek kegiatan mereka.

Berdasarkan gagasan yang dikemukakan di atas, kita dapat merumuskan suatu definisi awal bahwa organisasi adalah: koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Schein, 1985). Schein juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling bergabungan satu bagian dengan bagian lain dan bergantung pada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya Kohler, Anatol, dan Applbaum (1976) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Wright (1977) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Walaupun ketiga pendapat menilai organisasi tersebut kelihatan berbeda-beda perumusannya, tetapi ada tiga hal yang sama-sama dikemukakan yaitu: organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordiniasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Dikatakan merupakan suatu sistem karena organisasi itu terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung satu sama lain. Apabila suatu bagian terganggu maka akan berpengaruh pada bagian lain.

2) Organisasi Kelompok tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya.

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan "dari, oleh dan untuk petani", organisasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Ciri Kelompok tani

- Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota,
- Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani,

- Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

b) Unsur Pengikat Kelompok tani

- Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya,
- Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya,
- Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya,
- Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurangnya sebagian besar anggotanya,
- Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

c) Fungsi Kelompok tani

- Kelas belajar; Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.
- Wahana kerjasama; Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain.
- Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

- Unit Produksi; Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

3) Penumbuhan Kelompok tani

Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut bergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluh pertanian diarahkan menuju bentuk kelompok tani yang semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya.

Kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, dapat berupa satu atau lebih, satu desa atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan bergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani di wilayah tersebut.

Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah anggota kelompok tani 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola bergantung kepada kesempatan anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen),

Penumbuhan kelompok tani tersebut perlu diperhatikan kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga dapat merupakan faktor mengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati menfaat sebesar-sebesarnya dari apa yang ada dalam kelompok tani.

4) Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompok tani

Penumbuhan kelompok tani didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu dapat tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompok tani,
b) Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha;
c) Partisipatif, artinya semua anggota terblibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) kelompok tani,
d) Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelompok tani.
e) Kesetaraan, artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar;

f) Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

5) Langkah-langkah Penumbuhan Kelompok

a) Pengumpulan data dan informasi, yang meliputi antara lain:
   - Tingkat pemahaman tentang organisasi petani;
   - Keadaan petani dan keluarganya;
   - Keadaan usaha tani yang ada;
   - Keadaan sebaran, domisili dan jenis usaha tani;
   - Keadaan kelembagaan masayarakat yang ada.

b) Advokasi (saran dan pendapat) kepada para petani khususnya tokoh-tokoh petani setempat serta informasi dan penjelasan mengenai:
   - Pengertian tentang kelompok tani, antara lain mengenai; Apa kelompok tani, tujuan serta manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha tani serta hidup bermasyarakat yang lebih baik.
   - Proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan/membentuk kelompok tani,
   - Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota kelompok serta pengurusnya,
   - Penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok.

   Penumbuhan/pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok tani dituangkan dalam berita acara pembentukan

kelompok tani. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompok tani sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Penumbuhan kelompok tani yang mantap memerlukan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para petani yang akan membentuknya. Pembentukan kelompok tani yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat mengakibatkan turunnya minat calon anggota, dan hal ini harus dihindarkan.

Sebagi tindak lanjut dari penumbuhan/pembentukan kelompok tani dan pemilihan pengurus maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja kelompok.

6) Pengembangan Kelompok Tani

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain:

c) Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggara kan secara berkala dan berkesinambungan;
d) Di susunannya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
e) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
f) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;
g) Memfasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;

h) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
i) Sebagai sumber serta layanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
j) Adanya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain;
k) Adanya penambahan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

7) Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani

Peningkatan kemampuan kelompok tani dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

a) Kelas Belajar

Agar proses belajar mengajar tersebut dapat berlangsung dengan baik, kelompok tani diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- Menggali dan merumuskan keperluan belajar;
- Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
- Menjalin kerja sama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
- Berperan aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi/ konsultasi kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
- Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota kelompok tani;

- Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok tani;
- Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok, antar kelompok tani atau dengan instansi/lembaga terkait.

b) Wahana Kerja Sama

Sebagai wahana kerja sama, hendaknya kelompok tani memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama,
- Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama,
- Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama,
- Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota,
- Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota,
- Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain;
- Menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan,
- Mengadakan penambahan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota kelompok.

c) Unit Produksi

Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi;
- Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani para anggotanya sesuai dengan rencana kegiatan kelompok;
- Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang tetrkait dalam pelaksanaan usaha tani;
- Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- Mengelola administrasi secara baik.

8) Peningkatan Kemampuan Anggota Kelompok Tani

Upaya peningkatan kemampuan para petani sebagai anggota kelompok tani meliputi:

a) Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipasif (dari, oleh dan untuk petani);

b) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalannya yang tersedia;
c) Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya;
d) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
e) Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengeloala usaha tani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
f) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
g) Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi lokal spesifik;
h) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

9) Penyelenggaraan Pengembangan Kelompok Tani

Dalam pengembangan kelompok tani, pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangngnya prakarsa dan inisiatif para petani, memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. Pengembangan kelompok tani diselenggarakan di semua tingkatan:

a) Tingkat Desa

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat desa adalah Kepala Desa, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah tersebut dengan kegiatan-kegiatan, yaitu:

- Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompok tani,
- Menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha tani,
- Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan PRA, penyusunan rencana definitive kelompok (RDK) dan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK),
- Penyusunan programa penyuluhan pertanian desa/kelurahan,
- Mengajarkan berbagai ketrampilan usaha tani serta melakukan bimbingan penerapannya,
- Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik,
- Menginventarisir masalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh kelompok tani dan anggota untuk dibawa dalam pertemuan di balai penyuluhan pertanian (BPP)
- Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan kelompok tani yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya.
- Menumbuhkembangkan kemampuan manejerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- Memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok tani serta pembinaannya;

- Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug kontak tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);

b) Tingkat Kecamatan

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan adalah camat, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh kepala BPP atau koordinator penyuluh pertanian yang berada di wilayah kecamatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan programa penyuluhan pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan programa penyuluhan pertanian desa dan atau unit kerja lapangan;
- Memfasilitasi terselenggaranya programa penyuluhan pertanian desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja BPP;
- Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
- Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usaha tani;
- Melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani yang menguntungkan ;
- Mensosialisasikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani;
- Melaksanakan forum penyuluhan tingkat kecamatan (musyawarah/ rembug kontak tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
- Memfasilitasi kerja sama antara petani, penyuluh dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha tani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;

- Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- Menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
- Memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok tani serta pembinaannya;
- Menginventarisasi kelompok tani dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kecamatan/balai penyuluhan pertanian.

c) Tingkat Kabupaten/kota

Penanggungjawab pengembangan kelompok tani di tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan dibantu oleh kepala dinas/instansi terkait di tingkat kabupaaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan programa penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di Kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan/desa;
- Melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usaha taninya;
- Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun serta terlaksananya berbagai forum kegiatan;
- Menginventarisasi kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten/kota;

- Melakukan bimbingan dalam rangka pengembangan kelompok tani.

d) Tingkat Provinsi

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat provinsi adalah gubernur, sedang penanggung jawab operasionalnya dilaksanakan oleh sekretaris badan koordinasi penyuluhan pertanian provinsi. Apabila belum terbentuk badan koordinasi penyuluhan pertanian penanggungjawab operasional pengembangan kelompok tani dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan program penyuluhan pertanian provinsi yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten/kota;
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektorat, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan kelompok tani, GAPOKTAN serta kelembagaan tani lainnya baik formal maupun non formal;
- Melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan, pembinaan kelompok tani, GAPOKTAN serta kelembagaan tani lainnya;
- Menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pembinaan kelembagaan tani pada khususnya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada umumnya;
- Menginventarisasi kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah provinsi.

e) Tingkat Pusat

Penanggung jawab pembinaan di tingkat pusat adalah Menteri Pertanian dengan penanggung jawab operasional Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan programa penyuluhan pertanian pusat yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di pusat dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat provinsi;
- Menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani;
- Menyusun pedoman, menetapkan standar, norma dan kriteria penilaian kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya;
- Menyelenggarakan bimbingan serta memfasilitas pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan identifikasi, pengolahan dan analisa data kelembagaan tani serta melakukan berbagai kajian untuk penyempurnaan penetapan kebijakan serta penyusunan pedoman, standar dan kriteria penilaian kelembagaan tani;
- Memfasilitas pelatihan pengembangan kepemimpinan petani.

10) Penyelenggaraan Pengembangan Gabungan Kelompok tani (Gapoktani)

a) Fungsi Gapoktan

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Penggabungan dalam GAPOKTAN terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang

kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja GAPOKTAN sedapat mungkin di wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota.

Penggabungan kelompok tani ke dalam GAPOKTAN dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.

Pembentukan GAPOKTAN dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri minimal oleh para kontak tani/ketua kelompok tani yang akan bergabung, setelah sebelumnya di masing-masing kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam GAPOKTAN. Pada rapat pembentukan GAPOKTAN sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusannya, ketentuan-ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing kelompok Ketua GAPOKTAN dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan GAPOKTAN lainnya, Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan GAPOKTAN dikukuhkan oleh pejabat wilayah setempat.

GAPOKTAN melakukan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

- Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga);
- Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, kualitas, kontinuitas dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
- Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan;

- Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

b) Pengembangan kelompok tani

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Gapoktan yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain:

- Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- Disusunnya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
- Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
- Memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapih;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- Memfasilitas usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;

- Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain;
- Adanya penambahan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

11) Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

a) Unit Usaha tani

Agar kegiatan usaha tani petani dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- Menyusun rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani kelompok tani sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
- Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani;
- Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;

- Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
- Mengelola administrasi secara baik;
- Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Gapoktan;
- Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan diskusi secara baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait.

b) Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani petani dan kelompok tani;
- Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian.
- Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian;
- Mengembangkan kemampuan anggota Gapoktan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian;
- Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota Gapoktan ke dalam unit-unit usaha pengolahan.

c) Unit usaha sarana dan prasarana produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya;
- Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (pabrik dan kios saprotan);

- Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana produksi pertanian;
- Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.
- Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.

d) Unit usaha pemasaran sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:
   - Mengidentifikasi, menganalisa potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/ diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar.
   - Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar.
   - Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar;
   - Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian;
   - Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
   - Menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian;
   - Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

e) Unit usaha keuangan mikro

Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- Meningkatkan kemampuan anggota Gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;
- Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;

Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

3. Refleksi

Setelah membaca informasi diatas, apa yang anda catat sebagai pengingat Anda dari bacaan diatas:

No	Pokok Bahasan	Catatan penting
1	Sejarah, revitalisasi penyuluhan pertanian	
2	Peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian	
3	Perbedaan pendidikan, penyuluhan dan penerangan	

No	Pokok Bahasan	Catatan penting
4	UU No 16 th 2006	
5	16 karakteristik dan fungsi penyuluh	
6	Organisasi di tingkat petani, strategi dan tahapan membangun kelembagaan	
7	Membentuk dan mengembangkan kelompok	

4. Tugas

Lakukan tugas yang diberikan guru seperti tertuang berikut ini:

No	Jenis	Kegiatan
1	Mengamati	Baca atau carilah informasi terkait sejarah dan peran penyuluhan pertanian dari berbagai sumber yang dapat anda peroleh kemudian buatlah: • Paper tentang sejarah dan peran penyuluhan pertanian • Paper tentang revitalisasi penyuluhan pertanian
2	Menanya	Melakukan diskusi dengan kawan sekelas tentang: • Perbedaan penyuluhan, pendidikan, penerangan

No	Jenis	Kegiatan
3	Mengumpulkan informasi	• Laporan tertulis kegiatan sosialisasi UU No 16 tahun 2006 • Bahan persentasi tentang UU No 16 tahun 2006
4	Mengasosiasi	Membahas dan menganalisis hasil informasi tersebut, hubungkan hasil pengamatan dan informasi yang berupa fakta dengan teori yang anda peroleh dari buku-buku.
5	Mengkomunikasikan	Membuat tayangan untuk presentasi hasil pengamatan, diskusi, dan penyimpulan untuk dipresentasikan didepan kelas dan mintakan tanggapan dari guru

5. Test Formatif

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda X pada jawaban yang tersedia A/B/C/D ubtuk tiap nomor pertanyaan.

No	Soal
1	Kegiatan penyuluhan yang dimulai dengan didirikannya BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa) yaitu pada tahun…. A. 1947 B. 1957 C. 1967 D. 1977
2	Salah satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi penyuluhan pertanian adalah telah keluarnya …. A. UU RI No 15 tahun 2005 B. UU RI No 16 tahun 2005 C. UU RI No 15 tahun 2006 D. UU RI NO. 16 tahun 2006
3	Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 menyebutkan perlu adanya…. A. Penataan kelembagaan dan kontribusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah B. Penataan kelembagaan di tingkat petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha C. Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan

No	Soal
	D. Penataan kelembagaan para penyuluh pertanian PNS, penyuluh swasta, dan petanitani pelaku utama
4	Petani didorong untuk membuat sendiri RK (Rencana Keluarga), RUK (Rencana Usaha Keluarga), Rencana usaha kelompok dan rencana usaha desa, kemudian disusun RKPD (Rencana Kerja Penyuluhan Desa) adalah merupakan model penyuluhan…. E. Dem-Plot (demontrasi plot) F. FMA (farmer managed activities) G. La-Ku (latihan dan kunjungan) H. SL-PHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)
5	Sentralistik adalah merupakan kelemahan dari sistem kerja…. A. FMA (*Farmers Managed Activities*) B. La-Ku (latihan dan kunjungan) C. PRA (*Participatory Rural Appraisal*) D. SL-PHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)
6	Orientasi peningkatan nilai tambah hasil pertanian pada kegiatan penyuluhan pertanian adalah merupakan tujuan pembangunan pertanian jangka…. A. Lama B. Menengah C. Panjang D. Pendek
7	Menurut Van den Ban, 1999, tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk …. A. Meningkatkan kemampuan petani B. Meningkatkan perilaku petani C. Mengubah kemampuan bertani D. Mengubah perilaku petani
8	Penyelenggaraan penyuluhan pertanian semasa orde baru dengan pendekatan dipaksa-terpaksa-biasa, sedang masa otonomi daerah penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan…. A. Demokrati B. Kooperatif C. Partisipatif D. Sentralistik
9	Penyelengaraan penyuluhan yang didukung para penyuluh yang masih muda, pendekatan la-ku, sifat sentralistik, petani mendapatkan subsidi, sarana prasarana yang memadai, adalah merupakan keberhasilan program…. A. Bimas B. Ektensifikasi

No	Soal
	C. Inmas D. Intensifikasi
10	Demokrasi, manfaat, ke-setaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat adalah merupakan…. A. Azas penyuluhan B. Fungsi penyuluhan C. Sasaran penyuluhan D. Tujuan penyuluhan
11	Kebijakan penyelenggaraan penyuluh n dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara…. A. Mandiri dengan program yang dibuat sendiri oleh para penyelenggara penyuluhan B. Mandiri dengan programa yang dibuat bersama dengan tingkat administrasi pemerintahan yang ada C. Terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat adminis-trasi pemerintahan. D. Terintegrasi dengan program yang ada pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan
12	Jika digambarkan dalam skema kelembagaan penyuluhan pertanian, BPP (balai penyuluhan pertanian) berada pada administrasi pemerintahan tingkat…. A. Desa B. Kabupaten C. Kecamatan D. Propinsi
13	Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh…. A. penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta, dan atau penyuluh swadaya. B. penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta, dan atau penyuluh kelompok C. penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), dan atau penyuluh swadaya, penyuluh kelompok D. penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh perusahaan, dan atau penyuluh swadaya.
14	Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyuluhan pertanian, disediakan oleh…. A. Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta,

No	Soal
	dan kelembagaan penyuluhan swadaya B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kelembagaan swadaya C. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan D. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyelengara penyuluhan
15	Wiriaatmadja (1973) menyatakan bahwa penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut.... A. Pendidikan formal B. Pendidikan in formal C. pendidikan non formal. D. Pendidikan semi formal
16	Tujuan penyuluhan jangka panjang, yaitu agar tercapai peningkatan taraf hidup petani, tujuan ini dapat dicapai apabila petani melakukan *better*.... A. *Farming, bussines, environment, community, condition* B. *Farming*, *bussines*, *living*, *community, environment* C. *Farming*, *bussines*, *living, community, condition* D. *Farming, community, living, environment, condition*
17	Bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia adalah merupakan…. A. Falsafah penyuluhan B. Manfaat penyuluhan C. Sasaran penyuluhan D. Tujuan penyuluhan
18	Memfasilitasi proses pembe-lajaran pelaku utama dan pe-laku usaha adalah merupakan.... A. Azas system penyuluhan B. Fungsi system penyuluhan C. Manfaat system penyuluhan D. Sasaran system penyuluhan
19	Jika: dilakukan saat diperlukan/ tidak kontinyu, kegiatannya incidental sekedar memberitahukan, bersifat penjelasan, tidak mengenal bim-bingan lanjutan, tidak mengenal pelayanan yang praktis adalah merupakan kegiatan.... A. Pendidikan B. Penerangan C. Penyuluhan D. Propaganda

No	Soal
20	Ada 16 peran dan tugas penyuluh sebagai penghubung,, yang tidak termasuk didalamnya adalah.... A. Pembentuk kemampuan B. Pencari modal C. Penghubung lembaga D. Penjaga hubungan

C. Penilaian

No	Ranah	Bukti	Keterangan
1	Sikap	Mengamati sopan santun saat dialog dengan orang lain	Dapat dilakukan oleh siswa lain
		Dominasi pembicaraan, mempertahankan pendapatnya, bahasa dalam diskusi,	Diamati oleh guru
		saling menghargai dalam diskusi,	
2	Pengetahuan	Kemampuan menyimpulkan isi teks	Dinilai oleh guru
		Kemampuan mengkolaborasikan isi teks dan temuan hasil wawancara maupun sumber lain menjadi kalimat utuh	
3	Ketrampilan	Ketrampilan berkomunikasi (pertanyaan yang tepat konten, dan bahasa) dalam menggali informasi dari orang lain	Dinilai oleh guru
		Ketrampilan presentasi	

Dengan instrumen penilaian sebagai berikut:

Petunjuk:

Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai apakah sudah melaksanakan sikap/pengetahuan/keterampilan. Berilah tanda cek (√) pada

kolom skor sesuai sikap/pengetahuan/ keterampilan yang sudah diterapkan sendiri, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

No	**Aspek Pengamatan Sikap/Pengetahuan/Ketrampilan**	**Skor**			
		1	**2**	**3**	**4**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
	Jumlah Skor				

Petunjuk Penskoran:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{Skor}{Skor\ Tertinggi}\ x\ 4 = skor\ akhir$$

Contoh:

Skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir:

$$\frac{14}{20}\ x\ 4 = 2{,}8$$

Kriteria Perolehan nilai:

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 3,20 – 4,00 (80 – 100)

Baik : apabila memperoleh skor 2,80 – 3,19 (70 – 79)

Cukup : apabila memperoleh skor 2.40 – 2,79 (60 – 69)

Kurang : apabila memperoleh skor kurang 2.40 (kurang dari 60%)

Kegiatan Pembelajaran 3. Komunikasi Efektif

A. Deskripsi

Kegiatan belajar 3 komunikasi efektif akan berisi prinsip dasar komunikasi, jenis komunikasi, teknik menyimak efektif, menjadi pendengar yang baik, melakukan komunikasi efektif, menyiapkan diri berbicara efektif, menyusun dan menjawab pertanyaan secara efektif

B. Kegiatan Belajar

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kompetensi dasar ini, diharapkan:

a. Mampu memahami jenis komunikasi;
b. Mampu menyimak secara efektif;
c. Mampu menjadi pendengar yang baik;
d. Mampu melakukan komunikasi secara efektif
e. Mampu menyusun dan menjawab pertanyaan secara efektif.

Kegiatan Siswa

Kepada para siswa diminta untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau dengan uraian pendekatan dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data/mencoba, mengasosiasikan/menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil kegiatannya:

No	Uraian Pendekatan	Kegiatan	Waktu
1	Mengamati	• Mencari informasi dari berbagai sumber tentang komunikasi efektif	2 jp dan terstruktur
2	Menanya	• Berdiskusi tentang dasar, komponen, bentuk, teknik, penyajian, karakteristik komunikasi efektif	2 jp
3	Mengekspresikan/ mengumpulkan data	• Lakukan pencarian data dari tokoh Mengamati proses komunikasi dari berbagai sumber	terstruktur
4	Mengasosiasikan	• Menyimpulkan hasil diskusi bagaimana komunikasi efektif	2 jam
5	Mengkomunikasikan	• Melakukan komunikasi efektif	2jam

2. Uraian Materi

a. Prinsip Dasar Komunikasi

1) Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin, *communicatio,* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna.

Murdhy Dennis yang dikutip dari buku "Better Business Communication merumuskan sebagai berikut: Komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk memahami pikiran-pikiran yang dimaksud oleh orang lain. *(communication is the whole process in reaching other's minds)*

Menurut Harwood Secara teknis komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk memadukan ingatan-ingatan/pikiran-pikiran. *(communication is more technically defined as a process for conduction the memories).*

Harold Lasswell menjelaskan bahwa cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: Siapa mengatakan apa; dengan saluran apa; kepada siapa; dengan pengaruh bagaimana? *(Who says what in which channel to whom with what effect?).*

Definisi komunikasi secara umum:

Proses kegiatan pengoperan/penyampaian berita/informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik.

2) Unsur - Unsur Komunikasi

Untuk dapat melakukan komunikasi maka dalam proses terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Komunikator (Communicator)
b) Komunikan (Communicant)
c) Pesan atau esensi komunikasi (Contents)
d) Adanya interaksi langsung maupun tidak langsung (Interaction)
e) Penggunaan media komunikasi (the use of media)
f) Adanya pemahaman bersama akan esensi dan tujuan komunikasi (mutual understanding)

Menurut cara berbicara komunikasi dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi jarak

Komunikasi berbicara langsung atau ace *to face,* dan berbicara tidak langsung.

b) Ditinjau dari segi sarana/saluran/media yang dipergunakan

   Komunikasi berbicara dapat melalui surat, telepon (SLJJ, SLI), melalui radio, melalui televisi, E-Mail, melalui internet, sandi, SMS dll.

c) Ditinjau dari segi tujuan

   Komunikasi berbicara dalam seminar, semi loka, diskusi panel, rapat kerja, santiaji, kampanye, konferensi, workshop, penataran (sebagai penatar atau sebagai peserta), dalam kelas, wawancara dll). Aapabila ditinjau dari segi tujuan ini dapat dibedakan adanya pemberian informasi, pengumpulan informasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, penjualan informasi.

d) Ditinjau dari segi kedinasan

   Komunikasi yang membicarakan soal kedinasan (antara sesama rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan), berbicara soal pribadi.

e) Ditinjau dari segi bahasa yang digunakan

   Komunikasi dengan berbicara melalui bahasa lisan/dengan ucapan kata-kata atau kalimat yang diucapkan dan diperjelas dengan tinggi rendahnya nada suara, keras dan lembutnya suara.

f) Ditinjau dari segi lawan berbicara

   Komunikasi dengan berbicara satu lawan satu, satu lawan banyak, satu lawan kelompok, kelompok lawan satu.

g) Ditinjau dari segi hierarchi

   Downward Communication atau komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang turun dari satu level ke level yang lebih rendah, secara perlahan-lahan menuju ke bawah.

h) *Upward Communication* atau komunikasi ke atas yaitu komunikasi dengan atasan.

i) *Horizontal Communication/Lateral Communication* yaitu komunikasi antar teman sekerja (*co-worker*), antar bagian, atau dengan teman kerja lainnya, pimpinan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, sesama tua, sesama muda, orang tua dengan orang muda.

b. Jenis Komunikasi

1) Komunikasi Verbal

Sebagian waktu kegiatan umat manusia setelah bangun dari tidur waktunya 70 % dihabiskan untuk kegiatan berkomunikasi. Menurut ahli komunikasi, D. Tanner, komunikasi terdiri dari empat kegiatan yaitu 42% mendengarkan; 32% berbicara; 15% membaca dan 11% menulis. Kemajuan teknologi komunikasi membuat umat manusia yang sebelumnya tidak pernah membayangkan jika suatu saat manusia akan mungkin hidup di dunia maya, tidak memerlukan kontak mata dan tidak bergaul lagi sebagaimana yang kita alami sekarang ini akan terbukti. Mudah mudahan gaya hidup dengan memanfaatkan dunia maya tidak akan pernah terjadi di negeri ini, di mana kekayaan bahasa dan keragaman budaya masih tetap terpelihara oleh generasi sekarang. Budaya memberi salam ketika berjumpa dengan teman atau kenalan masih tetap kita pertahankan, dan kondisi seperti itu mempermudah kita menjalin komunikasi.

Kelancaran berkomunikasi bagi setiap orang berbeda-beda, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya:

a) Faktor pengetahuan

Makin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka ia makin banyak perbendaharaan kata yang dapat memberikan dorongan bagi yang bersangkutan untuk berbicara lebih lancar.

b) Faktor pengalaman

Makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, makin menyebabkan seseorang terbiasa menghadapi sesuatu. Orang yang sering menghadapi massa, sering berbicara dimuka umum, akan lancar berbicara dalam keadaan apapun dan dengan siapapun.

c) Faktor inteligensi

Orang yang intelegensinya rendah, biasanya kurang lancar dalam berbicara, karena kurang memiliki kekayaan perbendaharaan kata dan bahasa yang baik. Cara berbicaranya terputus-putus, bahkan antara kata yang satu dengan lainnya tidak/kurang adanya relevansi.

d) Faktor kepribadian

Orang yang mempunyai sifat pemalu dan kurang pergaulan, biasanya kurang lancar berbicara.

e) Faktor biologis

Kelumpuhan organ berbicara dapat menimbulkan kelainan-kelainan, seperti:

- Sulit mengatakan kata desis (lisping), karena ada kelainan pada rahang, bibir, gigi
- Berbicara tidak jelas (sluring), yang disebabkan oleh bibir (sumbing), rahang lidah tidak aktif.
- Berbicara ragu-ragu, gagap yang disebabkan tidak biasa berbicara dengan orang banyak, sifat pemalu.

2) Komunikasi Non Verbal

Komunikasi sebenarnya adalah transfer pesan dari A kepada B atau dari R ke S. Terkait dengan proses pengiriman pesan, maka medium atau saluran, transmiter, penerima, gangguan dan umpan balik merupakan unsur yang sangat berpengaruh hingga pesan tersebut dapat dipahami oleh penerima pesan. Lazimnya proses seperti itu lebih kita kenal dalam komunikasi verbal, di mana maksud atau pesan yang hendak disampaikan harus melalui proses komunikasi.

Bersalaman, merupakan kebudayaan yang sudah sejak zaman kuno dilakukan manusia. Semutpun diumpamakan orang sebagai contoh hubungan komunikasi yang sangat akrab, setiap bertemu mereka saling menyapa dan bersalaman.

Bahasa Badan, adalah konstruksi manusia yang menggunakannya dan hanya dapat dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu bahasa badan yang bersifat fisik tersebut dapat dipersepsi indra kita dengan tepat, tetapi mungkin juga persepsi itu keliru, jika yang menggunakan bahasa badan tersebut tidak memaknai bahasa badan yang sudah lazim dan mendasar. Bergantung dari bagaimana yang dimaksudkan oleh pemberi pesan dalam bahasa badan. Berikut ini adalah contoh bahasa badan yang lazim dikenal sebagai makna tindakan atau sikap seseorang. Mungkin dapat menolong Anda memahami komunikasi nonverbal dari orang yang sedang Anda hadapi.

No	**Bahasa badan, sikap & tindakan**	**Makna**
1	Berdiri tegap dan lurus	Ekstrovert, memandang diri sehat
2.	Berdiri seperti kecapekan dengan kepala menunduk	Introvert, tidak merasa nyaman dengan situasi
3	Menggunakan gerakan badan secara luas	Terbuka, berpandangan maju dan luas, percaya kepada diri

No	Bahasa badan, sikap & tindakan	Makna
4.	Menggunakan gerakan badan secara terbatas	Malu, tidak mampu memiliki kepastian dan sifat tertutup
5	Tetap menyendiri dan menjaga jarak	Cenderung penyendiri, mungkin karena malu atau tertekan.
6	Condong ke arah posisi yang dapat didekati, sedikit maju	Ingin meninggalkan tempatnya dan sikap diikut sertakan dalam percakapan
7	Duduk gelisah, sering melihat kearah jarum jam	Ingin mengakhiri percakapan, ada acara yang mendesak harus dilakukan
8	Menunduk sambil menjawab pertanyaan, tidak melakukan kontak mata	Kesal, atau malu, dapat juga karena tidak berani

c. Tekik Menyimak Efektif

1) Memberikan perhatian dan minat

Perhatian penuh terhadap orang yang sedang berbicara pada Anda itu sangat penting. Mendengarkan dengan sungguh sungguh dan tertarik. Charles W, Eliot seorang master dalam seni mendengarkan mengatakan bahwa yang dimaksud mendengarkan bukan sekedar mendengar dengan diam, melainkan suatu bentuk kegiatan. Dia duduk tegak di ujung kursinya, dengan tangan-tangan menyatu di atas pangkuan, tidak membuat gerakan apapun kecuali memutar ibu jarinya dengan lebih cepat atau lebih lambat. Dia memandang teman bicaranya dan tampak mendengarkan dengan mata dan telinganya. Dia mendengarkan dengan pikirannya, dan dengan penuh perhatian memikirkan apa yang Anda katakan, sementara Anda mengatakannya. Penunjukan minat, sebagaimana dengan semua prinsip lain dalam hubungan manusia, sangat menentukan suasana pembicaraan.

Mendengarkan sama pentingnya dengan kehidupan rumah tangga dan dunia bisnis. Tidak hanya tokoh penting yang sangat suka pada pendengar yang baik, tetapi orang biasapun demikian juga. Bersikap empatik dan simpatik akan mendorong mereka mengemukakan hal hal yang diinginkan. Jadilah pembimbing dan mengajak orang untuk berbicara tentang kepentingan mereka, siapa tahu Anda juga dapat memetik pelajaran dari pengalaman orang tersebut Banyak orang mendatangi seorang dokter, pada hal yang sesungguhnya mereka butuhkan adalah seorang pendengar. Memberi perhatian kepada orang yang berbicara kepada Anda, tataplah pada orang tersebut. Apabila Anda sering menoleh ke kiri, ke kanan atau ke arah lain pandangan Anda, itu bermakna bahwa Anda sesungguhnya tidak tertarik kepada pembicaraan. Hal demikian sipembicara akan memperhatikannya dan mungkin dia akan tersinggung.

2) Memahami

Kebanyakan orang mendengarkan bukan dengan maksud untuk memahami. Mereka mendengarkan dengan tujuan untuk memberi jawaban Memahami, berarti memberikan makna terhadap maksud lawan bicara. Mendengarkan dengan tujuan memahami maksudnya berusaha dulu untuk benar benar memahami, sehingga dapat memberi penghargaan dan membesarkan hati pembicara. Cara ini mengungkapkan perhatian dan penerimaan kita, serta memperteguh kembali rasa berharga yang dimiliki seseorang.

Apabila Anda ingin menjadi seorang pimpinan yang baik, jadilah pendengar yang sungguh memahami orang lain yang bicara. Begitu juga dalam suatu ruang rapat atau ketika Anda duduk satu lawan satu, alangkah baik jika Anda membuat catatan tentang arahan arahan yang diberikan oleh pimpinan atau peserta rapat yang Anda pimpin. Pimpinan yang baik akan mengatakan pada awal pertemuan topik apa

yang akan dibicarakan dan pada akhirnya akan meringkas apa yang telah dikatakan.

Ada kalanya topik pembicaraan kurang dipahami peserta, tidak ada salahnya untuk memperjelas kembali. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang orang tersebut akan senang menjawabnya. Memahami berarti dapat menangkap makna yang dikomunikasikan oleh mereka dalam pembicaraan dengan Anda. Beri semangat mereka agar mereka berbicara tentang diri mereka dan hasil sukses mereka. Ingatlah bahwa orang dengan siapa Anda bicara adalah seratus kali lebih tertarik dengan diri mereka sendiri dan keinginan mereka, juga masalah mereka dibandingkan dengan minat mereka pada Anda dan masalah Anda.

Berikut adalah beberapa cara menjadikan kemampuan Anda untuk mendengar aktif.

a) Hindari memberi evaluasi/penilaian tergesa-gesa terhadap pembicaraan
b) Hindari pemberian “bumbu-bumbu" pada isi pembicaran orang lain, jangan mencampurkan gagasan kita ke dalam gagasan si pembicara
c) Beri kesempatan untuk berbicara, biarkan kawan bicara selesai, jangan menolak, mempertahankan diri atau berdebat.
d) Jangan menghindar dari pembicaraan, berusahalah membangun saling pengertian.
e) Hindari adanya kecurigaan terhadap apa yang akan dibicarakan orang lain. Kalau Anda sudah mendengar perkataan kawan bicara, nilailah apa yang Anda dengar dengan mencari apa yang positif di dalam kata kata si pembicara. Jangan menyimpan kata kata yang membuat suasana menjadi tidak bermakna.
f) Jangan terlalu memperhatikan sikap dan penampilan si pembicara, lebih baik perhatikan isi pembicaraan. Jangan bersifat munafik

karena sifat munafik akan berpengaruh terhadap penghargaan Anda atas isi pembicaraan.

g) Berjanjilah untuk memikirkan ide-ide kawan bicara dan pelajari ide-ide itu dengan saksama, dan lakukanlah sungguh sungguh. Kawan bicara Anda mungkin benar. Jauh lebih mudah pada tahap ini untuk memikirkan pandangan-pandangan mereka dibandingkan Anda maju dengan cepat dan mendapatkan posisi di mana kawan bicara Anda bisa berkata "kami sudah berusaha menyampaikan pada Anda, tetapi Anda tidak mau mendengarkan”.

h) Saringlah butir butir yang paling penting, dan mulailah merumuskan tanggapan Anda. Rumuskan kembali isi pembicaraan-pembicaraan serta harapan si pembicara.

i) Berterima kasihlah kepada kawan bicara Anda dengan tulus untuk pernyataan pernyataan mereka. Ini akan membuat Anda menguasai tujuan diskusi itu.

3) Bereaksi

Apabila dalam suatu diskusi seseorang memberi Anda kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat Anda, berhentilah sesaat untuk memikirkan tanggapan Anda. Bersiaplah memberi tanggapan secara verbal. Berilah reaksi dengan senyum, anggukan tanda setuju, atau isyarat, apapun yang wujudnya asal wajar, untuk menyatakan perhatian atas apa yang sedang dikatakan.

Jangan memotong pembicaraan, ini bukan cara sopan untuk menunjukkan bahwa Anda aktif mendengarkan. Terutama bagi orang yang gaya bicaranya lamban, jangan pernah tergoda untuk memotong pembicaraan, akan lebih bijaksana apabila Anda sabar mendengarkan semua yang ingin disampaikannya.

d. Menjadi Pendengar yang Baik

1) Mengapa perlu menjadi pendengar yang baik?

Menjadi pendengar yang baik bukanlah usaha yang mudah. Seseorang harus dapat bersikap obyektif dan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh lawan komunikasinya. Mendengarkan dengan efektif membutuhkan konsentrasi, pengalaman dan keterampilan. Manfaat dari menjadi pendengar yang baik diantaranya: Lawan berbicara kita akan lebih mudah dalam menyampaikan informasi. Hubungan kerja akan semakin baik. Mendorong pembicara untuk tetap berkomunikasi. Informasi dalam bentuk instruksi, umpan balik dan lainnya akan lebih jelas diterima.

Mendengar menuntut tenaga dan komitmen, kata DeVito. Ya, karena mendengarkan secara benar membutuhkan pemusatan perhatian yang menuntut keterlibatan hati, mata dan telinga. Mendengar dengan baik ditandai dengan bahasa tubuh pendengar yang menunjukkan respons terhadap kata-kata pembicara. Maka dengan demikian, seluruh ego dan persoalan-persoalan pribadi maupun situasi psikis kita tanggalkan karena kita mengutamakan orang lain dibanding menuruti ego diri.

Pepatah mengatakan, mengapa kita diberi dua telinga dan satu mulut? Itu sebuah petanda bahwa kemampuan mendengar lebih penting dibandingkan dengan kelihaian berbicara. Energi mendengarkan dua kali lebih sukar dibandingkan berbicara. Karena itu, mendengarkan dalam bahasa Cina: ting disusun dalam empat huruf yakni hati, pikiran, telinga dan mata untuk menunjukkan betapa mendengarkan ini menuntut kesabaran, kemampuan menyeleksi informasi sekaligus memahami dengan penuh toleransi.

Kebanyakan dari manusia adalah pendengar yang buruk. Ia ingin didengar tetapi kurang kemauan untuk mendengar. Akhirnya orang ketika berkomunikasi bukan untuk memahami secara sungguh-sungguh

isi pesan pembicara melainkan menunggu giliran untuk berbicara. Terkadang apabila tidak suka dengan pesan pembicara atau merasa bosan, ia akan menginterupsi tanpa rasa bersalah.

Kurangnya kemauan mendengar ini akhirnya menghambat kesempatan belajar dan membuang peluang-peluang memahami, mengontrol dan mengendalikan situasi.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang menjadi pendengar yang buruk, diantaranya adalah:

a) Merasa memiliki isi pesan yang lebih baik dan penting
b) Tidak suka kepada pembicaranya
c) Pikiran yang tertutup
d) Lebih suka bicara karena merasa lebih terlibat
e) Terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri
f) Berpikir tentang apa yang kita katakan pada giliran kita berbicara
g) Melihat pesan sesuai perspektif berpikir kita bukan sudut pandang pembicara
h) Sibuk, lelah dan banyak gangguan

2) Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik

Keterampilan mendengar seringkali bukan dianggap sebuah keistimewaan, karena semua orang dapat mendengar, namun betapa keterampilan mendengar jauh lebih penting daripada kepiawaian berbicara. Kemauan memahami lebih penting dibandingkan dengan kehebatan menghakimi, kita semua layak memiliki keistimewaannya agar kita semua menjadi pribadi yang menarik yakni keterampilan mendengarkan dengan penuh empati.

Kadang banyak mendengar dapat memberi jauh lebih banyak manfaat bagi diri kita dibandingkan banyak berbicara. Telinga saja diciptakan

dua, lebih banyak dibandingkan mulut yang hanya diciptakan satu. Bermakna kita seharusnya memang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, namun tidak semua orang mau menjadi seorang pendengar. Tidak semua para pendengar dapat menjadi pendengar yang baik.

Beberapa cara menjadi pendengar yang baik, diantaranya adalah:

a) Kembangkan kesabaran.
b) Berikanlah perhatian kepada yang sedang berbicara.
c) Dengarkan untuk memahami apa yang sesungguhnya dikatakan orang
d) Dengarkan, jangan menentang
e) "Kirim balik" apa yang telah didengar untuk memverifikasinya dengan menyatakan makna pembicara atau perasaan mereka dengan kata-kata kita
f) Mengarahkan badan kearah pembicara
g) Mempertahankan kontak mata
h) Menganggukdan menyatakan misalnya dengan kalimat "mmmm.." atau "ya, ya.."

Cara lain untuk menjadi pendengar yang baik dapat dilakukan dengan:

a) Pusatkan perhatian Anda pada orang yang sedang berbicara dan dengarkan apa yang dia katakan. Jangan biarkan pikiran Anda melayang ketempat lain. Hanya dengan cara seperti itu Anda dapat belajar menjadi pendengar yang baik.
b) Pandanglah mata lawan bicara Anda dengan wajar. Ini memberikan kesan bahwa Anda memperhatikan apa yang diucapkannnya dengan sungguh-sungguh.

c) Berikan respon yang bersahabat. Respon kecil yang mungkin tampak sepele dapat membuat dia merasa dihargai. Sekali-kali Anda dapat mengangguk, menggelengkan kepala, tersenyum, tertawa atau memberikan komentar-komentar pendek seperti Oh, ya?, hebat !, luar biasa! dsb.
d) Berikanlah kesempatan lawan bicara Anda untuk menyelesaikan apa yang ingin diutarakannya. Hindari kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Selain tidak sopan, kebiasaan itu dapat membuat dia merasa kesal dan tersinggung.
e) Apabila Anda merasa bosan atau tidak berminat dengan topik pembicaraannya, alihkan dengan perlahan-lahan. Jangan sesekali mengubah topik pembicaraan secara mendadak seperti pengemudi yang belok tanpa menyalakan lampu righting terlebih dahulu.
f) Buatlah lawan bicara Anda bergairah untuk terus berbicara. Apabila Anda berhasil memancing gairah orang yang semula kurang antusias, maka Anda telah berhasil merebut hatinya, namun dalam hal ini ada perkecualian yaitu apabila lawan bicara Anda adalah tipe orang yang suka memonopoli pembicaraan. Orang yang seperti itu biasanya akan selalu bergairah untuk terus berbicara meskipun Anda sudah tampak terkantuk-kantuk.
g) Kendalikan diri Anda untuk tidak tergoda ingin mengalahkan lawan bicara Anda. Anda dapat memadamkan gairah orang lain hanya dengan menunjukkan bahwa Anda lebih siap daripada dia. Biarkan dia merasa bangga dengan prestasi atau pengalamannya meskipun Anda punya prestasi atau pengalaman yang lebih hebat darinya.
h) Pada berbagai kasus kasus khusus, belajarlah untuk meringkas apa yang diuraikan oleh teman Anda sebelum Anda memberikan komentar atau nasehat. Bersikaplah seperti seorang dokter yang mendiagnosa penyakit pasiennya dengan teliti sebelum menyimpulkan apa penyakitnya dan memberi resep obat.

Bayangkan apabila ada orang yang menceramahi Anda panjang lebar, padahal tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda ungkapkan.

i) Belajarlah peka terhadap motif orang lain. Mungkin dia sedang mencurahkan isi hatinya tanpa keinginan untuk dinasehati, apalagi disalahkan. Jadi Anda cukup berperan sebagai pendengar saja. Mungkin dia sedang menceritakan pengalaman agar Anda memujinya. Pujilah dengan spontan dan tulus. Mungkin juga dia sedang mengajak Anda masuk dalam komunikasi yang lebih akrab dan terbuka. Kalau Anda mau, mulailah melakukan komunikasi dua arah.

j) Belajarlah mendengar dengan tulus. Semua kiat tersebut diatas tidak akan membuat Anda menjadi pendengar yg baik apabila Anda tidak melakukannnya dengan tulus. Anda tidak akan menjadi pendengar yang baik apabila Anda terbiasa berpura-pura menjadi pendengar yang baik.

3) Panduan mendengarkan seseorang berbicara.

a) Perlu diingat bahwa kita tidak dapat mendengarkan dan berbicara pada saat bersamaan. Hal ini merupakan prinsip dasar dari mendengarkan efektif. Seseorang cenderung untuk selalu menambahkan pendapatnya pada saat ia berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menjadi persoalan jika lawan bicara kita belum selesai berbicara. Ia dapat saja merasa terganggu, maka pihak pendengar jelas konsentrasi akan terpecah.

b) Mencoba memahami pokok pikiran atau ide utama pembicara. Seorang pendengar yang baik selalu mencoba untuk memahami intisari dari suatu pesan.

c) Hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Pendengar yang baik selalu mencoba untuk memfokuskan diri pada pembicara. Mencoba mendengarkan keluhan karyawan sebagai contoh, tanpa terpengaruh oleh dering telepon, orang yang berlalu lalang, dan sebagainya. Oleh karena itu dianjurkan untuk yang serius, faktor lingkungan perlu diperhatikan.
d) Mencoba untuk mengendalikan emosi. Pendengar yang baik selalu mencoba untuk mengesampingkan emosi, sehingga ia dapat menerima pembicaraan dengan jernih. Selalu mencoba untuk memahami pembicara tanpa membuat penilaian pribadi atas pembicara.
e) Membuat catatan jelas dan singkat. Buatlah catatan kecil tanpa mengurangi konsentrasi kita pada saat mendengarkan. Harap diingat kita tidak dapat mengerjakan dua tugas sekaligus tanpa mengurangi keefektifan salah satu diantaranya.
f) Mencoba untuk bersikap empati. Mencoba untuk menghargai posisi pembicara, sehingga kita terhindar dari mendengar apa yang hanya mau kita dengar saja.
g) Memperhatikan komunikasi non verbal. Tataplah lawan bicara, dan perhatikan bahasa tubuh mereka. Seringkali terjadi pemahaman akan suatu informasi lebih dapat kita pahami dengan memperhatikan raut muka dan gerak tubuh lawan bicara. Sebagai pendengar, kita pun harus memperhatikan bahasa tubuh yang kita tampilkan, seperti posisi duduk, raut muka, anggukan kepala dan sebagainya.
h) Mendengarkan dengan selektif. Seringkali dalam suatu pembicaraan, pembicara memberikan informasi-informasi yang penting. Kadang informasi tersebut tersembunyi di dalam konteks pembicaraan. Kita diharapkan dapat memilah-milah informasi tersebut untuk mendapatkan yang kita butuhkan.

i) Bertanya pada tempatnya, tunda dahulu pertanyaan dan gagasan yang ingin disampaikan sampai pembicara selesai. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas maksud pembicara.

j) Buatlah kesimpulan atas apa yang menjadi inti pembicaraan. Melalui cara mencoba menangkap intisari pembicaraan diharapkan kita dapat memahami permasalahan dengan kata kita sendiri.

k) Memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik kepada pembicara sehingga ia mengetahui sejauh mana kita sudah memahami pembicaraan, yaitu dengan memperhatikan hal-hal di atas diharapkan kita dapat menjadi pendengar yang baik dan memperlancar proses komunikasi yang sedang berlangsung.

4) Hambatan Mendengar Aktif

Pada komunikasi tatap muka *(face to face communication)* komunikasi berlangsung secara dialogis sambil saling menatap sehingga terjadi kontak pribadi (*personal contact*), karena situasinya tatap muka komunikasi ini dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku (*attitude, opinion, and behaviour change)* seseorang. Agar dalam situasi tatap muka dapat tercipta suasana akrab dan menyenangkan diperlukan kemampuan untuk mendengarkan. Mendengar aktif adalah upaya dengan sepenuh kemampuan untuk dapat menangkap informasi yang diperlukan. Mendengar aktif diperlukan dalam komunikasi inter personal pada tugas sehari hari, memusatkan perhatian pada pembicaraan seseorang untuk dapat menangkap pembicaraan. Mendengar aktif berbeda jelas dengan mendengar biasa.

Anda dapat mendengar radio, mendengar dan melihat berita di televisi secara tidak sengaja, tidak seluruh isi berita itu dapat ditangkap dan dipahami. Suatu kejadian kebakaran, banjir lumpur, gempa dan

tsunami, kadang kadang diketahui tanpa disengaja dan tidak secara mendalam dipahami berita tersebut. Lain halnya apabila yang menjadi korban bencana tsunami ada di antara sanak famili, atau anggota keluarga. Setiap ada berita dengan sengaja “penuh rasa ingin tahu" didengarkan setiap kalimat, bahkan mungkin setiap kata dari penyiar disimak dan dimaknai. Inilah contoh perbedaan antara pendengaran dan mendengar aktif. Mendengar aktif memberi makna pada bunyi yang ditangkap yang merupakan jembatan untuk sampai pada pengertian.

Ada beberapa hambatan dalam mendengarkan aktif yang kadang-kadang timbul dari situasi berikut:

a) Dari diri sendiri, dalam arti seseorang mudah timbul rasa harus mempertahankan diri; misalnya seorang siswa Anda melaporkan ulah seorang guru yang melakukan pelecehan seks terhadap dirinya. Anda merasa tuduhan itu salah dan bahkan balik menyalahkan siswa tersebut yang suka menggoda, pakaian kurang pantas dan lainnya. Maka sikap mempertahankan diri akan menghambat “mendengar aktif”.
b) Persepsi kita terhadap seseorang. Apabila seseorang berbicara terlalu cepat dan nada suara tinggi, kita dapat menafsirkan ia sedang marah marah, maka sikap kita jadi lain.
c) Pesan yang terlalu panjang, sehingga tidak jelas apa yang hendak disampaikan. Kita lebih terpancing oleh begitu banyak masalah yang disampaikan daripada memaknai inti/ide yang akan disampaikannya.

5) Keuntungan Mendengar Aktif

Beberapa keuntungan dari mendengar aktif antara lain:

a) Mendengar aktif dapat meningkatkan pengetahuan, karena dengan memahami masalah maka terbuka pemecahan masalah
b) Mengurangi salah paham. Sering kali percekcokan terjadi karena kesalah pahaman, (satu sama lain tidak bicara).
c) Meningkatkan pencapaian tujuan, karena Anda dapat memahami masalah dengan mendengar aktif
d) Pendalaman hubungan, akan semakin akrab karena tumbuh perasaan positif dari kedua pihak.
e) Pemahaman yang sama dan kemampuan komunikan menafsirkan pesan dan setting komunikasi kondusif (nyaman, menyenangkan dan menantang) semuanya itu menjadi prasyarat dalam komunikasi kontak pribadi.

e. Melakukan Komunikasi Efektif

1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Komunikasi

Tujuan komunikasi hanya akan tercapai apabila komunikasi dimaksud efektif. Komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan seperti yang ditangkap dan dipahami oleh penerima (Tubbs dan Moss, 1996). Pemahaman diartikan sebagai penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Lima hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan.

Pengalaman individu tentang kenangan atas objek, orang, kejadian, peristiwa akan mempengaruhi orang dalam mengantisipasi masa depan. Perbedaan geografis, demografis dan psikografis akan menyebabkan perbedaan karakteristik. Perbedaan karakteristik akan menyebabkan perbedaan sikap dan kemampuan seseorang untuk

mengerti, memahami, menerima dan menerapkan suatu ide, informasi, teknologi yang baru. Umur, keberanian mengambil resiko, tingkat partisipasi dalam kelompok, dan aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru termasuk faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang untuk menerima suatu inovasi. Berkaitan dengan pengadopsian inovasi, maka umur, status sosial ekonomi, pendidikan dan pola hubungan penting untuk diperhatikan. Karakteristik lain yang juga perlu diperhatikan adalah keterbukaan. Keterbukaan komunikan tidak semata-mata suatu kemampuan penerimaan yang pasif bagi pengetahuan tentang dunia luar, tetapi secara aktif mencari ide-ide, produk dan cara-cara baru. Keterbukaan juga berarti daya menyesuaikan (*adaptability*), dinamis atau tidak kaku (*divisibility*).

Pada konteks komunikasi efektif, faktor internal dan eksternal dapat diwujudkan dalam serangkaian kegiatan komunikasi yang terencana, oleh sebab itu perlu dilakukan identifikasi, analisis, dan penetapan masalah dan kebutuhannya. Rangkaian kegiatan komunikasi yang dimaksud meliputi unsur: *who* (siapa sasarannya), *why* (apa latar belakang dan tujuannya), *what* (apa pesannya), *when* (kapan pelaksanaannya), *how* (bagaimana cara atau metode atau format penyampaian pesannya), dan *where* (dimana tempat pelaksanaannya).

Berkaitan dengan kegiatan identifikasi, analisis, dan penetapan masalah dan kebutuhan tersebut sekaligus menjawab unsur who dimaksud, Komunikator harus memiliki simpati dan empati terhadap kondisi komunikan, karena pada dasarnya tujuan dari komunikasi adalah adanya interaksi timbal balik. DeVito (1997) menyatakan ada lima ciri komunikasi interpersonal yang efektif, yaitu: *openness* (keterbukaan), *emphaty* (empati), *sportiveness* (dukungan), *positiveness* (rasa positif), *equality* (kesamaan).

Sehubungan dengan unsur *how*, keahlian serta kredibilitas sumber informasi, terdapat empat hal yang dapat meningkatkan ketepatan komunikasi antara sumber dan sasarannya, yaitu: keahlian komunikasi, sikap, tingkat pengetahuan dan kedudukan dalam sistem sosial. Schramm (1973) menyatakan terdapat empat syarat pesan yang harus dipenuhi agar komunikasi menjadi efektif, yaitu: 1) pesan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian, 2) pesan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang sama dan lambang-lambang yang dimengerti, 3) pesan harus dapat menimbulkan kebutuhan pribadi dan menyarankan bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi, 4) pesan harus sesuai dengan situasi penerima.

Soekartawi (1988) menyatakan agar komunikasi menjadi efektif, maka cara penyampaian pesan haruslah sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipraktekan petani, bahannya tersedia dan mudah diperoleh di lokasi setempat serta tidak beracun, dan untuk itu pesan spesifik dan ada tujuan yang jelas. Tubbs dan Moss (1996) menyatakan untuk membangkitkan tindakan komunikan, dapat diusahakan dengan jalan: 1) memudahkan pemahaman komunikan tentang materi pesan yang disampaikan, 2) meyakinkan komunikan bahwa tujuan pesan masuk akal, dan 3) mempertahankan hubungan harmonis dengan komunikan.

Penggunaan sarana pendukung, sejumlah contoh yang analogi dan pengembangan keahlian sumber dalam mengembangkan keahlian komunikasi akan membantu terciptanya komunikasi yang efektif. Tubbs dan Moss, 1996 menyatakan bahwa keahlian dan kepercayaan merupakan komponen yang paling bagi kualitas kredibilitas sumber informasi. Kualitas kredibilitas sumber informasi mengarah pada kepercayaan dan penilaian yang baik, dan kemampuan sumber

informasi dalam mengkaji dan mengaplikasikan manfaat informasi pada kondisi petani local.

2) Efektivitas Komunikasi

Menurut Gonzalez *dalam* Jahi (1998). Ada tiga dimensi efek komunikasi, yaitu: 1) efek kognitif, 2) efek afektif dan 3) efek konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap, sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu.

Menurut Rahmat (2000), efek kognitif terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavorial merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

Khusus untuk efek kognitif menurut Bloom (1974) terdapat enam tahap, yaitu; 1) pengetahuan, 2) pemahaman, 3) aplikasi, 4) analisis, 5) sintesa, dan 6) evaluasi. Semakin lama khalayak diterpa media massa (televisi), maka pengetahuannya tentang berbagai hal akan semakin bertambah, dalam hal ini pengetahuan anak tentang senjata, gaya perkelahian, dan tokoh jagoan yang ditayang televisi.

Pengetahuan merupakan salah satu dari efek komunikasi, dengan pengetahuan kita dapat menganalisa, melakukan sintesa, atau mengevaluasi sesuatu yang sedang kita lakukan.

Pemahaman adalah kemampuan untuk menyebutkan, mengartikan dan meramalkan suatu informasi secara tepat dan benar. Menurut Bloom

(1974), pemahaman terdiri dari tiga angkatan, yaitu; (1) Mengartikan (*translation*), (2) Menafsirkan (*interpretation*), dan (3) Meramalkan (*extrapolation*).

Pemahaman dalam komunikasi erat kaitannya dengan pesan tentang sesuatu yang disampaikan. Proses komunikasi diharapkan muncul pemahaman antara sumber dan penerima dari pesan yang disampaikan, baik dalam komunikasi secara indivdu atau massal, melalui media cetak atau elektronik, ataupun tatap muka langsung. Salah satu pertimbangan untuk mengukur efektivitas komunikasi ialah pemahaman khalayak pada pesan komunikasi, atau sampai sejauh mana keakuratan penerimaan khalayak pada pesan komunikasi, atau sampai sejauh mana keakuratan penerimaan isi stimulus sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengirim pesan (Tubbs dan Moss,2000).

Menurut Effendy (1993), untuk mencapai efektifnya komunikasi ada tujuh faktor yang perlu mendapat perhatian bagi komunikator, yaitu:

a) Kesiapan (*Preparedness*)

   Seorang yang terampil di mimbar harus menunjukkan kepada khalayak, bahwa ia muncul di depan forum dengan persiapan gaya komunikasi yang meyakinkan.

b) Kesungguhan (*Seriousness*)

   Seorang komunikator menunjukkan kesungguhan berbicara dan membahas suatu topik, sehingga menimbulkan kepercayaan pihak komunikan kepadanya.

c) Ketulusan (*Sincerity*)

   Seorang komunikator harus membawakan kesan kepada khalayak, bahwa ia berhati tulus dalam niat dan perbuatannya, seperti menghindari kata-kata yang mengarah kepada kecurigaan terhadap ketidak tulusan komunikator.

d) Kepercayaan (*Confidence*)

Seorang komunikator harus senantiasa memancarkan kepastian, dengan penguasaan diri dan situasi yang sempurna.

e) Ketenangan (*Poise*)

Khalayak cenderung akan menaruh kepercayaan kepada komunikator yang tenang dalam penampilan dan tenang dalam mengutarakan kata-kata.

f) Keramahan (*Friendship*)

Keramahan komunikator akan menimbulkan rasa simpati komunikan kepadanya. Keramahan disini tidak berarti kelemahan, tetapi pengekspresian sikap etis.

g) Kesederhanaan (*Moderation*)

Kesederhanaan tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik tetapi juga dalam hal penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan dan dalam gaya mengkomunikasikannya.

Menurut Berlo (1961) komunikasi akan berjalan efektif apabila ketepatan (*fidelity*) dapat ditingkatkan dan gangguan (*noise*) dapat diperkecil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi, sebagai berikut:

a) Positif terhadap komunikan dan pesan yang disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan serta memahami kondisi sistem sosial dan budaya komunikan.
b) Pesan komunikasi yang disampaikan harus berorientasi pada isi, unsur, struktur, kemasan dan kode yang dipahami.

c) Saluran/media komunikasi harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan isi pesan, sesuai dengan konteks komunikasi dan diupayakan agar dapat menyentuh panca indera.

d) Komunikan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi, bersikap positif terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan, serta dapat memahami kondisi sistem sosial dan budaya dari komunikator.

f. Menyiapkan Diri Bericara Efektif

1) Bagaimana penyampaian materi

Istilah berbicara efektif (*effective speaking*) telah menggantikan istilah lama, berbicara di depan publik (*public speaking*), yaitu yang terakhir menunjukkan adanya khalayak dalam jumlah besar. Padahal banyak pekerjaan sekarang ini dilakukan dalam suasana informal dan khalayak yang hanya tiga atau empat orang. Secara umum orang akan menyepelekan jumlah khalayak yang hanya sedikit. Kalau suara anda ingin terdengar meyakinkan dan antusias, maka vitalitas suara adalah sangat penting. Terlepas apakah anda itu sedang berbicara kepada 3, 30, atau 300 orang, pendekatan dasarnya adalah sama. Anda memerlukan suatu gaya berbicara. Tetapi baik keadaan fisik anda maupun suara anda haruslah diperbesar kemampuannya dan diproyeksikan untuk mempertemukan berbagai keinginan dari khalayak yang berjumlah besar.

Lord Curzon (1859-1925), sebagai salah satu orator terbaik pada masanya, ia membuat pertanyaan yang cerdik mengenai berbicara kepada khalayak. Ia berpendapat bahwa ada tiga hal terpenting yang harus diingat sesuai dengan kepentingannya, yaitu: 1) siapakah anda; 2) bagaimana anda mengatakannya; 3) apa yang anda katakan?

Sekilas, pertanyaan yang kedua dan ketiga terlihat tidak peduli betapa baiknya bahan yang anda sampaikan, apabila cara penyampaiannya tidak menghibur, tidak menarik dan tidak membuat nyaman, maka mungkin anda tidak akan dipedulikan.

Sebelum memulai berusahalah membuat catatan atau butir-butir pembicaraan, tanyailah diri anda sendiri dengan 6 pertanyaan berikut ini. Jawab setiap pertanyaan dengan sejujur mungkin. Ini akan membantu anda untuk berkonsentrasi dan meyakinkan bahwa anda berbicara pada tingkat yang tepat, mencegah kepanikan pada menit terakhir, dan menghemat waktu anda.

a) Apakah tujuan saya?

   Anda mungkin ingin menginformasikan, membujuk, mengajar atau merangsang mereka. Yang pasti anda selalu ingin menghibur.

   Menghibur tidaklah berarti melemparkan gurauan. Ini merupakan gabungan antara ‘Siapa anda’ dan ‘Bagaimana anda mengatakannya’ digabung dengan pemilihan kejadian dan urutan dari materi anda. Ini juga melibatkan anekdot dan gurauan yang relevan. Tetapi apabila anda tidak dapat bergurau, lebih baik jangan dilakukan.

   Ingatlah bahwa anda tidak dapat berbicara mengenai berbagai hal teknis untuk jangka waktu yang lama tanpa memberikan kesempatan istirahat sejenak pada para pendengar.

   Pada tujuan umum anda, pertimbangkan juga tujuan spesifik anda. Apa yang anda inginkan dari pendengar anda untuk mengingat, atau suatu tindakan yang anda inginkan dari mereka setelah pembicaraan selesai.

b) Kepada siapa saya berbicara?

Ketahui sebanyak mungkin mengenai pendengar anda. Penelitian terinci mungkin perlu, tetapi ini lebih berguna untuk jangka panjang. Anda mungkin harus mengendalikan pembicaraan anda sedekat mungkin dengan para pendengar. Hindari jargon (logat khusus) dan istilah teknis apabila tidak dipahami. Ketahui apa yang ingin diketahui pendengar anda, yang diperlukan untuk mereka ketahui dan apa yang tidak mereka perlukan.

c) Dimana saya menyampaikan pembicaraan?

Ketahui ukuran dan bentuk ruang, tinggi atap, apakah ada gorden dan karpet yang tebal. Ruang yang dipakai mungkin menyerupai kotak balok. Ini akan mempengaruhi akustik. Mungkin diperlukan sebuah mikrofon, tetapi jangan pergunakan kecuali anda memerlukannya.

d) Tentukan dimana anda akan duduk atau berdiri.

Anda harus dapat dilihat dengan mudah oleh setiap orang. Anda harus mendominasi posisi, meskipun tidak ada panggung, kecuali kalau pendengarnya dalam jumlah yang cukup banyak.

Cahaya alami harus dari salah satu sisi ruangan, kecuali pencahayaan buatan cukup baik. Apabila anda menggunakan peralatan elektris, yakinkanlah bahwa stop contactnya terpasang dengan baik.

Mengetahui beberapa hal ini akan membantu sikap santai ketika saatnya tiba.

e) Pada jam berapa saya berbicara?

Ini mungkin dapat mempengaruhi pengaturan materi anda, yang pasti mempengaruhi awal pembicaraan anda.

Saat setelah minum kopi di pagi hari adalah salah satu waktu yang baik untuk berbicara mungkin yang terbaik. Pendengar benar-benar bangun dan siap mendengarkan anda.

Sesudah makan siang merupakan waktu yang buruk. Anda perlu memberi hiburan sedapat mungkin.

Kalau pembicaraannya malam hari, ketahuilah seberapa banyak khalayak anda telah dibebani pada hari itu.

Informasi ini akan membantu anda untuk memulai awal pembicaraannya.

f) Berapa lama saya diharapkan berbicara?

Empat puluh lima menit adalah waktu terlama bagi seseorang untuk dapat berbicara dengan menyenangkan. Kalau anda diberi waktu beberapa jam, maka anda harus mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Setelah pidato pembukaan anda, anda bisa membagi pendengar menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menunjuk seorang sekretaris dan melanjutkan pembicaraan mengenai pokok tertentu.

Setelah beberapa lama, seluruh kelompok akan berkumpul dan masing-masing sekretaris akan melaporkan pada seluruh pendengar dan kemudian diskusi umum dilangsungkan. Menjadi kewajiban anda untuk menarik 'benang merah' kesimpulannya bersama-sama, dan ringkas.

2) Manfaatkan penggunaan alat bantu visual

Ingatlah bahwa orang yang mendengarkan akan menerima informasi untuk pertama kalinya. Fakta dan gagasan harus dijadikan secara sederhana dan logis. Bahasa yang jelas merupakan hal yang penting.

Selalulah mulai dari sesuatu yang diketahui ke yang tidak diketahui. Bangun jembatan dari satu persoalan butir berikutnya. Jangan mengembangkan sesuatu yang sudah jelas. Dukung pernyataan dengan beberapa contoh dan anekdot; ceritakan lelucon jika anda dapat dan kalau leluconnya relevan. Tetaplah pada pokok yang dibicarakan!

Penggunaan perangkat visual untuk membantu komunikasi, serta menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga cepat ditangkap. Mereka menyampaikan apa yang tidak dapat disampaikan oleh kata-kata.

Biarkan pokok persoalan berbicara, untuk dirinya sendiri. Kata-kata bukanlah perangkat bantu visual. Menggunakan kata-kata dengan menjaganya tetap ringkas dan sederhana, niscaya akan memerlukan penuh tenaga.

Ketika mempertunjukkan perangkat visual, diamlah sejenak supaya dapat membuat khalayak menangkapnya. Sulit, kalaupun tidak mungkin, untuk membaca dan mendengarkan pada saat yang sama. Pindahkan perangkat visual kalau anda telah selesai dengannya.

Jangan kehilangan kontak mata dengan pendengar dengan berbicara kepada gambar atau layar di papan. Gunakan tongkat penunjuk atau pensil dan berbicaralah kepada khalayak. Tetapi jangan ragu-ragu menulis atau menarik gambar yang ditempel atau papan tulis dan pada saat yang sama berbicara, tentu saja dengan pembicaraan atas hal yang anda tuliskan di papan. Pada saat yang sama keraskan sedikit suara anda.

Proyektor lebih baik dibanding sarana lain seperti peta, gambar, grafik, dan diagram.

Perangkat visual jangan digunakan semata-mata sebagai pemutus konsentrasi atau sebagai petunjuk bagi pembicara.

Jangan pernah memperlihatkan seluruh judul sekaligus. Gunakan pembatas dan batasi secara tetap apa yang dilihat yaitu apa yang sedang dibicarakan.

Hati-hati dengan warna. Warna biru dan hijau tampak mirip bagi orang yang setengah buta warna. Beberapa warna menjadi terlalu buruk kalau diproyeksikan.

Jangan gunakan terlalu banyak perangkat bantu visual. Ini akan membingungkan khalayak dan seringkali mengganggu pembicara.

Siapkan secara hati-hati dan lakukan latihan secukupnya.

Periksa perlengkapan dan selalu bawa lampu cadangan dan kabel penyambung.

Ketahuilah sebelumnya apa yang akan anda lakukan kalau karena satu dan lain hal tidak dapat menggunakan alat bantu visual anda.

g. Menyusun dan Menjawab Pertanyaan Secara Efektif

1) Menyusun atau mengajukan pertanyaan

Mampu bertanya dan menjawab pertanyaan secara efektif merupakan unsur penting, Tidak seorangpun yang akan berhasil membuktikan apa yang mereka katakan jika tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang mereka katakana. Banyak orang senang memberi pidato atau presentasi, tetapi jika ditemukan keharusan untuk menjawab pertanyaan, pidato itu menjadi menakutkan. Pertanyaan tidak dapat diramalkan, seberapa besarpun persiapan yang telah anda lakukan, namun tetap ada pertanyaan yang tidak dapat diantisipasi.

Tetapi pertanyaan harus dilihat sebagai kesempatan untuk berinteraksi dengan audiens. Pertanyaan merupakan ukuran apakah audiens mengikuti Anda, memahami argumen Anda dan setuju terhadap apa yang Anda katakan. Jika dapat menjawab pertanyaan dengan baik, maka Anda terbantu dalam menyampaikan pesan. Mengajukan pertanyaan juga penting, itu membantu Anda tetap terlibat jika orang lain yang berbicara, pertanyaan juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi dan memperluas isu kunci atau untuk mengajukan pandangan yang bertentangan.

Apabila Anda berlaku sebagai penanya, maka dibawah ini akan membimbing kita dalam menyampaikan pertanyaan. Mengingat hal tersebut maka perlu disadari bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara pertanyaan pendek dan pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang, misalnya:

a) Sebutkan langkah-langkah pelayanan secara berurutan.
b) Mengapa perlu pelayanan secara berurutan, atau mengapa hal itu penting.

Berikut ini contoh-contoh tentang bentuk pertanyaan yang membutuh kan jawaban dan informasi yang dikehendaki.

Tabel 6. Informasi yang dikehendaki, contoh pertanyaan dan kemungkinan jawaban

Informasi yang dikehendaki	Contoh bentuk pertanyaan	Kemungkinan jawaban
Memperoleh jawaban yang pasti (*leading question*)	Apakah Anda setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak	Setuju; Tidak setuju
Meminta pendapat mengenai masalah	Bagaimana pendapat Anda tentang	Menurut saya, langkah itu ……….,

Informasi yang dikehendaki	**Contoh bentuk pertanyaan**	**Kemungkinan jawaban**
yang mengandung pertanyaan (*controversial*)	pernyataan: agar memperoleh hasil, bawahan Anda harus dikerasi	karena dengan kita memperlakukan kasar saja........................ dst.
Pertanyaan yang bersifat umum	Bagaimana cara menangani persoalan ini	Menurut seorang ahli jiwa bernama……,,,,,,,,,,,,; menyatakan bahwa……dst Sedang menurut .... seorang ahli pendidikan, mengatakan bahwa …..dst.
Meminta pandangan	Bagaimaan pendapat Anda mengenai usul tersebut Bagamana pendapat Anda cara yang benar untuk menangani situasi seperti ini	Pendapat saya ....
Menanyakan batasan (definisi)	Apakah manajemen itu	Manajemen adalah……..dst (Kadarman,1994), Manajemen adalah …...dst (Menurut……….,tahun …).
Menanyakan perkiraan (estimate)	Menurut Anda berapa kali hal itu terjadi	Menurut saya kurang lebih 5 kali (umpamanya)
Menanyakan fakta	Berapa kali keluhan-keluhan yang terjadi pada bulan ini:	10 kali (umpamanya)

Informasi yang dikehendaki	Contoh bentuk pertanyaan	Kemungkinan jawaban
Menanyakan pengalaman seseorang	Apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini	Saya akan melakukan ....
Menguji pengetahuan seseorang	Bagaimana kebijakan instansi saudara apabila ada keluhan dari masyarakat	Sesuai dengan UU; Peraturan; kebijakan perusahaan, maka dalam menangani.................... dst.

2) Bagaimana Mengajukan Pertanyaan yang Efektif

Jawabannya tidak ada rumus mengajukan pertanyaan yang efektif. Pertanyaan yang baik tidak harus menjadi pertanyaan yang didesain untuk membuat bingung penerima pertanyaan itu. Melainkan pertanyaan itu akan memancing penerimanya dan yang hadir untuk mempertimbangkan sudut pandang atau isu yang berbeda.

Kadang-kadang tujuan pertanyan Anda adalah untuk memalukan atau 'membuat kekeliruan' pada diri penerima pertanyaan. Pertanyaan seperti ini sering dimulai dengan kalimat 'Pastilah Anda menyadari bahwa…' atau 'Apakah Anda memang menyangkal bahwa…' Jenis pertanyaan ini jarang mendekati efektif karena langsung membuat setiap orang tahu bahwa Anda sedang memancing perdebatan. Cara yang jauh lebih halus dan efektif untuk menunjukkan kekurangan yang ada pada argumen seseorang adalah menutupinya dengan kata-kata manis.

Pada kesempatan lain Anda mungkin berupaya lebih lanjut lagi dengan usulan tertentu. Ini merupakan pertanyaan jenis '*statement wrapped up in a question* (pertanyaan yang dibungkus dalam suatu pertanyaan).

Misalnya, 'Ha! Itu juga merupakan kasus di tahun 1960 ketika Presiden Kennedy membeli suara untuk memenangkan pemilihan Presiden, bukan?, sesungguhnya bukan pertanyaan tetapi merupakan suatu pernyataan dalam bentuk pertanyaan.

Mengajukan pertanyaan yang efektif memerlukan pemikiran yang hati-hati mengenai apa yang ingin dicapai. Pertanyaan kunci dapat membantu mencapai tujuan, tetapi ingat bahwa pertanyaan yang kurang dipikir secara matang dapat mengurangi kredibilitas Anda.

3) Bagaimana Menjawab Pertanyaan Secara Efektif

Kuncinya, mampu menguasai pertanyaan sama pentingnya dengan isi materi yang Anda presentasikan. Agar komunikasi menjadi efektif, pendengar Anda menginginkan setiap permasalahan yang mereka jumpai terselesaikan. Memiliki persiapan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Banyak pertanyaan dapat diantisipasi dengan sedikit berfikir. Ada pertanyaan tertentu yang hampir harus Anda miliki sebagai suatu respon terhadap suatu bisnis. Kemampuan berfikir secara cepat dan berbicara secara spontan diperlukan untuk mampu menjawab pertanyaan dengan baik.

Untuk mendorong adanya pertanyaan, katakan bahwa Anda senang menjawab pertanyaan kapanpun. Ciptakan suasana santai sehingga orang tidak akan takut mengajukan pertanyaan. Cara yang bagus untuk mendorong pertanyaan adalah dengan berhenti agak lama setelah menjelaskan poin-poin utama, dengan ini ada suasana hening dan akan memungkinkan orang terdorong untuk mengajukan pertanyaan lagi.

3. Refleksi

Setelah membaca informasi diatas, apa yang anda catat sebagai pengingat Anda dari bacaan diatas:

No	Pokok Bahasan	Catatan penting
1	Prinsip dasar komunikasi	
2	Jenis komunikasi	
3	Teknik menyimak efektif	
4	Menjadi pendengar yang baik	

No	Pokok Bahasan	Catatan penting
5	Melakukan komunikasi efektif	
6	Menyiapkan diri berbicara efektif	
7	Menyusun dan menjawab pertanyaan efektif	

4. Tugas

No	Jenis	Bentuk
1	Tugas	• Membuat paper prinsip dasar dan faktor yang berpengaruh terhadap proses komunikasi • Membuat ringkasan penjelasan dasar, komponen, bentuk, teknik, penyajian, karakteristik komunikasi efektif
2	Observasi	Ceklist lembar pengamatan kegiatan praktek komunikasi efektif

No	Jenis	Bentuk
3	Portofolio	• Laporan diskusi tentang: pemilihan pesan, sasaran, bahan,alat, media, saluran komunikasi efektif • Catatan komunikasi efektif dari berbagai sumber • Bahan tayang komunikasi efektif
4	Test	Menjawab pertanyaan test seperti dibawah ini

5. Test Formatif

No	Soal
1.	Komunikasi non verbal merupakan cara komunikasi yang tidak menggunakan bahasa yang diucapkan, tetapi menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi mimik (wajah), gerakan tangan, pandangan mata, jarak, gerakan tubuh dan lain-lain adalah merupakan komunikasi yang dapat terjadi.... A. Kapan saja pada interaksi interpersonal B. Kapan saja pada setiap bentuk interaksi C. Terbatas pada interaksi antar individu; D. Terbatas pada interaksi interpersonal
2.	Proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu, merupakan pengertian dari.... A. Belajar B. Kepribadian C. Persepsi D. Sikap
3.	DR. Paul Ekman seorang ahli ekspresi muka, emosi dan kebohongan mengatakan bahwa cara paling mudah mengenali pembohong adalah melalui...., A. Bahasa tubuh B. Test kebohongan C. Tingkah lakunya D. Ucapan dan gerak geriknya

No	Soal
4.	Jika dalam suatu pertanyaan dicontohkan dengan pertanyaan "Bagaimana cara menangani persoalan ini", maka jenis pertanyaan ini adalah.... A. Meminta pendangan B. Pertanyaan bersifat umum C. Pertanyaan mengenai batasan D. Untuk memperoleh jawaban pasti.
5.	Proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian menurut Efendi (2001) dibagi menjadi…. A. 2 tahap B. 3 tahap C. 4 tahap D. 5 tahap
6.	Dalam proses komunikasi, Isyarat, bahasa, dan simbol adalah merupakan …. A. Media berkomunikasi B. Media primer dalam komunikasi C. Media sekunder dalam komunikasi D. Sarana berkomunikasi
7.	Pola perilaku seseorang dapat berbeda satu sama lain, tetapi proses terjadinya adalah mendasar bagi semua individu, yakni dapat terjadi karena…. A. Dibiarkan B. Digerakkan C. Dilihat dan diamati D. Ditekan
8.	Menurut Soekartawi (1988), ciri yang mempengaruhi suatu adopsi inovasi yaitu.... A. Hubungan antar individu B. Mencari informasi C. Penerima informasi D. Sumber informasi
9.	Mengingat jumlah, sebaran luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan pertanian, maka untuk berhasilnya penyuluhan harus dilakukan melalui pendekatan kelembagaan… A. Kelompok B. Massal C. Koperasi D. Individual

No	Soal
10.	Menurut Mardikanto (1993) proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya adalah pengertian dari… A. Adopsi B. Adopsi inovasi C. Difusi inovasi D. inovasi
11.	Menurut deptan 2001, Klasifikasi pengadopsi, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi adalah factor yang mempengaruhi…. A. Kecepatan proses adopsi B. Kecepatan proses adopsi inovasi C. Kecepatan proses inovasi adopsi D. Kecepatan proses adaptasi
12.	Ciri kelompok adopter seperti umur relative muda, pendidikan tinggi, ekonomi baik, status social sedang, dan pola hubungan kosmopolit adalah merupakan ciri…. A. Pelopor B. Perintis C. Penganut dini D. Penganut lambat
13.	Dalam proses adopsi suatu materi penyuluhan, setelah mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan pengubahan sikap agar seseorang tersebut mau menerima inovasi, kegiatan ini disebut ….. A. Implementasi B. Konfirmasi C. Pengenalan/pengetahuan D. Persuasi/penghimbauan
14.	Menurut Lionberger 1968, faktor social, budaya, personal dan situasional adalah merupakan factor yang mempengaruhi proses…. A. Adaptasi B. Adopsi C. Diffusi D. inovasi
15.	Penyuluh berperan ganda, ia sebagai guru, motivator, dinamisator, inovator, kreator, dan fasilitator. Sebagai guru ia harus seperti…. A. Awan yang mampu melindungi petani B. Mata air yang mampu mengalirkan ilmu C. Matahari yang harus memanasi petani D. Samudera yang sebagai wadah keluhan petani

C. Penilaian

No	Ranah	Bukti	Keterangan
1	Sikap	Mengamati sopan santun saat dialog dengan orang lain	Dapat dilakukan oleh siswa lain
		Dominasi pembicaraan, mempertahankan pendapatnya, bahasa dalam diskusi,	Diamati oleh guru
		saling menghargai dalam diskusi,	
2	Pengeta huan	Kemampuan menyimpulkan isi teks	Dinilai oleh guru
		Kemampuan mengkolaborasikan isi teks dan temuan hasil wawancara maupun sumber lain menjadi kalimat utuh	
3	Ketram pilan	Ketrampilan berkomunikasi (pertanyaan yang tepat konten, dan bahasa) dalam menggali informasi dari orang lain	Dinilai oleh guru
		Ketrampilan presentasi	

Petunjuk:

Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai apakah sudah melaksanakan sikap/pengetahuan/keterampilan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap/pengetahuan/ keterampilan yang sudah diterapkan sendiri, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

No	Aspek Pengamatan Sikap/pengetahuan/ketrampilan	Skor			
		1	**2**	**3**	**4**
1					
2					
3					
dst					
	Jumlah Skor				

Petunjuk Penskoran:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{Skor}{Skor\ Tertinggi}\ x\ 4 = skor\ akhir$$

Contoh:

Skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir:

$$\frac{14}{20}\ x\ 4 = 2{,}8$$

Kriteria Perolehan nilai:

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 3,20 – 4,00 (80 – 100)

Baik : apabila memperoleh skor 2,80 – 3,19 (70 – 79)

Cukup : apabila memperoleh skor 2.40 – 2,79 (60 – 69)

Kurang : apabila memperoleh skor kurang 2.40 (kurang dari 60%)

III. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, H. Et.al. 1989. *Agricultural Extension Volume 1 Basic Concept and Methods. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation.* Wageningen.

Amri, Jahi. 1988. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga, Gramedia. Jakarta.

Anonimous. 1975. Pedoman Siaran Pedesaan. RRI dan Badan Pendidikan Latihan, dan Penyuluhan Pertanian. Jakarta.

Anonimous. 2006. Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan No 16 tahun 2006.

Asngari, P.S. 2003. Pentingnya Memahami Falsafah Penyuluhan Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. IPB Press. Bogor.

Berlo, D.K. 1960. *The Process of Communication*: An Introduction to Theory and Practice. Holt, Rinehart and Wiston. New York.

Biro Pusat Statistik Jakarta. 2002. *Employment* dalam Biro Pusat Statistik *online://www.bps.go.id/sector/employ/table2.html*

Cangara, Hafied. 2000. Pengantar Ilmu Komunikasi. (Cet. kedua). PT. Rajagrafindo, Jakarta.

Cook, James B. 1994, Community Development Theory, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia).

Dahama, D.P. and D.P. Bhatnagar. 1980. *Education and Communicatjon for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO.

DeVito, Joseph. 1982. *Communicology; An Introduction to the Study of Communication.* Harper & Row Publisher, New York.

DeVito, Joseph A. 1997. Komunikasi Antar Manusia; Kuliah Dasar. Jakarta: Professional Books.

Gibson, J. L. et.al. 1993. *Organisasi dan Manajemen; Perilaku, Struktur, Proses.* Edisi ke Empat. Erlangga. Jakarta.

Gie, T. Liang. 1984. Konsepsi Tentang Ilmu. Penerbit Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi. Yogyakarta.

Hamalik, O. 1990. Belajar dan Mengajar Ilmu Pertanian: Pendekatan Terpadu. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Have Lock, Ronald G. 1971. *Planning for Innovation. Ann* Arbor. University of Michigan.

Ibrahim, J.T., A. Sudiyono, dan Harpowo. 2003. Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Penerbit Bayumedia Publishing dan UMM Press. Malang.

Kartasaputra IG. 1987. Teknologi Penyuluhan Pertanian, Bina Aksara. Jakarta.

Koehler, Jerry W, Anatol Kart WE. And Applbaum Ronald, L. 1976. *Organizational Communication Behavioral Perspectives Holt, Rinehart and Winston, New York, Chicago*, San Fransisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, Sidney.

Koehler, Jerry W. et.al. 1970. *Organizational Communication: Behavioral Perspectives.* New York: Holt Rinchart and Wisten.

Leslie, Rae. 2005. Melibatkan Pembelajar Secara Aktif Dalam Pendidikan dan Latihan, Gramedia. Jakarta.

Leslie, Ray. 2005. Memaksimalkan Potensi Alat Bantu Dalam Pelatihan dan Pengembangan. Gramedia. Jakarta.

Liliweri, Alo. 1991. Perspektif Teoritis, Komunikasi Antarpribadi (Suatu Pendekatan Ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi). PT. Aditya Bakti. Bandung

Liliweri, A. 1997. Sosiologi Organisasi. Penerbit PT. Citra Adhi Bakti.

Lionberger; Herbert F and Paul H. Gwin. 1982. *Communication Strategy a Guide for Agricultural Change Agents*. *University of* Missouri.

Lippitt, R, J. Watson and B. Wesley. 1958. *The Dynamics of Planned Change*. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.

Mardikanto. Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Mardikanto, T. 1999. Penyuluhan Pembangunan Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Michael, Amstrong. 1988. Manajemen Sumberdaya Manusia. Gramedia. Jakarta.

Mubyarto dan Santosa, Awan. 2003, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kritik Terhadap Paradigma Agribisnis, Jurnal Ekonomi Rakyat Th II No.3 Mei 2003

Muhammad, A. 1995. Komunikasi Organisasi. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Nasikun. 2000, Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas dalam Fandeli, C dan Mukhlison (eds.), Pengusahaan Ekowisata, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar.

Nasution, Z. 1990. Komunikasi Pembangunan. Rajawali Pers. Jakarta.

Newstrom J.W. and Davis, K. (1993). *Organizational Behavior.* New York: McGraw-Hill.

Padmowihardjo, S. 2000. Metode Penyuluhan Pertanian, Universitas Terbuka, Jakarta.

Pambudy, R. 2003. Penyuluhan Dalam Sistem dan Usaha Agribisnis: Strategi Pengembangan Modal Manusia Indonesia*.* IPB Press. Bogor.

Rogers, E.M. and R.A. Rogers. 1976. *Communication in Organization. The Free Press, Macmillan Publishing Con*., Inc. New York.

Rogers, E.M. 1983. *Diffusion of Innovation*. Free Press. New York.

Rogers, E.M. and F.F. Shoemaker. 1987. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Terjemahan Abdillah Hanafi. Usaha Nasional. Surabaya.

Samsudin, U. 1977. Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*.* Penerbit Binacipta. Bandung.

Samsudin, U. 1987. Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian,Bina Cipta, Bandung.

Sayogyo. 2002. Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid 1, Gajah Mada University Press, Jogyakarta.

Schein, Edgar H. (1985). Psikologi Organisasi*.* LPPM dan Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Scott, James C. 1976, *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Yale *University Press*. New Heaven and London,

Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia.

Slamet, Margono. 1978. Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Slamet, Margono. 2001. Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas *dalam*. Penyuluhan Pembangunan di Indonesia: Menyongsong Abad 21. Penerbit PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.

Slamet, M. 2003. Penyuluhan Pertanian Dalam Proses Tinggal Landas. Makalah dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor.

Slamet, Margono. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor

Soedijanto. 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Agribisnis, Departemen Pertanian, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Sosiologi. Rajawali Pers. Jakarta.

Soekartawi. 2005. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suhandi, A. 1992. Pola Hidup Masyarakat Indonesia. Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Bandung.

Van den Ban, AW dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Welsch, Hilton, Gordon. 2000. Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Laba. Salemba Empat, Pearson Education Asia Pte. Ltd, Jakarta

Wiriaatmadja, S. 1973. Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian. Penerbit PT Yasaguna. Jakarta.